

**KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme)**



Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Magister Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin
Makassar

Oleh :

DIRWAN

Nim. 801 00212071

**PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dirwan
Nim : 80100212071
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 18 Januari 1979
Program : Dirasah Islamiyah
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Alamat : Jln. Poros Taman Telkomas No.16 Makassar
Judul : Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis terhadap Politik Ekonomi Kapitalisme).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis atau gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Februari 2015

Penyusun,

Dirwan

NIM : 80100212071

PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “*Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Terhadap Politik Ekonomi Indonesia)*”, yang disusun oleh Saudara/i **Dirwan**, NIM: **80100212071**, telah diseminarkan dalam Seminar Hasil Penelitian Tesis yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22/ Januari 2015, memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh *Ujian Munaqasyah Tesis*.

PROMOTOR:

1. { **Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag** } (.....)

KOPROMOTOR:

1. { **Dr. H. Abdul Wahab, SE, M.Si** } (.....)

PENGUJI:

1. { **Prof. Dr. H. Syahrir Mallongi, SE. M.Si** } (.....)

2. { **Dr. Muhammad Sabri AR, M.Ag** } (.....)

3. { **Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag** } (.....)

4. { **Dr. H. Abdul Wahab, SE, M.Si** } (.....)

Makassar, 2015

Diketahui oleh:
Direktur Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar,

Prof.Dr.H.Moh.Natsir Mahmud, M.A.
NIP. 19641110 199203 1 005

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “*Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme)*”, yang disusun oleh Saudara/I **Dirwan** NIM: **80100212071**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 26 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Ekonomi** Islam pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin. M.Ag. (.....)

KOPROMOTOR:

1. Dr. H. Abdul Wahab. SE. M.Si. (.....)

PENGUJI:

1. Prof. Dr. H. Syahrir Mallongi, SE. M.Si . (.....)
2. Dr. Muhammad Sabri AR. M.Ag. (.....)
3. Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin. M.Ag. (.....)
4. Dr. H. Abdul Wahab. SE. M.Si. (.....)

Makassar, 26 Februari 2015

Diketahui oleh:
Direktur Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.
NIP. 19641110 199203 1 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis dengan judul “Kelangkaan, teori nilai dan teori harga dalam perspektif ekonomi islam (Studi kritis terhadap politik ekonomi kapitalisme)”. Penulisan Tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut. Demikian pula penulis menyadari, bahwa selesainya penulisan tesis ini tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat, bimbingan, motivasi dan doa. Dalam kesempatan ini penulis merasa harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth :

1. Prof. Dr. H. Qadir Gassing HT dan Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, MA, masing-masing selaku Rektor UIN Alauddin dan Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Mks.
2. Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag dan Dr. H. Abdul Wahab, SE, M.Si, masing-masing selaku Promotor dan Copromotor sekaligus sebagai tim penguji.

3. Prof. Dr. H. Syahrir Mallogi, SE, M.Si dan Dr. Moh Sabri AR. M.Ag, masing-masing selaku tim penguji.
 4. Kepada seluruh dosen pengajar, rekan-rekan seperkuliahan dan staf administrasi pascasarjana UIN Alauddin.
 5. Kepada seluruh kawan seperjuangan di yayasan pendidikan islam terpadu Mks yang senang tiasa mendoakan penulis
 6. Kepada seluruh rekan-rekan seperusahaan CV Aliah Net Indonesia atas pengertian dan dukungannya.
 7. Terkhusus kepada kedua orang tua kami, H.M Darwis Hasan dan Hj. Nurhawiyah Sholeh yang telah melahirkan, memelihara, mendidik dan membesarkan, dengan kasih sayang dan doa tulus yang tidak terbatas hingga detik ini.
 8. Lebih khusus kepada istri tercinta Ir. Irma Sulaiman S.Pd, Ananda tercinta Muayyidil haq, Aleena Indah Faika dan Panrita Ghozy yang dengan tulus ikhlas, penuh kesetiaan dan pengorbanan mendampingi penulis dalam segala hal. Semoga Allah swt senang tiasa memberi hidayah, pertolongan dan kasih sayngnya dalam menjalani kehidupan ini menuju tujuan hidup yang mulia di sisi-Nya. Amin
- Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Makassar, Januari 2015

Ttd. Penulis :

Dirwan S.Hi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRASLITERASI.....	xii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-26
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	18
F. Metodologi Penelitian.....	20
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA DALAM EKONOMI POLITIK KAPITALISME.....	27-65
A. Profil ekonomi kapitalisme.....	27
1. Akidah Yang Melahirkan Ekonomi Kapitalisme.....	28
2. Sistem Ekonomi Kapitalisme.....	30
3. Pilar-Pilar Ekonomi Politik Kapitalisme.....	37
B. Kelangkaan, Teori nilai dan Teori harga dalam Perspektif Ekonomi Politik Kapitalisme	39
1. Makna Kelangkaan.....	40
2. Teori Nilai (<i>Value</i>) Barang dan Jasa.....	43
3. Teori Harga (<i>price</i>) dan Perannya dalam Produksi, Konsumsi dan Distribusi.....	46
C. Politik Pertumbuhan Lahir dari Ide Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga yang Menjadi Pilar-Pilar Ekonomi Politik Kapitalisme.....	55
1. Pengertian Politik Ekonomi.....	56
2. Perbedaan Antara Politik Ekonomi dan Ekonomi Politik/ (<i>Political Economic</i>).....	56
3. Politik Pertumbuhan Ekonomi Nasional.....	61
BAB III KELANGKAAN, NILAI DAN HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	66-84
A. Profil Ekonomi Islam.....	66

1. Akidah Islam Sebagai Asas Ekonomi Islam...	66
2. Memisahkan Pembahasan Antara Ilmu Ekonomi Dan Sistem Ekonomi.....	68
B. Pilar-Pilar Sistem Ekonomi Islam.....	71
1. Kepemilikan (Property/Tamalluk).....	72
2. Pengelolaan (<i>At-Tasharruf</i>) Kepemilikan.....	73
3. Distribusi Kekayaan (<i>Thauzi atsarwa</i>) di Tengah-tengah Manusia.....	75
C. Politik Ekonomi Islam.....	76
1. Kebutuhan Pokok (<i>Asasiyah</i>).....	78
2. Strategi Politik Ekonomi Islam.....	82
3. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Barang (Pangan, Sandang dan Papan).....	82
4. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Jasa (Keamanan, Kesehatan dan Pendidikan).....	96
D. Kelangkaan (<i>scarcity</i>), Teori Nilai (<i>theory of value</i>) dan Teori Harga (<i>theory of price</i>) dalam perspektif islam.....	102
1. Kelangkaan (<i>scarcity</i>) Bukanlah Problem Utama dalam Bidang Ekonomi.....	103
2. Nilai (<i>value</i>) adalah sesuatu yang bersifat hakiki, bukan sekedar asumsi.....	106
3. Harga (<i>price</i>), bukanlah bukan satu-satunya pengendali produksi, konsumsi dan distribusi....	107
BAB IV KRITIK TERHADAP IDE KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA YANG MENJADI PILAR-PILAR EKONOMI POLITIK KAPITALISME.....	110-146
A. Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme	110
1. Kerusakan Akidah Sekularisme yang Melahirkan Sistem Ekonomi Kapitalisme	111
2. Mencampuradukan Ruang Lingkup Pembahasan Ilmu ekonomi dan Sistem Ekonomi.....	114
3. Menekankan Pada Aspek Materi Semata.....	117
4. Memisahkan Barang Ekonomi dari Interaksi Masyarakat.....	119
5. Peningkatan pendapatan Negara(<i>national income</i>) dan pertumbuhan ekonomi nasional, satu-satunya jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan.....	121
B. Kritik Ekonomi Islam Terhadap Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori dalam ekonomi kapitalisme.....	126
1. Kritik Terhadap Ide Kelangkaan.....	126
2. Kritik Terhadap Teori Nilai.....	136

	3. Kritik Terhadap Teori Harga.....	141
BAB V	PENUTUP.....	147-151
	A. Kesimpulan.....	147
	B. Saran.....	150
	DAFTAR PUSTAKA.....	152
	Lampiran 1 : Gambar Bagan Pilar-pilar Ekonomi Islam.....	157
	Lampiran 2 : Gambar Bagan Mekanisme Distribusi Harta Dalam Ekonomi Islam.....	158
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	159



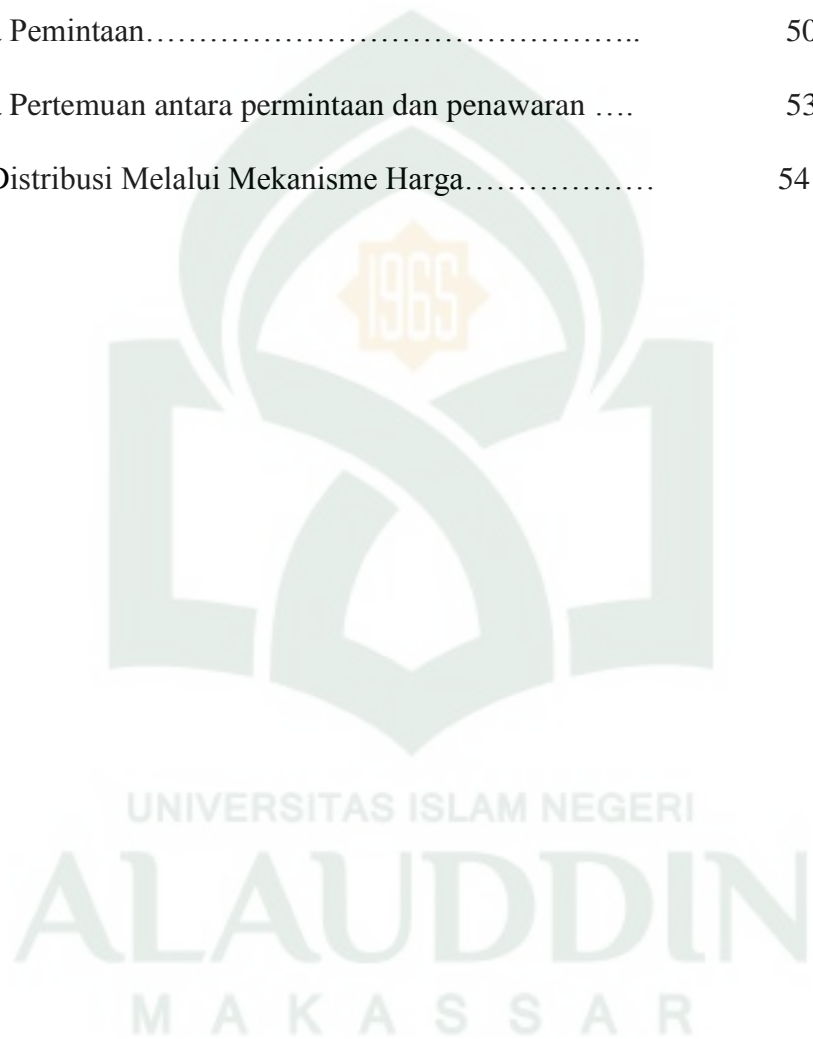
DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kepuasan Batas	44
2. Hubungan Harga Dan Produksi	48
3. Perbedaan Harga Dan Nilai Tukar.....	138



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	19
2. Kurva Penawaran.....	49
3. Kurva Permintaan.....	50
4. Kurva Pertemuan antara permintaan dan penawaran	53
5. Pola Distribusi Melalui Mekanisme Harga.....	54



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
 نَجِّينَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 نَعِم : *nu'ima*
 عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْعُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Maschi
SM	= Sebelum Maschi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRACT

Dirwan. 2015. Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kritis terhadap ekonomi politik kapitalisme). Tesis. Program Studi Ekonomi Islam. Pasca Sarjana Univ Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tesis ini adalah sebuah penelitian yang dilatar belakangi oleh kepentingan pengembangan kajian ekonomi islam yang memiliki difrensiasi dengan kajian-kajian ekonomi kapitalisme-liberal yang mendominasi saat ini. Pengembangan bidang ekonomi yang dilatar belakangi pandangan ekonom politik kapitalis dalam perjalanannya 200 tahun terakhir mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga banyak pakar keilmuan yang akhirnya memberi gelar khusus pada ilmu ekonomi dengan sebutan "*The Prince of Sosial science*" sebuah perkawinan antara dua disiplin ilmu, ilmu-ilmu sosial dan saintek. Sangking kuat dan berpengaruhnya kajian-kajian ekonomi kapitalisme-liberal saat ini, sehingga ekonomi islam dalam perkembangannya terpaksa diarahkan untuk tujuan penyelesaian problematika utama/ mendasar dalam bidang ekonomi sesuai pandangan kaum kapitalis liberal, yaitu problem kelangkaan. Pada akhirnya, kajian dan pengembangan bidang ekonomi islam pun fokus kepada penyelesaian tiga pertanyaan pokok yang harus dipecahkan dalam rangka mengatasi problem kelangkaan, yakni : *what ?*, *how?*, *for whom ?*, akibatnya sulit dipungkiri pengembangan ekonomi islam tidak jauh berbeda dengan ekonomi kapitalisme, sehingga sering muncul paradox ekonomi islam adalah ekonomi kapitalisme yang dijilbabi. Padahal jika berangkat dari akidah, sudut pandang dan tolok ukur yang berbeda, seharusnya melahirkan out put yang juga berbeda.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif, berfikir secara induktif (*grounded*), sebuah pendekatan cara berpikir yang sejalan dengan pendekatan yang diterapkan dalam proses penarikan hukum terhadap satu masalah dalam perspektif islam, dimulai dengan proses *tahqiq al-manat* (identifikasi/penelusuran fakta), *fahmu an-nushsus* (memahami nash-nash syariat terhadap fakta yang dihadapi), selanjutnya *istikhrajul hukm* (penarikan hukum) terhadap masalah pokok yang diangkat; kelangkaan, teori nilai dan teori harga dalam perspektif ekonomi islam, study kritis terhadap ekonomi politik kapitalisme (*political economic capitalism*), sub masalah adalah : *pertama*, apa yang dimaksud dengan problem kelangkaan, teori harga dan teori nilai dalam perspektif ekonomi kapitalisme ? *kedua*, bagaimana sistem ekonomi islam memandang problem kelangkaan, nilai dan harga ? *ketiga*, bagaimana kritik ekonomi islam terhadap ide kelangkaan (*scarcity*), teori nilai

(*theory of value*) dan teori harga (*theory of price*) yang menjadi pilar-pilar dalam ekonomi politik kapitalisme ?.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah pokok dan sub masalah yang diajukan, ditemukan beberapa hal yang kontradiktif antara ekonomi kapitalisme dan ekonomi islam: Ekonomi politik kapitalisme yang tegak diatas tiga pilar : Ide kelangkaan (*scarcity*), teori nilai (*theory of value*) dan teori harga (*theory of price*) lahir dari pandangan hidup sekuler (memisahkan agama dari kehidupan) yang bertentangan dengan fakta dan akidah islam. Kelangkaan dalam pandangan para ekonom konvensional adalah problem utama/mendasar dalam bidang ekonomi, sehingga kajian-kajian ekonomi kapitalisme diarahkan lebih fokus pada penyelesaian problem utama yang dengan sendirinya seluruh problem cabang dalam bidang ekonomi secara otomatis akan selesai, berbeda dengan ekonom muslim, kelangkaan tidaklah dianggap sebagai problem utama melainkan hanyalah sekedar problem cabang ekonomi. Nilai suatu komoditi dalam kajian ekonom konvensional adalah sesuatu yang bersifat nisbi dan relative karena disandarkan kepada *utility* yang bersifat personal, sementara *utility* identik dengan harga yang terus berubah sesuai mekanisme pasar, berbeda dengan ekonom muslim yang memandang nilai adalah sesuatu yang *real* dan tidak spekulatif karena disandarkan kepada kadar *masalah* yang terdapat pada suatu komoditas. Harga dalam kajian ekonom konvensional adalah satu-satunya faktor pendorong produksi, konsumsi dan distribusi, sementara ekonom muslim memandang harga hanyalah salah satu dari hal tersebut. Politik ekonomi kapitalisme menjadikan peningkatan kekayaan Negara sebagai tolok ukur kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sementara politik ekonomi islam menjadikan terpenuhinya kebutuhan tiap individu masyarakat sebagai tolok ukur kesejahteraan dan kemakmuran

Kata Kunci : Kelangkaan, teori nilai, teori harga, ilmu dan sistem ekonomi, politik ekonomi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang ekonomi dalam perjalanannya 200 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga banyak pakar keilmuan yang akhirnya memberi gelar khusus pada ilmu ekonomi dengan sebutan “*The Prince of Sosial science*” rajanya ilmu pengetahuan sosial yang merupakan perkawinan antara ilmu-ilmu sosial dan sainstek.¹

Julukan *The Prince of Sosial Science*, mendorong perkembangan ilmu ekonomi menjadi sangat luas dan kompleks, sehingga jati dirinya semakin sulit untuk diidentifikasi lagi. Sebab, perkembangan bidang ini semakin jauh dari akarnya sebagai ilmu sosial. Perkembangan mutakhir ilmu ekonomi akhirnya semakin mendekati ilmu eksakta atau ilmu pasti, sebagaimana ilmu matematika, fisika, kimia dan biologi.²

Akibatnya, berbagai problem ekonomi yang sesungguhnya merupakan problem sosial kemanusiaan, akhirnya harus diselesaikan dengan pendekatan yang sangat matematis dan eksakt dengan penyelesaian hitung-hitungan matematis, yang sangat kaku, kering dan kosong dari dimensi sosial kemanusiaan. Padahal sesungguhnya fenomena ekonomi bukan hanya persoalan hitungan uang, produksi barang atau kenaikan pendapatan *an sich*, lebih dari itu fenomena ekonomi akan melibatkan banyak dimensi, mulai dari persoalan uang, produksi barang, pekerjaan, hubungan sosial, hubungan kemanusiaan, kasih sayang, kepedulian,

¹Dwi Condro Triono, Ph.D, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, h .2.

²Dwi Condro Triono, Ph.D, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, h.3.

dan seterusnya, hingga pada dimensi peribadatan yang terepresentasi dalam politik ekonomi sebuah bangsa. Kondisi tersebut terjadi karna bidang ekonomi disandarkan kepada *world view* ekonomi konvensional yang hanya fokus pada aspek material dari sisi kehidupan manusia.³

Dalam banyak literatur ekonomi modern, ekonomi dipahami sebagai suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang atau kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Pilihan harus dilakukan manusia pada saat mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pilihan itu memang harus dilakukan dikarenakan keterbatasannya sumber daya (*limited resources*) atau alat pemuas kebutuhan.

Mungkin pembahasan tentang kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*) merupakan pembahasan yang sangat klasik, hal ini terlihat dari beberapa literatur ekonomi dari karya beberapa tokoh ekonom baik Kapitalis, Sosialis maupun Islam. Pembahasan tentang kelangkaan/*scarcity* merupakan pembahasan yang kelihatan sepele namun memiliki implikasi yang begitu besar pada aktivitas perekonomian. Ketiga sistem diatas, kapitalisme, Sosialisme dan Islam memandang problem kelangkaan (*scarcity*) secara berbeda. Walaupun dalam kenyataannya antara sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis memandang bahwa *scarcity of resources* adalah penyebab dari kurang maksimalnya pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas (*unlimited needs and wants*). Kapitalis dan Sosialis menempatkan *scarcity* sebagai problem utama perekonomian, sedang Islam menempatkannya sebagai problem cabang (*furu'*).

³ Prof.Dr. Didik J Rachbini, *Ekonomi dan teori pilihan public*, h.4

Sistem ekonomi kapitalisme, diakui merupakan sistem ekonomi yang eksis mengatur percaturan perekonomian dunia saat ini, setelah ekonomi sosialisme di tinggalkan, walaupun dalam perjalanannya sistem ekonomi ini telah mengalami tambal sulam untuk menutupi berbagai kekurangannya. Di bawah komando Negara adidaya dunia Amerika Serikat, sistem ekonomi kapitalisme telah menjadi tolok ukur dalam mendesain politik ekonomi berbagai bangsa dan Negara di dunia, termasuk Indonesia.

Jika digambarkan sistem ekonomi kapitalisme secara utuh, akan didapati bahwa ekonomi dalam pandangan mereka adalah sistem yang membahas tentang berbagai kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia beserta sarana prasarana pemenuhannya beserta alat-alat pemuasnya (*goods*). Ekonomi mereka sesungguhnya hanya membahas aspek material /kebendaan dari kehidupan manusia. Ekonomi Kapitalisme dibangun di atas tiga prinsip :⁴ *pertama*, problem kelangkaan (*scarcity*) *kedua*, Ukuran Nilai (*theory of value*), dan *Ketiga*, fungsi dan peran harga (*theory of price*)

Padangan di atas telah berimplikasi serius terhadap pembangunan ekonomi di hampir semua Negara di dunia, termasuk di Negara-negara muslim. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang tergambar dalam politik ekonomi tiap Negara, pada akhirnya memandang bahkan menyakini secara pasti bahwa problem ekonomi masyarakat hanya dapat diselesaikan dengan mendorong tingkat produksi sebesar-besarnya guna mencapai pertumbuhan nasional secara maksimal.

⁴.Taqiyuddin an-Nabhani, *Nitzamul iqtishody fi al-islam*, h.7

Kebijakan politik ekonomi Negara yang berorientasi penuh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan standarisasi PDB dan income perkapita, berangkat pada pandangan universal yang merupakan dotrin fundamental dalam ekonomi konvensional bahwa persoalan ekonomi lahir dari problem mendasar yang disebut dengan problem *scarcity* (kelangkaan) selanjutnya sebagai solusi melahirkan *theory of value* (teori tentang nilai) untuk menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi dan tidak perlu diproduksi dalam rangka penyelesaian problem *scarcity*, kemudian melahirkan *theory of price* (teori harga) sebagai mekanisme produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat.

Para ekonom konvensional memiliki pandangan bahwa manusia dan masyarakat senang tiasa memiliki kebutuhan, baik kebutuhan terhadap barang (*goods*) maupun jasa (*services*). Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap dua hal di atas itulah, akan muncul suatu problem yang selanjutnya akan dianggap sebagai problem paling mendasar dalam bidang ekonomi, yaitu terbatasnya sarana pemenuhan kebutuhan manusia yang disediakan oleh alam.

Para ekonom konvensional telah mengidentifikasi problem kelangkaan/ *scarcity*, sebagai problem utama dan paling mendasar yang harus dipecahkan oleh ilmu ekonomi, sehingga ilmu ekonomi dikembangkan dalam rangka menyelesaikan problem utama dan paling mendasar di atas. Bahkan mereka berpandangan bahwa seandainya kelangkaan/ *scarcity* itu tidak terdapat pada barang (*goods*) dan jasa (*services*) dalam arti semua barang-barang sama melimpahnya seperti udara maka ilmu ekonomi akan hilang dengan sendirinya

sebagai suatu pokok pikiran dari ilmuwan ekonomi. Oleh karena itu, *scarcity* dapat dianggap sebagai asal muasal dari masalah-masalah ekonomi⁵, walaupun kelangkaan juga bukan dipandang sebagai satu-satunya sebab yang mengharuskan manusia dan masyarakat berjuang untuk hidup.⁶

Pandangan terhadap problem kelangkaan /*problem scarcity*, selanjutnya dikuatkan dengan kenyataan bahwa kebutuhan manusia dan masyarakat terhadap barang (*goods*) dan jasa (*services*) tersebut, ternyata tidak terbatas. Artinya, ilmuwan ekonomi konvensional memandang bahwa kebutuhan manusia jika harus diungkapkan secara jujur, tidak akan pernah ada habisnya.

Itulah sebabnya, jika pandangan-pandangan terhadap problem ekonomi ini dirumuskan, akan menghasilkan dua rumusan utama yang terkait langsung dengan problem dasar ekonomi, yaitu : *pertama*, Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, *Kedua*, Sarana pemenuhannya terbatas.

Dari dua rumusan problem tersebut di atas, jika dispesifikkan lagi akan kembali pada satu kata, bahwa problem dasar dari ekonomi adalah *Scarcity* (kelangkaan).⁷

Berangkat dari Realitas yang telah diuraikan di atas, Hal yang menarik untuk dikaji sebagai objek penelitian adalah bagaimana perspektif yang dibangun ekonomi islam terhadap ketersediaan barang dan jasa sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan berdasarkan petunjuk dalil-dalil syara', dan bagaimana ukuran kesejahteraan dalam politik ekonomi islam, serta mampukan

⁵Dwi condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara* (Cet; I. Bantul : Irtikaz,2012),h. 164.

⁶ Robert L Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat ekonomi, terjm,Sultan Dianjung* (Ed.IV, cet.1, Ghalia Indonesia, 1982), h.201

⁷Dwi condro Trono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, h.165.

ekonomi islam menjawab persoalan ketimpangan yang semakin mengangah lebar antara si kaya dan si miskin akibat penerapan politik ekonomi kapitalisme?.

Harus diyakini, bahwa Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna memiliki konsep dan solusi terhadap apa yang telah diuraikan di atas berdasarkan dua hal : **Pertama**, sebagai *din* yang berasal dari Dzat Yang Maha Benar dan Maha Adil dan Bijaksana, Islam telah memberikan tatanan kehidupan yang benar dan adil untuk mengatur seluruh interaksi yang dijalankan manusia.⁸ Bahkan, Islam-lah satu-satunya *din*, baik dalam konteks agama maupun idiologi, yang benar dan sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu, Allah SWT Menegaskan dalam QS ar-Rum/30 :30

فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁹

Kedua, Islam adalah risalah paripurna, syariat Islam meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, maupun hubungan manusia dengan

⁸Dalam al-Quran, 6:115 disebutkan wa tammat kalimat rabbik sidq wa ‘adl. Terhadap ayat ini Ibn Katsir menjelaskan, “Benar dalam yang difirmankan dan di dalam apa yang diputuskan.” Lihat, Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr,2000),h.689-690.

⁹Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989)

sesamanya, semua diatur oleh syariat Islam.¹⁰ Allah SWT berfirman dalam QS an-Nahl/16 :89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Terjemahnya :Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.¹¹

Berdasarkan dua hal di atas maka syariat Islam hadir sebagai *problem solving* (Solusi) bagi seluruh problematika manusia, termasuk dalam meraih kesejahteraan dan penyelesaian problem kesenjangan di tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan problem kelangkaan, teori harga dan teori nilai dalam perspektif ekonomi kapitalisme ?
2. Bagaimana problem kelangkaan, teori nilai dan teori harga dalam perspektif ekonomi Islam?
3. Bagaimana kritik ekonomi Islam terhadap sistem ekonomi kapitalisme (*political economic capitalism*) ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

¹⁰ Muhammad Husayn Abdullah, *Dirasah fi al-Fikr al-Islam* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1990), h.11

¹¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989)

Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, agar dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif, utuh dan tepat sekaligus memperjelas makna Problem Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga dalam perspektif ekonomi Islam sebagai sebuah studi kritis terhadap politik ekonomi kapitalisme

Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Problem Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga dalam ekonomi Kapitalisme.
- b. Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga dalam perspektif ekonomi islam.
- c. Kritik ekonomi Islam terhadap sistem ekonomi kapitalisme/ *political economic capitalism*.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Judul penelitian ini adalah Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga dalam perspektif ekonomi islam (Studi kritis terhadap ekonomi politik kapitalisme)

Untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap judul penelitian ini maka diberikan definisi operasional sebagai penjelasan terhadap judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Kelangkaan/*Scarcity* adalah teori yang membahas tentang adanya faktor kelangkaan yang terjadi terhadap barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang menjadi pembahasan penting dalam ilmu ekonomi konvensional. Menurut Wikipedia,

“scarcity is the fundamental economic problem of having seemingly unlimited human needs and wants, in a world of limited resources”.¹²

Teori Nilai/*Theory of value* adalah sebuah pandangan yang secara spesifik akan menilai apakah suatu barang (*good*) dan jasa (*service*) memiliki nilai, baik *utility value* (nilai guna) atau *exchange value* (nilai tukar).

Menurut Adam Smith dan diikuti oleh para murid-muridnya seperti Alfrad Marshall yang melakukan penyempurnaan terhadap teori gurunya, *Utility value* adalah nilai suatu barang ataukah jasa yang dinisbatkan kepada individu tertentu dan *exchange value* adalah nilai suatu barang atau jasa yang dinisbatkan kepada barang dan jasa yang lain.¹³

Teori Harga/*Theory of price* adalah sebuah teori yang menjelaskan terbentuknya struktur harga (*structure of price*) dan peran yang dimainkan dalam produksi, konsumsi dan distribusi dan merupakan batu fondasi (*foundation stone*) dalam ekonomi konvensional.¹⁴

Kelangkaan/*scarcity*, teori nilai/*theory of value* dan teori harga/*theory of price* sebagai pilar-pilar kajian ekonomi konvensional.

Selanjutnya adalah istilah ekonomi Islam yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah Sistem ekonomi dan Ilmu ekonomi yang dipahami dari petunjuk-petunjuk yang bersumber dari *masdar al-hukmi fi al-Islam*.

¹²*Scarcity, The Free encyclopedia*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Scarcity> (19 Maret 2014).

¹³Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*. H.175

¹⁴Dr.Mahmud al-khalidi.*Hukm Al-Islam Fi Ra 'sumaliyyah*. Terj .Muhammad Wahiduddin, *Kerusakan dan Bahaya Sistem Ekonomi Kapitalisme* (Jakarta Selatan: Wahyu Press,2002), h. 37

Studi kritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah usaha serius peneliti untuk menjelaskan pengamatan dan melakukan analisis dialektik atas ekonomi politik kapitalisme dan penerapannya untuk mendorong terjadinya aksi nyata pada masyarakat untuk keluar dari kondisi yang tidak ideal yang melingkupi kehidupan mereka dan kembali hidup dengan sistem kehidupan yang lurus yang berasal dari Dzat yang Maha Sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam QS/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹⁵

Terakhir, politik ekonomi adalah kebijakan yang diadopsi oleh sebuah pemerintahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang bersumber dari sistem ekonomi tertentu.

D. Tinjauan Pustaka

Kritik terhadap teori Kelangkaan/*scarcity*, Teori nilai/*theory of value* dan teori harga/*theory of price* dapat ditemukan di dalam beberapa literatur, demikian pula dengan kebijakan-kebijakan politik ekonomi yang sekedar mengejar pertumbuhan pendapatan secara nasional untuk mengukur kemajuan ekonomi sebuah Negara dan tolok ukur kesejahteraan masyarakatnya.

¹⁵ Al-Qur'an dan *Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989)

Sebagai landasan teori yang dijadikan pijakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, baik bersumber dari buku-buku, penelitian ilmiah dan jurnal, baik berhubungan langsung dengan judul yang diangkat ataupun memiliki keterkaitan dan persamaan sudut pandang secara langsung ataupun tidak langsung, diantaranya :

Dalam buku Dr. Mahmud al Khalidi yang berjudul *Kerusakan dan bahaya sistem ekonomi kapitalisme* menjelaskan tentang kekeliruan ekonomi kapitalisme dalam memandang problem utama dalam ekonomi yaitu *scarcity* (kelangkaan) yang pada gilirannya kajian-kajian ekonomi selalu diarahkan dalam rangka usaha meningkatkan produksi setinggi-tingginya dan abai terhadap persoalan distribusi, sebab diyakini bahwa dengan tersedianya barang(*good*) dan jasa (*servis*) yang melimpah secara otomatis setiap individu dalam masyarakat dapat mengakses pemenuhan kebutuhannya.

Berbeda dengan ekonomi islam, kajian-kajian tentang mekanisme distribusi harta, baik barang maupun jasa adalah persoalan yang sangat diperhatikan, sebab persoalan utama ekonomi buka terletak pada produksi, tetapi mekanisme distribusi yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat.

Mekanisme distribusi dalam ekonomi islam dengan dua cara; pertama, Mekanisme pasar, dan kedua, mekanisme non pasar.¹⁶

Buku yang ditulis oleh Taqiyyuddin an Nabhani yang berjudul *Nizamul al Iqtishody fi al-islam* yang diterjemahkan dengan judul Sistem ekonomi Islam

¹⁶Dr.Mahmud al khalidi , *Hukm Al-Islam Fi Ra'sumaliyyah*. Terj .Muhammad Wahiduddin, *Kerusakan dan Bahaya Sistem Ekonomi Kapitalisme*, h. 37

menyebutkan, jika kita mencoba menampilkan sistem ekonomi dalam pandangan ideologi Kapitalisme, kita akan menemukan bahwa ekonomi dalam pandangan mereka adalah system yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat pemuasnya (*goods*). Ekonomi kapitalisme hanya membahas aspek material (kebendaan) dari kehidupan manusia.

Alat-alat pemuas itu mereka sebut dengan barang dan jasa. Barang esensinya adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang bisa diindera dan dirasakan. Jasa adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang bisa dirasakan namun tidak bisa diindera. Lalu apa yang menyebabkan barang dan jasa tersebut dapat menjadi pemuas? Menurut mereka, yang menyebabkannya adalah kegunaan (*utility*) yang ada pada barang dan jasa itu. Kegunaan (*utility*) itu bersifat personal, jika suatu barang memiliki kegunaan maka barang tersebut layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Hal tersebut dilihat dari segi bahwa kebutuhan menurut kacamata ekonomi mereka itu identik dengan keinginan. Dengan demikian, barang yang memiliki kegunaan menurut kacamata ekonomi kapitalisme, adalah segala sesuatu yang diinginkan, baik sesuatu yang bersifat primer atau non primer, baik sesuatu itu memberi kepuasan menurut sebagian orang sedangkan sebagian yang lain memandangnya sebagai sesuatu yang tidak berguna dan bahkan membahayakan. Artinya, sesuatu itu menurut kacamata ekonomi tetap dianggap memiliki nilai guna (*utility*) selama masih ada orang yang menginginkannya.¹⁷

Dwi Condro Triono Ph.D dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Islam Mazhab Hamfara menyebutkan, diantara kekeliruan ekonomi konvensional dalam

¹⁷Taqiuddin An-Nabhani, *Nizamul-Hukmi fil-Islam* (Cet.II ; Bairut-Libanon, 1990). h.5

membahas persoalan ekonomi adalah ketidakjelasan mereka terhadap batasan sistem ekonomi dan ilmu ekonomi, akibatnya persoalan yang seharusnya diselesaikan dengan pendekatan sistem ekonomi diselesaikan dengan pendekatan ilmu ekonomi. Kondisi tersebut telah ditrasfer keseluruh dunia, menjadi acuan dalam penyelesaian berbagai problem bidang ekonomi, termasuk menginspirasi bahkan mewarnai sebagian besar pembahasan-pembahasan dalam bidang ekonomi umat islam.

Para ahli ekonomi Islam berusaha untuk mengembalikan epistemologi sistem ekonomi kepada *islamic worldview*, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Melalui *worldview* ini, akan tergambar secara jelas falsafah, akidah, sistem nilai dan pandangannya terhadap individu dan masyarakat, terhadap harta dan fungsinya, persepsinya tentang agama dan dunia, kekayaan dan kemiskinan. Semua itu akan memengaruhi pandangan terhadap harta kekayaan dan cara memperolehnya, produktivitas, pendistribusian dan penyimpanannya. Itulah yang disebut sistem perekonomian¹⁸, yang dapat berbeda satu sama lain karena *worldview* yang berbeda semenjak awal. Selanjutnya *Islamic worldview* dalam tulisan-tulisan ekonomi Islam dapat dirasakan, sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap ilmu ekonomi konvensional yang ada.

Prof. Dr.H .M. Arfin Hamid, SH, MH dalam bukunya yang berjudul Hukum Ekonomi (Ekonomi Syariah) Di Indonesia menyebutkan bahwa dalam proses pembangunan mengisi alam kemerdekaan, hanya dua bidang yang boleh dikatakan tersentuh secara maksimal yaitu bidang hukum dan ekonomi. Adapun

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Malāmiḥu al-Mujtama' al-Muslim al-ladhī Nashūduḥ*, diterjemahkan dengan judul “*Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an & Sunnah*”.(Penerbit Citra Islami Press. 2005.). h.267

bidang yang lain seolah-olah juga mendapatkan perhatian, tetapi orientasinya tidak substansial, melainkan hanya diarahkan untuk mendukung bidang yang menjadi prioritas yakni bidang hukum dan ekonomi. Mencermati pola pembangunan yang demikian, tampak jelas bahwa yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan yang timpang dan tidak komprehensif serta merupakan sebuah strategi pembangunan yang tidak proporsional yang akan melahirkan ketidakseimbangan dan berdampak secara langsung dengan semakin terabaikannya kesempatan semakin untuk turut menikmati hasil-hasil pembangunan, istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan kondisi demikian adalah kesenjangan. Kesenjangan menjadi ciri utama kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi pembangunan yang timpang selama ini.¹⁹

Abdurrahman al-Maliki dalam bukunya yang berjudul *as-siyasah al-iqtishodiyah al-musthla* kemudian diterjemahkan dengan judul Politik Ekonomi Islam mengungkapkan mengenai perubahan taktik penjajahan (imperialisme), saat menjelang berakhirnya perang dunia II yang melibatkan Amerika Serikat dibagian barat dan Uni Soviet di bagian timur, muncul kesimpulan yang jelas pada orang-orang yang memahami percaturan politik internasional bahwa penjajahan dengan militer dan senjata harus dihapuskan.

Mengenai hal ini John Foster Dulles Menteri Luar Negeri AS berkata dalam bukunya “perang atau damai” di bawah judul ; “Evolusi Imperialisme Barat sebagai Tindakan alternatif atas Terjadinya Pemberontakan yang keras dan kejam” mengatakan : “Sesungguhnya kondisi penjajahan Barat itu selalu diamati

¹⁹Prof.DR. H.M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia* (Cet ; I, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia), h.7.

secara terus menerus oleh pimpinan Soviet, sebagai sebuah titik incaran. Dimana pada titik itu Soviet bisa melancarkan pukulan mematikan'. Kemudian dia menambahkan, pada saat menjelang berakhirnya perang dunia II, satu-satunya kondisi politik yang mendapatkan perhatian serius adalah kondisi Negara-negara jajahan. Kalau Negara Barat berusaha mempertahankan Negara jajahannya seperti cara yang sudah ada, pasti terjadi pemberontakan bersenjata, dan barat pasti kalah. Maka satu-satunya strategi yang mungkin berhasil adalah dengan cara damai dan memberikan kemerdekaan yang terhormat kepada 700 juta jiwa manusia yang berada dibawah kekuasaan penjajahan barat”.

Kemudian AS mengadopsi taktik baru untuk mengembangkan imperialismenya (neo imperialism) dan mulai menerapkannya serta mulai mengikat Negara-negara yang dimerdekakan dengan berbagai utang yang berkedok bantuan dan menyamarkan targetnya dengan kedok bantuan untuk Negara terbelakang dan sedang berkembang. AS sangat gelisah dan resah bila Negara yang diberinya kemerdekaan itu menolak mengambil utang, Maka AS membuat berbagai kesulitan dan keguncangan hingga ia tunduk dan dengan terpaksa mengambil utang kepada AS atau melalui lembaga-lembaga keuangan internasional yang dikuasainya, seperti IMF, Word Bank dan yang lainnya. Artinya AS mengikatnya dengan sarana utang seperti yang terjadi pada Indonesia. Ketika pertama kali Indonesia merdeka tahun 1945, Indonesia menolak untuk mengambil utang dari Amerika, sehingga hal tersebut mendorong AS untuk merencanakan berbagai bentuk pemberontakan yang menimbulkan kekacauan sampai Indonesia tunduk pada tahun 1958. Sejak saat itu Indonesia diikat oleh

Amerika dengan utang yang berkedok bantuan. Dan semua itu menyebabkan ketergantungan dan semakin kurangnya indefendensi dalam menetapkan kebijakan ekonomi Negara yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak, karena terus digiring untuk memenuhi syahwat imperealisme Negara-negara donor. Semua itu adalah jebakan dibawah slogan mengejar pertumbuhan pendapatan nasional setinggi-tingginya.²⁰

Adapun referensi dari penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan penelitian ini adalah :

Penelitian dengan judul “*Scarcity in Islamic economic Perspective* (Studi Kritis atas esai Populasi Thomas R. Malthus yang bersumber dari lumbung riset) mengungkapkan, dalam banyak literatur ekonomi modern, ekonomi dipahami sebagai suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang atau kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Pilihan harus dilakukan manusia pada saat mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pilihan itu memang harus dilakukan dikarenakan keterbatasannya sumber daya (*limited resources*) atau alat pemuas kebutuhan.

Mungkin pembahasan tentang kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*) merupakan pembahasan yang sangat klasik, hal ini terlihat dari beberapa literatur ekonomi dari karya beberapa tokoh ekonom baik Kapitalis, Sosialis maupun Islam. Pembahasan tentang *scarcity* merupakan pembahasan yang kelihatan sepele namun memiliki implikasi yang begitu besar pada aktivitas perekonomian. Ketiga sistem itu memandang *scarcity* secara berbeda. Walaupun

²⁰Abdurrahman al-Maliki, *As-Siyasatu al-iqtishadiyah al-Mutsala*. Terj. Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam*, h. 37.

dalam kenyataannya antara sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis memandang bahwa *scarcity of resources* adalah penyebab dari kurang maksimalnya pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas (*unlimited needs and wants*). Kapitalis dan Sosialis menempatkan kelangkaan/ *scarcity* sebagai problem utama perekonomian, sedang Islam menempatkannya sebagai problem cabang (*furu'*).

Surahman dalam tesis yang berjudul “*Privatisasi Sumber Daya Alam Indonesia dalam Perspektif Islam*” mengungkapkan bahwa penyerahan pengelolaan sumber daya alam Indonesia kepada swasta khususnya swasta asing dan penguasaan sumber daya alam strategis telah menyebabkan kerugian Negara yang sangat besar. Hal itu ditambah kerusakan alam dan ekosistem diakibatkan oleh eksploitasi yang hanya mengejar target profit semata. Dan hal tersebut terjadi atas restu pemerintah atas nama mengejar pertumbuhan nasional yang setinggi-tingginya.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan islam, Al-Hâfîzh Ibnu Hajar al-‘Asqalânî di dalam Kitab *Bulûghul Marâm* membawakan hadis sebagai berikut:

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلِّ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

Terjemahnya: Dari salah seorang Sahabat *radhiyallâhu ‘anhu*, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi *shallallâhu ‘alaihi wasallam*, lalu aku mendengar beliau bersabda: Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud. Tokoh-tokohnya terpercaya).

Endah Kartikasari, dalam tesis yang berjudul “Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang (Membedah APBN 2005-2010 VS APBN Khlafah) yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku mengkritisi politik anggaran yang menjadikan pajak dan utang luar negeri sebagai primadona pendapatan Negara sebagai tuntutan pencapaian pendapatan nasional setinggi-tingginya. Kebijakan tersebut berimplikasi tergadaikannya Kekayaan Negara berupa penguasaan dominan terhadap aset-aset potensial Negara dalam bentuk migas, tambang emas, batubara, hutan hasil laut dan seterusnya dijarah oleh para komprador asing atas izin pemerintah atas nama investasi dan efisiensi. Pemerintah Indonesia berpuas diri mendapatkan pajak dan bagi hasil yang jumlahnya tidak seberapa.

Akibatnya, Negara yang didirikan demi menjamin kelangsungan hidup rakyatnya, nyatanya tidak bisa berbuat demi kesejahteraan masyarakatnya. Rakyat yang seharusnya menikmati kehidupan yang baik, makmur dan sejahtera, terpaksa harus hidup menderita di negeri sendiri. Rakyat harus membayar pajak yang memberatkan, sementara subsidi yang seharusnya mereka nikmati terus dikurangi bahkan dicabut. Bahkan rakyat Indonesia juga harus membayar utang Negara yang semakin tahun terus bertambah jumlahnya.²¹

E. Kerangka Konseptual

Sebagai landasan atau pedoman berpikir dalam melakukan penelitian ini diperlukan adanya penentuan sudut mana dari masalah yang dianggap penting untuk diteliti dan kemudian digambarkan menjadi kerangka pikir sehingga memudahkan proses penelitian. Kerangka pikir adalah model konseptual tentang

²¹Endanh Kartikasari, ST, MEI, *Membangun Indonesia Tanpa utang : Membedah APBN 2005-2010 vs APBN Khilafah* (Bogor: Al Azhar Press , 2010), h.26-38.

bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang dianggap urgen.²² Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut:

SKEMA KERANGKA PIKIR (Gambar 1)



²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 91.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literature majalah dan koran, jurnal ilmiah, website internet yang sumbernya dapat dipertanggung jawabkan untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Sekaligus menelusuri dan membaca literatur dalam bidang ekonomi islam dan ekonomi konvensional untuk ditelaah agar dapat digunakan sebagai acuan memahami fakta guna membangun perspektif islam yang bertumpuh pada telaah kritis terhadap objek yang sedang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Irawan (2006) peneliti kualitatif berfikir secara induktif (*grounded*). Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenarannya (berfikir deduktif), melainkan bergerak dari bawah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu, dan dari data itu dicari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Karena itu, walaupun ada hipotesis dalam penelitian kualitatif, hipotesis tersebut tidak diuji untuk diterima atau ditolak.

Menurut Dwi Condro, dalam melakukan penelitian terhadap ekonomi islam dapat digunakan pendekatan kualitatif dengan berfikir secara induktif dan kuantitatif dengan berpikir secara deduktif. Berpikir induktif dapat ditempuh dengan tiga langkah ²³:

²³Dwi Condro Triono ,Pd.D, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, h.299.

1. Memahami fakta (*fahmul waqi*’).
2. Memahami nash/dalil (*fahmun nushus*)
3. Penarikan hukum (*istinbathul ahkam*).

Adapun berfikir secara deduktif adalah kebalikan dari berfikir induktif juga ditempuh dengan tiga langkah :

1. Memahami seruan dan indikasi (*fahmul khithob wal qorinah*)
2. Memahami nash (*fahmun nushus*)
3. Penetapan hukum (*min ahkamil khamzah*).

Kesimpulannya berfikir induktif dimulai dari fakta problem kontemporer, selanjutnya berfikir secara induktif dan terakhir penarikan hukum syara’, sebaliknya berfikir deduktif dimulai dengan memahami khithab as’syari’, selanjutnya berfikir secara deduktif dan terakhir penetapan hukum syara’.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif dengan berfikir secara induktif, karena sejalan dengan pendekatan ilmu fiqhi yakni suatu pendekatan dalam memahami sebuah fakta atau perbuatan yang disertai dengan penguraian dalil-dalil secara terperinci, Sebab penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai objek penelitian yaitu Kelangkaan/*scarcity*, teori nilai/*theory of value*, teori harga/*theory of price* dan politik ekonomi kapitalisme yang berorientasi pada pertumbuhan pendapatan nasional dalam perspektif islam.

2. Sumber Data Penelitian

Mengingat penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, maka sumber penelitian berasal dari berbagai literatur yang sesuai dengan objek

penelitian. Sumber data tersebut dicari dengan melakukan penelusuran ke pustakaan dan dokumentasi, seperti buku/ kitab, jurnal penelitian, majalah dan surat kabar. Kemudian, mengingat perkembangan teknologi, penelitian ini juga banyak memperoleh data melalui fasilitas internet, dengan tetap memperhatikan sumber data yang diambil. Oleh karena itu jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun pertimbangan utama dalam pemilihan sumber-sumber data pada penelitian ini adalah kesesuaian dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data penelitian yang telah disebutkan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan penelusuran literatur. Semua data-data atau bahan-bahan yang berasal dari dokumentasi yang berkaitan dengan judul yang diangkat baik berupa buku-buku, jurnal penelitian, makalah, artikel surat kabar, maupun materi undang-undang dan kebijakan dalam politik ekonomi Indonesia yang diimplementasikan dikumpulkan dan dianalisis.

4. Teknik Analisis Data

Meskipun penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, namun pada dasarnya ada dua tahapan penting dalam metode ini yang harus dilakukan. Yaitu deskripsi dan analisis secara kritis²⁴. Usaha-usaha deskripsi dalam penelitian deskriptif diartikan sebagai usaha menjelaskan atau penemuan fakta-

²⁴Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian. Suatu pemikiran dan Penerapan* (Jakarta ; Rieka Cipta, 1999), h. 23.

fakta seadanya (*fact finding*). Sedangkan analisa merupakan tahapan penafsiran yang akurat terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Dengan kata lain, metode penelitian diskriptif ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan menyusun data (deskripsi), tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi tentang arti data itu.

Konsep mengenai deskripsi telah dikemukakan diatas sebagai suatu konsep utuh dari penelitian deskriptif. Selanjutnya upaya analisis ini diwujudkan juga sebagai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dengan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain.

Lebih jauh secara teknis operasional, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui empat tahap, sebagaimana diungkapkan oleh Winarno Surakhmad. Keempat tahap meliputi; pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data, dan penyimpulan data.

Pertama, pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan dokumentasi. Pengumpulan data ini disertai dengan pemilihan, *rechecking*, dan reduksi data yang relevan. Kemudian dilakukan klasifikasi untuk menentukan mana data yang sesuai dengan penelitian ini dan mana yang tidak. Data yang sesuai diambil dan data yang tak sesuai dikesampingkan. Data-data yang sesuai itu adalah data-data yang berhubungan dengan topik penelitian. Oleh karena itu akan menjadi sebuah pilihan tepat dan logis kalau data yang akan diperoleh dalam penelitian ini diambil melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Untuk memperoleh data tersebut

dilakukan langkah-langkah penelusuran terhadap sejumlah hasil-hasil penerbitan yang telah dipublikasikan.

Kedua, agar validitas dan obyektifitas data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penilaian atas sejumlah data dilakukan melalui tahap tahap sebagai berikut;

1. Pemahaman data sehingga diperoleh data yang relevan dengan penelitian.
2. Memberikan kritik atas data sekunder melalui teknik otokritik sekaligus lewat kritik orang lain. Sehingga data yang berbeda dapat terkontrol.
3. Pengkategorian dan kontrol atas data yang dilaksanakan dengan sistem pencatatan yang relevan dengan merujuk pada rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan.

Ketiga, interpretasi data atau pengolahan data. Tahap ini dimaksudkan untuk memberikan penafsiran lebih jauh terhadap data yang telah tersedia dengan cara menarik hubungan dengan yang telah dirumuskan. Data tersebut coba dipahami dalam kerangka analisis dan pendekatan teori yang telah disusun sebelumnya untuk selanjutnya dicari pemaknaan terhadap keseluruhan masalah. Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penafsiran dan pemaknaan terhadap data tersebut tentu akan dilakukan secara kualitatif pula.

Keempat, penarikan kesimpulan. Setelah data dinilai dan ditafsirkan sesuai dengan kerangka analisis dan teori yang ada. Kerangka pikir yang menyangkut beberapa faktor yang mempunyai kecendrungan sama maupun berbeda antara ilmu ekonomi moderen dan islam digunakan oleh penulis untuk melakukan penyimpulan dalam penulisan ini, yaitu apa perbedaan dan kesamaan antara kedua

vareabel. Disini prose reduksi data dilakukan dengan cara menafsirkan data hasil dari interpretasi di langkah sebelumnya. Penafsiran data ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian.

Untuk mempermudah kesimpulan akhir, dilakukan analisis pembuatan simpulan simpulan awal pada setiap persoalan berdasarkan kerangka pemikiran atau batasan masalah yang telah dibuat. Dengan demikian kesimpulan penelitian ini adalah hasil interpretasi peneliti yang dilakukan berdasarkan kaidah metode penelitian kualitatif dengan cara berpikir induktif.

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Mengungkap fakta dan implementasi *problem Scarcity, theory of value dan theory of price* serta hubungannya dengan politik ekonomi Negara serta kebijakan-kebijakan untuk fokus mengejar pertumbuhan nasional.
- b. Melakukan kritik atas implentasi problem kelangkaan (*scarcity*), teori nilai (*theory of value*) dan teori harga (*theory of price*) serta politik ekonomi Negara yang fokus pada target pertumbuhan pendapatan nasional dalam perspektif islam.
- c. Menunjukkan secara terang perbedaan dan perspektif poitik ekonomi islam terhadap politik ekonomi kapitalisme.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk kajian-kajian berikutnya dalam bentuk :

- a. Kegunaan Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian kearah pengembangan ilmu ekonomi islam dan sistem ekonomi islam yang orisinil.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Memperluas wawasan dan kajian serta sebagai stimulus pengembangan aplikasi dalam bidang ekonomi islam.
 2. Memberikan sudut pandang baru bagi penentu kebijakan, terutama dalam kebijakan politik ekonomi yang selama ini fokus pada peningkatan produksi dalam mengejar pertumbuhan nasional semata dan abai terhadap distribusi produksi dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat individu per-individu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA DALAM EKONOMI KAPITALISME

A. Profil Ekonomi Kapitalisme

Dewasa ini, idiologi yang eksis dan diterapkan secara praktis di hampir seluruh Negara di dunia adalah idiologi kapitalisme. Bahkan setelah runtuhnya Uni Soviet, Negara-negara yang awalnya menerapkan idiologi sosialisme-kumunismen pun berbondong-bondong memeluk kapitalisme, sebagaimana yang terjadi terhadap Rusia, dan Negara-negara bekas pecahan Uni soviet. Bahkan negeri-negeri muslim yang terdiri dari lima puluh empat Negara, secara praktis mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Sebagai sebuah idiologi, kapitalisme tentu tegak diatas sebuah pemikiran yang konprehensif tentang alam semesta, manusia dan kehidupan yang menjadi aqidahnya. Di atas akidah itulah dibangun seluruh pemikiran cabang dan sistem kehidupan yang merupakan jalan untuk mencapai solusi terbaik terhadap berbagai problema kehidupan manusia.¹

Secara praktis setiap Negara yang menerapkan ekonomi kapitalisme dipaksa untuk tunduk terhadap aqidah dan pemikiran serta sistem kehidupan yang dipancarkannya. Maka untuk mengetahui hakikat ekonomi kapitalisme, kita harus membahasnya dimulai dari hal yang mendasar tersebut. Sebab dari sanalah bangunan sistem ekonomi kapitalisme itu bersumber. Pemahaman terhadap aqidah, pemikiran dan sistem yang terpancar dari padanya akan mengantarkan kita untuk memahami konstruksi idiologi dan sistem ini secara utuh.

¹ Dr..Mahmud Al Khalidi, *Kerusakan dan bahaya sistem ekonomi kapitalisme*, h.2-3

1. Akidah Yang Melahirkan Ekonomi Kapitalisme

Akidah adalah pandangan yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan serta hubungan ketiganya dengan proses sebelum dan setelah kehidupan.² Maka kapitalisme jelas merupakan sebuah idiologi yang bersumber dari sebuah aqidah. Karena kapitalisme meyakini secara mutlak pemisahan agama dari kehidupan. Agama tidak boleh mencampuri urusan kehidupan dunia, urusan politik, budaya, ekonomi dan apapun yang terkait dengan urusan dunia harus steril dari agama. Karena, apa yang menjadi hak Kaisar harus diserahkan kepada Kaisar, dan apa yang menjadi hak tuhan harus diserahkan pada tuhan.

Sekularisme, atau paham pemisahan agama dari kehidupan adalah akidah yang melahirkan idiologi kapitalisme. Dari sana kemudian lahir sebuah pandangan, bahwa tuhan tidak boleh dilibatkan untuk mengatur kehidupan manusia, inilah akidah sekaligus kaidah berpikir kapitalisme. Berdasarkan kaidah berpikir tersebut, mereka meyakini bahwa manusialah yang berhak untuk membuat aturan untuk hidupnya sendiri. Dengan logika ini pula, akidah kapitalisme telah memberikan kebebasan penuh kepada manusia, untuk berpendapat, berkeyakinan, berbuat dan memiliki. Dari konsep kebebasan berkepemilikan inilah yang melahirkan sistem ekonomi kapitalisme. Karena itu, sebutan “kapitalisme” sesungguhnya merepresentasikan bagian yang paling

² Hafidz Abdurrahman MA, *Diskursus islam politik dan spiritual*, h 21

menonjol dari aqidah sekuler ini, sehingga sangat tepat bila idiologi-nya disebut dengan “Kapitalisme”.³

Sejarah kelahiran idiologi kapitalisme dimulai dari sepak terjang para kaisar dan raja di Rusia dan Eropa yang menjadikan agama sebagai alat untuk mengeksploitasi, menzalimi dan menumpahkan darah rakyatnya. Mereka menggunakan tangan-tangan para agamawan dan rohaniawan untuk menjustifikasi tindakan mereka. Dari kondisi inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik, antara para agamawan dan rohaniawan disatu pihak, dan para filosof dan pemikir dipihak yang lain. Pada saat itu dipihak filosof dan pemikir muncul dua sikap; ada yang ekstrim, mereka menolak agama secara total dan ada yang moderat, mereka masih bisa menerima keberadaan agama, tetapi mereka menyuarakan pemisahan agama dari kehidupan. Proses dialektika intelektual itu kemudian bermuara pada lahirnya satu konsep, yaitu pemisahan agama dari kehidupan yang kemudian hari disebut dengan istilah Sekularisme.⁴

Sebagai sebuah aqidah dan idiologi, sekularisme telah dianut dan diimplementasikan oleh masyarakat Barat. Sekularisme inilah yang menjadi kaidah berpikir yang melahirkan semua pandangan, sikap dan pranata sistem kehidupan mereka. Hal yang sama mereka emban keseluruh dunia, dan mereka paksakan untuk diterapkan kesemua Negara, khususnya Negara-negara jajahan mereka. Pada dasarnya, Akidah ini mengakui agama, dan mengakui bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan memiliki pencipta, juga mengakui adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Tetapi semua itu tidak ada hubungannya dengan

³ Al imam Muhammad Baqir shadr, *iqtisaduna*, h.21

⁴ DR. Mahmud Al khalidi, h.51

kehidupan. Sebab mereka memahami agama hanya sebatas masalah pribadi yang bersifat personal antara individu dengan tuhan. Maka wajar bila kebebasan berkeyakinan sangat mereka agung-agungkan, sebagaimana kebebasan berpendapat, bertindak laku dan termasuk juga kebebasan dalam pemilikan, pengembangan pemilikan dan distribusi pemilikan.

2. Sistem Ekonomi Kapitalisme/ Ekonomi Politik Kapitalisme.

Apabila kita mencoba untuk menampilkan ekonomi dalam pandangan kapitalisme, akan ditemukan bahwa ekonomi dalam pandangan mereka adalah sistem yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat pemuasnya (*good*). Sehingga konsep ekonomi kapitalisme hanya membahas aspek materi (kebendaan) dari kehidupan manusia.

Dr Isa Abdullah⁵, telah menguraikan lima definisi sistem ekonomi kapitalisme yang dirangkum dari berbagai sumber : *pertama*, sistem kapitalisme adalah sistem yang berjalan sesuai dengan produksi dan bergantung secara mendasar pada kemajuan metodologis dan teknis sebagaimana bergantung pada ketersediaan bekal yang berupa capital (modal) serta kemampuan pengembangan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Definisi *kedua*, Konsepsi yang secara mendasar berisi ada dan tidaknya planning khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam kadar kebebasan yang representative atau dengan kata lain adalah sistem ekonomi liberal. Definisi *ketiga*, akumulasi dari identitas yang spesifik bagi peradaban materialism yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, dengan menikmati kebebasan

⁵.Dr Isa Abduh, *al-iqtishod al-islam, madkhal wa manhaj*, h.226-229

bertindak sebebas-bebasnya dan hanya tunduk kepada akal saja. Defenisi *keempat*, sistem kapitalisme adalah pengaturan yang pada dasarnya dibangun berdasarkan perolehan pasar dan melestarikannya antara sentra-sentra produksi dan daerah-daerah konsumsi. Defenisi yang *kelima*, kapitalisme adalah satu tahapan yang mencirikan dengan berbagai mekanismenpemilikan berbagai sarana produksi di dalamnya sesuai dengan interaksi-interaksi sosial yang lahir antara individu untuk memasukkan mereka dalam aktivitas produksi. Defenisi yang kelima dikutip oleh Dr. Isa Abduh dari Karl Marx.

Dr.Mahmud al-khalidi menilai bahwa kelima defenisi diatas belumah memenuhi kategori defenisi yang komprehensif (*Jami*) dan eliminatif (*mani'*), dalam artian belum memberikan gambaran yang tepat mengenai ekonomi kapitalisme yang menguasai dan eksis disebagian besar Negara-negara di dunia pada saat ini. Pada faktanya sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem sekuler yang memusatkan pengkajian pada alat pemuas kebutuhan manusia dari aspek materi murni, dimana dalam seluruh kajiannya berpedoman pada kaidah pemisahan agama dari kehidupan secara mutlak.⁶

Ekonomi kapitalisme lahir dari pandangan para ekonom konvensional yang memiliki pandangan bahwa manusia dan masyarakat secara keseluruhan senangtiasa memiliki kebutuhan, baik kebutuhan itu berupa barang (*goods*) maupun jasa (*services*). Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia akan muncul suatu problem yang selanjutnya dianggap sebagai problem utama dan paling mendasar, yaitu terbatasnya sarana pemenuhan kebutuhan manusia

⁶.Dr Mahmud al-khalidi, h.51

yang disediakan oleh alam. Oleh karena itu kelangkaan/*scarcity* dapat dianggap sebagai asal muasal dari permasalahan ekonomi, walaupun kelangkaan bukan dipandang sebagai satu-satunya sebab yang mengharuskan manusia berjuang untuk hidup.⁷

Dalam kenyataannya, kelangkaan bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga manusia. Dengan demikian, berarti ekonomi tidak hanya bersangkut-paut dengan alam sekelilingnya, tetapi juga terkait dengan selera manusia dan kesanggupannya dalam produksi. Oleh karena itu analisis yang sistematis dalam perkembangan ilmu ekonomi akan dimulai dengan mengadakan pembangian atas fungsi-fungsi organisasi masyarakat dalam membina keharmonisan sosial. Sehingga akan segera terlihat bahwa persoalan ini pada dasarnya akan meliputi pemecahan dari dua tugas yang berdiri sendiri tetapi saling berkaitan, yaitu :⁸ *Pertama*, suatu masyarakat harus mengadakan satu sistem bagaimana memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, Masyarakat yang mengatur bagaimana hasil produksi dibagi sedemikian rupa sehingga lebih banyak lagi yang dihasilkan.

Namun, dalam perkembangannya dua rumusan di atas dijabarkan dalam tiga problem pokok, yang kemudian dikenal dengan sebutan: *the three fundamental and interdependent economic problem* (tiga problem dasar ekonomi yang saling berkaitan). Secara lebih sederhana dapat di rumuskan dengan menggunakan tiga kalimat Tanya, *what, How, For Whom*. Rumusan tersebut

⁷.Robert L Heilbroner, *Terbentuknya masyarakat ekonomi*, h.82

⁸.Robert.L Hailbroner, h.84.

kemudian dirinci sebagai berikut :⁹ *What commodities shall be produced and in what quantities?* (Apa komoditi yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya?), *how shall goods be produced?* (bagaimana komoditas tersebut harus diproduksi?), *for whom shall goods be produced?* (untuk siapa komoditas tersebut diproduksi?).

Berangkat dari rumusan di atas ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang senang tiasa dianggap penting dan menjadi sentral pembahasan ekonomi. Hal tersebut adalah upaya untuk selalu melakukan peningkatan produksi barang dan jasa, agar kebutuhan manusia yang tidak terbatas senangtiasa terpuaskan. Inilah yang digunakan untuk menjawab masalah apa (*what*). Selanjutnya upaya untuk selalu membuat pilihan (*choices*) dari berbagai sumber daya yang tersedia dan bersifat terbatas, dengan ini mereka menjawab masalah bagaimana (*how*), dan untuk menjawab masalah untuk siapa (*for whom*) adalah dengan upaya melakukan pendistribusian berbagai barang dan jasa yang telah diproduksi kepada berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Pandangan tentang proses produksi, pilihan konsumsi dan mekanisme distribusi dalam ekonomi kapitalisme yang telah di uraikan di atas, tidak lepas dari pengaruh pemikiran Adam Smith yang tertuang dalam buku yang berjudul "*The Wealth of Nations*" ditulisnya pada tahun 1776 yang memberikan kritik terhadap paham ekonomi merkantilisme yang berkembang di Eropa pada waktu itu¹⁰ yang memandang manusia sebagai makhluk serakah, rakus, dan egois sehingga harus dikendalikan oleh institusi Negara. Menurut Adam Smith, sifat, serakah, rakus dan egois dari manusia itu tidaklah negatif, tidak jelek dan tidak

⁹ Samuelson & Nordhaus, *Makro ekonomi*, h.121

¹⁰Paul Heinz Koesters, *Tokoh-tokoh ekonomi mengubah dunia, pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi hidup kita*, h.132

jahat, tetapi sebaliknya justru positif. Oleh karena itu Negara tidak boleh mengekan dan mengendalikannya, melainkan harus memberikan kebebasan. Jika dibiarkan bebas, maka sifat tersebut justru akan berdampak positif pada sektor ekonomi karena akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Sebab menurut Adam Smith, prinsip perbuatan manusia tunduk pada kepentingan dirinya (*self interest*), bukan wujud kasih sayang pada orang lain ataupun untuk kepentingan kemanusiaan, katanya "*it is not the benevolence of the butcher that we expect our dinner, but from his regard to his own interest*" (bukan dari kebaikan tukang daging kita mengharapkan makan malam kita, melainkan dari kepentingan tukang daging itu sendiri).

Sifat egois manusia tidak akan membawa pada kondisi yang negatif, selama terwujud persaingan secara bebas, sebab penjual tidak akan menetapkan harga tinggi dengan keserakahannya, sebab mekanisme harga dipasar dengan persaingan bebas akan mengendalikan keserakahan manusia itu untuk tidak semenah-mena menetapkan keuntungan. Mengapa keserakahan manusia akan dapat dikendalikan dengan sendirinya, disinilah peran *the invisible hands* yang akan membawa perekonomian pada arah keseimbangan.

Sehingga menurut Adam Smith, Negara atau pemerintah tidak perlu campur tangan untuk mengatur perekonomian, sebab hal itu justru akan mendistorsi pasar dengan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Penjelasan inilah yang menjadi alasan yang menyebut ekonomi kapitalisme dengan istilah sistem ekonomi liberal.

Selain pandangan tentang fungsi dan peran Negara yang harus dihapus dalam mengatur ekonomi, masih terdapat beberapa hal yang penting dari pemikiran-pemikiran Adam Smith yang mempengaruhi perkembangan ekonomi kapitalisme. Pandangan tentang nilai barang, atau yang lebih dikenal dengan teori nilai (*theory of value*) juga menjadi pemikiran yang menjadi penentu perkembangan ekonomi kapitalisme hari ini, walaupun dalam perjalanannya teori nilai yang dikembangkannya mendapatkan penyempurnaan oleh murid-muridnya, seperti Alfred Marshall.

Pandangan Adam Smith terhadap Negara kesejahteraan, menurutnya, dengan adanya dorongan "keserakahan", setiap manusia akan berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan itu dapat diperoleh dengan mengambil laba sebesar-besarnya, dan dorongan keserakahan manusia itu tidak akan menimbulkan bahaya bagi ekonomi sepanjang berlaku mekanisme persaingan bebas dipasar. Sebab, seorang pedagang tidak akan menentukan harga di atas harga pasar.

Oleh karena itu, jika dorongan "keserakahan" manusia diberi peluang secara bebas, maka manusia akan termotivasi untuk meningkatkan produksinya, agar dia mendapatkan keuntungan yang besar dan terus meningkat dari waktu-kewaktu. Dari sinilah Adam Smith berpandangan tentang konsep akumulasi capital sebagai bagian penting dalam proses peningkatan produksi dan produktivitas. Sebab Proses peningkatan produksi sangat dipengaruhi oleh nilai investasi dan nilai investasi akan senang tiasa berhubungan erat dengan kapital (modal), karena besarnya keuntungan dan hak seseorang untuk menikmati hasil-

hasil dari proses produksi sangat ditentukan oleh nilai investasi dan keikutsertaannya dalam proses produksi. Jika setiap orang atau perusahaan melakukan hal yang sama, maka produktivitas (*output*) secara nasional juga akan meningkat. Meningkatnya produktivitas secara nasional, secara pasti akan menyebabkan naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat di Negara itu.

Bertolak dari pandangan akan pentingnya akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi seperti yang telah dijelaskan di atas, sistem ekonomi ini dikenal dengan sebutan sistem ekonomi kapitalisme, selain itu juga dikenal dengan sistem ekonomi liberal, karena memberikan keleluasaan dan kebebasan yang besar bagi individu untuk bertindak dalam ekonomi tanpa perlua peran serta dan keterlibatan Negara.

Berkaitan dengan itu, Zimbalist¹¹ telah memberikan definisi tentang sistem ekonomi kapitalisme murni (*pure capitalism*) secara garis besar sebagai berikut :

A System wherein all of the means of production (physical capital) are privately owned and run by the capitalist class for a profit, while most other people are workers who work for salary or wage.

Zimbalist menguraikan bahwa sistem ekonomi kapitalisme intinya terletak pada penguasaan seluruh proses produksi secara individu oleh orang yang menginvestasikan modalnya (yang digunakan dalam proses dan fasilitas produksi), yang kemudian disebut sebagai kapitalis dan dijalankan oleh kaum kapitalis itu sendiri untuk suatu keuntungan, sementara sebagian besar orang-

¹¹ Andrew Zimbalist, DKK, *Comparing Economics Systems A Political-Economic Approach*, h.111

orang adalah pekerja yang bekerja untuk menghasilkan upah (mereka tidak ikut memiliki modal ataupun produk yang dihasilkan).

Setiap barang yang diproduksi oleh pekerja dimiliki oleh para kapitalis, barang tersebut dijual dipasar. Pasar adalah tempat barang dan jasa saling bertukar atau keduanya bertukar dengan uang dan masing-masing orang atau perusahaan berkompetisi untuk mendapatkan uang dari konsumen dengan menggunakan selisih harga atau dengan iklan. Hasilnya adalah berupa harga, dan harga ditentukan oleh kondisi penawaran (*supply*) dan Permintaan (*demand*).¹²

Pandangan yang lebih spesifik tentang ekonomi kapitalisme di uraikan oleh Ebenstein & Fogelman¹³ dengan memberikan empat ciri yang menjadi pilar utama ekonomi kapitalisme : *pertama*, pemilikan perorangan (*individual ownership*). *Kedua*, perekonomian pasar (*market economic*). *Ketiga*, persaingan (*competition*), dan *Keempat*, keuntungan (*profit*).

3. Pilar –Pilar Ekonomi Politik Kapitalisme

Telah diuraikan, bahwa pembahasan seputar *What commodities shall be produced and in what quantities?* (Apa komoditi yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya?), *how shall goods be produced?* (bagaimana komoditas tersebut harus diproduksi?), *for whom shall goods be produced?* (untuk siapa komoditas tersebut diproduksi?) adalah merupakan problem ekonomi yang penting dan harus mendapatkan pemecahan, oleh karena itu ilmu ekonomi dewasa ini dikembangkan dalam rangka menjawab tiga pertanyaan di atas.

¹² Andrew Zimbalist, DKK, *Comparing Economics Systems A Political-Economic Approach*

¹³ Wilian Ebenstein & Edwin Fogelman, *Isme-isme dewasa ini*, h.89

Hal tersebut dapat dipahami karena alasan utama dari lahirnya sebuah ilmu dalam suatu bidang, ditujukan dalam rangka menyelesaikan problem yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Termasuk ilmu ekonomi.

Para ekonom konvensional telah mengemukakan, bahwa problem ekonomi pertama-tama lahir bersumber dari kenyataan akan adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, diperhadapkan pada keterbatasan alat-alat pemuas barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang terbatas. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa, seandainya semua barang dan jasa yang menjadi alat pemuas kebutuhan manusia disediakan oleh alam secara melimpah seperti udara, maka pembahasan dalam bidang ekonomi tidak lagi menjadi hal yang penting dilakukan dalam kehidupan manusia.¹⁴

Jadi sumber utama atau problem paling mendasar dalam bidang ekonomi dalam pandangan ekonom kapitalisme lahir karena adanya faktor kelangkaan (*scarcity*).

Setiap problem yang dihadapi manusia dalam kehidupan memiliki sifat bertingkat-tingkat. Ada problem yang sifatnya sangat mendasar, ada juga problem yang sifatnya hanya ditingkat cabang, di tingkat ranting dan seterusnya. Jika dilukiskan, bisa diibaratkan dengan sebatang pohon yang lengkap, dimulai dari bagian yang paling mendasar yaitu akar, kemudian batang, cabang, ranting, daun, buah dan seterusnya. Demikianlah ilmu ekonomi kapitalisme, terus berkembang dalam rangka menyelesaikan berbagai problem dalam bidang ekonomi yang dihadapi oleh manusia.

¹⁴ Paul A Samuelson & William D Nordhaus, *Mikroekonomi*, h. 7

Jika dikaji dan diteliti secara cermat sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya, tampak jelas bahwa para ekonom konvensional menganggap problem dasar, atau akar masalah dalam bidang ekonomi adalah kelangkaan, hal itulah yang dijawab dengan pertanyaan "*What?*". Selanjutnya asumsi tentang nilai atau yang lebih dikenal dengan teori nilai (*theory of value*) adalah jawaban terhadap problem cabang yang disebut dengan istilah "choice" dan pandangan tentang peran harga atau yang lebih dikenal dengan teori harga (*theory of price*), sebagai jawaban terhadap problem cabang yang lain yaitu "for whom".

Sehingga, pertanyaan *what, how and for whom* adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh ilmu ekonomi kapitalisme, sedangkan kelangkaan (*scarcity*), teori nilai (*theory of value*) dan teori harga (*theory of price*) adalah tiga pilar yang menjadi pusat kajian dan kebijakan yang menjadi kajian utama dalam sistem ekonomi kapitalisme atau dikenal juga dengan istilah politik ekonomi kapitalisme (*political economic*), dimana istilah *political economic* merujuk pertama kali kepada David Ricardo, yang menggunakan istilah tersebut untuk menyebutkan sistem ekonomi kapitalisme.¹⁵

B. Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga dalam Perspektif Ekonomi Politik Kapitalisme

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dalam pembahasan pada bab ini, politik ekonomi kapitalisme (*political economic capitalism*) adalah sistem ekonomi yang tegak di atas tiga pandangan, yaitu :

¹⁵ Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/DDavid_Ricardo (diakses 15september 2014)

kelangkaan (*scarcity*), teori nilai (*theory of value*) dan teori harga (*theory of price*) ketiga kajian inilah yang menjadi pilar-pilar sistem ekonomi kapitalisme.

Kelangkaan sebagai problem utama bidang ekonom, teori tentang nilai yang berlaku atas barang dan jasa, serta teori harga yang menjelaskan tentang berbagai peran harga dalam produksi, konsumsi dan distribusi.¹⁶

1. Kelangkaan (*scarcity*)

Kelangkaan berasal dari kata langka yang semakna dengan jarang, nadir, sulit, sedikit atau garib. Selanjutnya penambahan awalan 'ke' dan akhiran 'an', menjadi kelangkaan yang semakna dengan kekurangan, kesulitan, kesusahan dan kesukaran¹⁷

Adapun problem kelangkaan dalam pembahasan ekonomi adalah Sebuah pandangan yang meyakini bahwa asal muasal penciptaan sarana prasarana kehidupan adalah langkah/kurang. Hal diatas dipertegas oleh pandangan yang menyatakan bahwa ; pertama, kubutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Kedua, disisi lain saranan pemenuhannya bersifat terbatas¹⁸.

Sehingga, satu-satunya solusi yang harus di jalankan untuk menyelesaikan problem utama ekonomi manusia adalah melakukan aktivitas produksi barang (*goods*) dan jasa (*services*) sebanyak-banyaknya sampai pada tingkat setinggi-tingginya agar kebutuhan manusia terhadap alat-alat pemuasnya dapat dipenuhi.

Problem kelangkaan relatif (*scarcity*) adalah ide yang menyatakan bahwa hukum asal dari pemenuhan kebutuhan manusia akan mengalami persoalan, disebabkan karena terjadinya kelangkaan secara pasti pada barang dan jasa (*good*

¹⁶ Taqiyuddin An nabhani, *Sistem ekonomi Islam*, h.5.

¹⁷ <http://artikata.com/arti-369796-kelangkaan.html>

¹⁸ Sugiarto DKK, *Ekonomi mikro, sebuah kajian komprehensif*, h.5

and service) yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Dengan kata lain, barang-barang dan jasa-jasa yang ada tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang terus bermunculan dan beraneka ragam. Menurut mereka inilah problem ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Kelangkaan dan keterbatasan barang dan jasa secara relatif memang benar-benar terjadi pada karakteristik barang dan jasa, sebagai alat pemuas kebutuhan. Sementara manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dengan alat pemuas tersebut. Karena itu, mereka berpandangan bahwa alat-alat pemuas kebutuhan tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi dan memuaskan tingginya hasrat kebutuhan manusia yang tidak terbatas.¹⁹

Kebutuhan dalam pandangan ekonom konvensional, hanya bersifat materi semata. Secara umum, kebutuhan tersebut dipilah menjadi dua kategori :

Pertama, kebutuhan-kebutuhan yang bisa dirasakan dan diindra (*malmus wa mahsus*) oleh manusia, seperti kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman.

Kedua, Kebutuhan-kebutuhan yang hanya bisa dirasakan dan tidak bisa diindra (*mahsus ghaira malmus*), seperti kebutuhan manusia terhadap jasa layanan dokter dan guru.

Adapun kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat emosional (*hajjah ma'nawiyah*), seperti rasa bangga dan kebutuhan spiritual (*hajjah ruhiyah*) seperti pengagungan (*taqdis*) adalah kebutuhan yang tidak diakui dan tidak memiliki nilai dalam pandangan mereka. Karena kebutuhan emosional dan spiritual manusia

¹⁹ A Prasetyantoko, *Arsitektur baru ekonomi global, belajar dari keruntuhan ekonomi Asia Tenggara*, h 5

tidak memiliki nilai (*value*), keduanya tidak mendapatkan perhatian dalam kajian-kajian ekonomi mereka kembangkan.

Jadi alat pemuas kebutuhan manusia yang diakui dalam pandangan ekonom konvensional hanyalah barang dan jasa (*good and service*). Barang (*good*) esensinya adalah alat pemuas kebutuhan yang bisa diindra dan dirasakan, sedangkan jasa (*service*) adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak bisa diindra hanya bisa dirasakan. Dari sini tampak jelas bahwa kebutuhan manusia yang diakui dan memiliki nilai dalam pandangan ekonomi kapitalisme hanyalah kebutuhan fisik atau yang bersifat materi semata. Sehingga alat pemuas kebutuhan yang menjadi pusat perhatian mereka untuk diproduksi, dikonsumsi dan didistribusi hanyalah alat pemuas kebutuhan yang bersifat fisik.

Dalam ekonomi kapitalisme, barang dan jasa (*good and service*) yang layak untuk diproduksi, didistribusi dan dikonsumsi adalah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Terpuaskannya kebutuhan manusia terhadap suatu barang atau jasa sangat tergantung dari faktor kegunaan (*utility*) yang dikandungnya.

Kegunaan (*utility*) dalam pandangan ekonom konvensional adalah sesuatu yang bersifat personal, karena kegunaan itu bersifat personal, maka kegunaan itu tunduk pada keinginan (*want*) orang per orang. Dengan kata lain sebuah komoditi itu memiliki kegunaan jika dibutuhkan, dan sebuah komoditi itu bisa dikatakan dibutuhkan jika ada yang mengiginkan. Jadi dalam pandangan ekonom konvensional tidak ada perbedaan antara kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*).²⁰

²⁰ Taqiyuddin an Nabhani, h.8

2. Teori Nilai (*Value*) Suatu Barang dan Jasa

Nilai secara bahasa semakna dengan manfaat, kegunaan, harga, isi banyak atau sedikit.²¹

Adapun nilai dalam pembahasan para ekonom disebut dengan istilah *Value*. *Value* terbagi dua : *pertama*, *Utility Value* (nilai guna), yaitu manfaat atau kegunaan yang diperoleh karena mengkonsumsi barang atau jasa. *Kedua*, *Exchange Value* (nilai tukar), yaitu kekuatan tukar yang dimiliki oleh barang dan jasa ketika ditukar dengan barang dan jasa lainnya. Nilai /pertukaran barang dengan barang lain disebut barter, Nilai /pertukaran barang dengan uang disebut dengan harga. Sehingga harga adalah nilai tukar barang dan jasa dengan uang.

Adapun teori nilai (*teori of value*) menjelaskan Nilai guna barang dan jasa ditentukan oleh ada-tidaknya yang menginginkan dan tingkat nilainya ditentukan banyak-tidaknya permintaan (yang menginginkannya).²²

Teori tentang “nilai” digunakan dalam ekonomi kapitalisme untuk menilai apakah suatu barang dan jasa yang dihasilkan bermanfaat atau tidak. Sehingga nilai (*value*) dari suatu barang dan jasa diukur berdasarkan tingkat kegunaannya atau tingkat urgensinya. Nilai barang dan jasa dibedakan lagi berdasarkan hubungan, “nilai” yang berhubungan dengan individu tertentu disebut dengan “nilai guna” (*utility value*) dan “nilai” yang berhubungan dengan barang lain yang disebut dengan “nilai tukar” (*exchange value*).

²¹ Kamus besar bahasa Indonesia, 301

²² Hafidz Abdurrahman, *Pengantar ekonomi islam*, h 32

Nilai guna (*utility value*) adalah tingkat kepuasan yang dapat diperoleh oleh setiap individu ketika mereka mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Nilai ini diukur berdasarkan kegunaan/ kepuasan terakhir yang diperoleh ketika mengkonsumsi suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang paling rendah. Inilah yang mereka sebut dengan teori “kepuasan batas” atau “kepuasan akhir” atau *marginal satisfaction theory*²³ yang merupakan kelanjutan dari hukum *Gossen*²⁴. Penjelasan tentang teori *marginal satisfaction* dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel (1) : Kepuasan Batas Ketika Mengkonsumsi Roti

Jumlah Pemenuhan	Nilai Kepuasan
1 potong roti	10
2 potong roti	8
3 potong roti	6
4 potong roti	4
5 potong roti	2
6 potong roti	0

Tabel di atas menjelaskan, bahwa potongan roti pertama diberi nilai 10 yang merupakan nilai kepuasan tertinggi. Potongan kedua kenikmatannya tidak lagi senikmat potongan pertama, maka diberi nilai lebih rendah, yaitu 8. Potongan

²³ Teori kepuasan batas dikemukakan Oleh von bohm bawerk, Guru besar bidang ekonomi di Universitas Innbruck dan Menteri keuangan Austria selama tiga priode (1893-1896,1897 dan 1900-04).

²⁴ Oleh Hermann Hendrich Gossen (1810-1858), *Die Entwicklung derDesetze desa menschlichen verkehrsc und der daraus flicbenden regeln fur menschliches handeln*.

roti ketiga, keempat dan kelima tingkat kenikmatannya semakin menurun, diberi nilai 6,4 dan 2. Pada potongan keenam sudah berada pada titik puas atau sudah jenuh, karena itu diberi angka 0. Seperti itulah aplikasi *marginal satisfaction theory*, sebagai kelanjutan *hukum Gossen*²⁵

Teori ini berlaku untuk seluruh komoditas yaitu barang dan jasa (*good and service*). Adapun pengendaliannya dilakukan secara seimbang antara produsen dan konsumen melalui mekanisme Penawaran (*supply*) dan Permintaan (*demand*) dari sudut pandang kedua belah pihak.²⁶ Dengan demikian, kegunaan akan didapatkan pada batas unit paling akhir untuk menentukan kebutuhan_ketika batas akhir pemenuhannya. Dengan kata lain kalau diibaratkan sepotong roti, nilai roti itu ditentukan berdasarkan batas akhir rasa lapar (potongan roti yang keenam, bukan pada titik awalnya, potongan roti yang pertama) juga ditentukan pada saat persediaannya ada dipasar, bukan pada saat kelangkaannya. Inilah nilai guna (*utility value*).

Adapun yang kedua “nilai tukar” (*exchange value*) adalah kekuatan tukar yang dimiliki oleh barang dan jasa ketika ia ditukarkan dengan barang dan jasa lainnya. Pertukaran itu hanya bisa dilakukan secara sempurna, jika terdapat alat tukar (*medium of exchange*) yang dijadikan ukuran untuk menilai barang dan jasa. Dari sinilah maka para pakar ekonomi konvensional perlu membahas tentang “nilai tukar”, karena nilai tukar merupakan obyek penukaran dan sifat yang dapat diukur. Disamping itu karena ia merupakan standar yang dipergunakan untuk

²⁵ Hukum Gossen ini berlaku dengan syarat : *Pertama*, benda yang dikonsumsi satu macam dan sejenis. *Kedua*, pemenuhannya berlangsung terus menerus, tanpa tenggang waktu.

²⁶ Dwi condro triono. Ph.D, *Ekonomi Islam mazhab hamfara*, h.47

mengukur barang-barang dan jasa-jasa (*unit of account*), serta untuk membedakan aktivitas produktif dan non-produktif.

3. Teori Harga dan Perannya dalam Produksi, Konsumsi dan Distribusi

Harga secara bahasa adalah nilai barang yang ditentukan dengan uang atau jumlah uang atau alat tukar yang diserupakan dengan uang.²⁷ Secara umum harga adalah nilai tukar barang dan jasa apabila dipertukarkan dengan uang.

Adapun teori Harga (*teory of price*) yang dikenal dalam kajian ekonomi adalah nilai barang yang dinisbatkan kepada uang. Karena itu, harga berbeda dengan nilai tukar. Harga hanyalah salah satu dari nilai tukar, yakni ketika barang atau jasa di nisbatkan kepada uang saja. Sebagai salah satu nilai tukar secara pasti harga merupakan tolok ukur barang atau jasa, apakah mempunyai nilai guna (*utility*) atau tidak (*disutility*). Selain itu harga juga merupakan standar bagi tingkat kegunaan barang atau jasa.

Peran harga dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi menurut politik ekonomi kapitalisme sangatlah penting, sebab struktur harga adalah metode yang paling ideal dalam mengatur distribusi barang dan jasa kepada anggota masyarakat, struktur harga juga berperan sebagai pendorong laju produksi, struktur harga juga berperan untuk mewujudkan keseimbangan antara produksi dan konsumsi dan selanjutnya struktur harga juga berperan sangat penting dalam *supply and demand*

Politik ekonomi kapitalisme menetapkan, bahwa kegunaan (*utility*) adalah hasil usaha yang dicurahkan manusia. Hasil usaha itu dapat berupa upah kerja,

²⁷ <http://artikata.com/arti-329589-harga.html>

sehingga besar kecilnya upah yang didapatkan mempengaruhi usaha yang akan dilakukan. Besar kecilnya usaha yang dicurahkan akan mempengaruhi naik turunnya tingkat produksi.

Adanya struktur harga (*price apparatus*), atau mekanisme harga akan dapat menciptakan keseimbangan ekonomi (*economic equilibrium*) secara otomatis, sebab hal tersebut memberikan kebebasan kepada konsumen untuk menentukan sendiri distribusi bahan-bahan dasar yang mereka miliki pada cabang-cabang aktivitas ekonomi yang berangan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Struktur harga juga menentukan siapa produsen-produsen yang bisa masuk ke area produksi dan siapa diantara mereka yang akan tersingkir.

Mengapa demikian ? karena hargalah yang menentukan produsen tertarik untuk memproduksi barang tertentu dengan volume tertentu. Jika harga barang tersebut dipasaran bagus dan produsen bisa mendapatkan keuntungan dari produksi yang dilakukannya, maka para produsen akan memutuskan untuk memproduksi barang tersebut. Demikian sebaliknya, jika harga barang tersebut turun dipasaran, maka produsen akan mengurangi volume produksi atau bahkan menghentikannya.²⁸

Hubungan harga dan produksi dapat digambarkan melalui sebuah contoh, hubungan antara harga kain dengan pakaian yang akan dijual oleh seorang pedagang sebagai mana yang di gambarkan oleh tabel berikut :

²⁸ M.Nur rianto al arif & Dr.Euis Amalia, *Teori mikro ekonomi suatu perbandingan, antara ekonomi islam dan ekonomi konvensional*, h.158

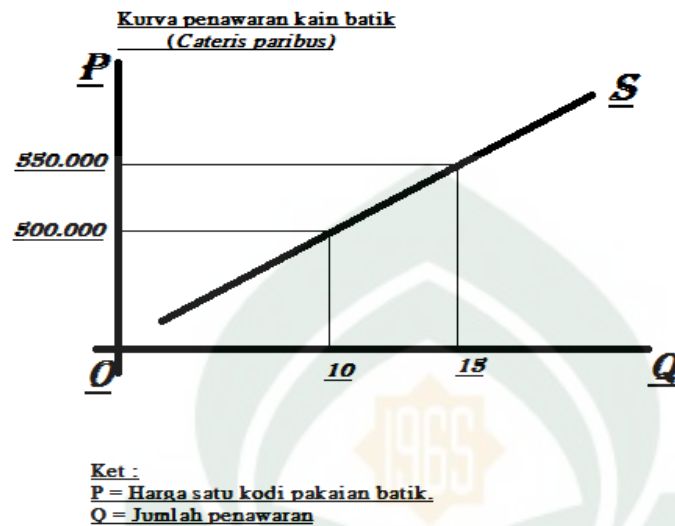
Tabel (2) : Hubungan Harga dan Produksi

Jenis Produk	Harga di Pasar	Volume Produksi
1 kodi pakaian batik	Rp. 500.000	10 kodi
1 kodi pakaian batik	Rp. 550.000	15 kodi
1 kodi pakaian batik	Rp. 600.000	20 kodi
1 kodi pakaian batik	Rp.650.000	25 kodi

Tabel di atas menggambarkan , bahwa harga dipasar untuk 1 kodi pakaian menentukan volume produksi. Jika harga dipasaran Rp.500.000, maka produsen akan memproduksi 10 kodi; jika harga Rp.550.000, maka produsen akan menambah volume produksinya menjadi 15 kodi, dan demikian seterusnya. Dari tabel di atas terlihat, bahwa harga dapat menentukan tingkat produksi.

Dari sinilah lahir hukum penawaran (*law of supply*), yang menyatakan bila tingkat harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang akan ditawarkan turun. Dalam hukum penawaran jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan tingkat harga, dalam hukum penawaran hanya menunjukkan hubungan searah antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Lihat gambar kurva penawaran berikut ini :

Gambar (2) kurva penawaran.

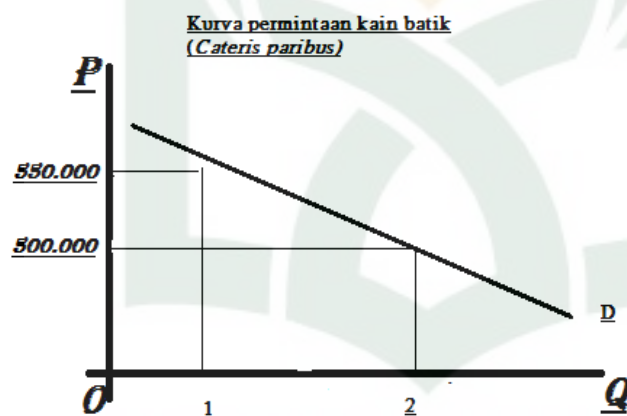


Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkatan harga. Kurva ini akan menghubungkan titik-titik koordinat pada sumbu harga (sumbu P) dengan sumbu jumlah barang (sumbu Q). Garis P (*price*) menunjukkan tingkat harga, sedangkan garis Q (*quantity*) menunjukkan jumlah barang yang diproduksi. Sementara garis S (*supply*) menunjukkan tingkat penawaran yang diberikan oleh produsen. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, artinya apabila harga pakaian naik, maka jumlah pakaian yang ditawarkan akan ikut naik. Dari kurva diatas dapat dijelaskan, bahwa ketika harga barang dipasar sebesar Rp. 500.000, maka jumlah barang yang diproduksi sebesar 10 kodi, ketika harga naik sebesar Rp.550.000, maka jumlah barang yang diproduksi

sebesar 15 kodi. Dengan demikian, garis penawaran S (supply) terus naik mengikuti kenaikan harga.

Dengan cara yang sama, harga juga dipergunakan untuk menentukan siapa konsumen yang boleh menikmati pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya dan siapa di antara mereka yang kebutuhan-kebutuhannya tetap tidak dapat terpenuhi. Ketika harga turun, maka permintaan konsumen akan naik, dan sebaliknya, ketika harga naik, maka permintaan konsumen akan turun. Lihat gambar kurva permintaan berikut:

Gambar (3) kurva permintaan



Ket :
P = Harga kain batik
Q = Jumlah permintaan kain batik

Garis P (*price*) menunjukkan harga, sedangkan Q (*quantity*) menunjukkan jumlah barang, sementara D (*demand*) menunjukkan permintaan. Dari gambar kurva diatas, bisa dijelaskan bahwa ketika harga dipasar sebesar Rp.500.000 perkodi pakaian, maka jumlah permintaan hanya 2 kodi, ketika harga naik

menjadi Rp550.000 perkodi, maka jumlah permintaannya turun, menjadi hanya 1 kodi.

Penjelasan di atas membuktikan, bahwa harga juga berfungsi menentukan tingkat konsumsi dan distribusi. Sehingga dapat dikatakan, bahwa tinggi rendahnya penawaran dan permintaan tergantung kepada harga. Bagi produsen, harga menjadi acuan, apakah dia akan memproduksi barang atau tidak. Adapun bagi konsumen, kegunaan barang menjadi fokus utama yang akan menentukan kekuatan permintaan (*demand*), selain faktor harganya.

Karena itu, menurut para ekonom kapitalis, pembahasan tentang penawaran dan permintaan (*supply and demand*) merupakan dua pembahasan utama dalam ekonomi. Dalam hal ini, permintaan dan penawaran yang dimaksud adalah permintaan dan penawaran di pasar. Seperti halnya permintaan (*demand*) tidak mungkin dinyatakan selain dengan menyebut satuan harga, demikian pula penawaran (*supply*) juga tidak bisa ditentukan selain dengan harga.

Hanya saja, permintaan itu akan berubah dengan kebalikan perubahan harga. Jika harga naik, maka permintaan akan turun, dan jika harga turun, permintaan akan naik. Berbeda dengan penawaran, penawaran akan berubah dengan mengikuti perubahan harga dan searah dengan perubahan harga tersebut. Penawaran akan bertambah dengan naiknya harga dan sebaliknya akan menurun jika harga turun. Dalam masing-masing kondisi ini, harga (*price*) memiliki pengaruh yang dominan dalam menentukan *supply and demand*. Artinya, harga

memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan tingkat produksi dan konsumsi, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel dan kurva di atas.²⁹

Bagi kaum kapitalis, struktur harga (*price structure*) adalah metode yang paling ideal dalam mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat dan itulah yang akan memicu dan dapat menjaga tingkat produksi setinggi-tingginya. Dan struktur harga ini, biasa juga disebut dengan mekanisme harga (*price mechanism*). Kaum kapitalis berpendapat, bahwa hargalah yang akan mendorong keseimbangan ekonomi secara otomatis. Sebab, mekanisme harga dibangun dengan prinsip member kebebasan kepada konsumen untuk menentukan sendirim distribusi barang dan jasa yang dimiliki oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi.

Dengan mekanisme harga ini konsumen bisa membeli sejumlah barang tertentu dan tidak membeli barang yang lain. Karena itu, mereka akan membelanjakan pendapatan yang mereka peroleh dengan membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan dan mereka senangi. Sebagai contoh, seorang konsumen yang tidak senang terhadap minuman keras (*khamer*) tidak akan membelanjakan pendapatan mereka untuk membeli barang tersebut, sebaliknya akan membelanjakan pendapatan mereka pada barang atau jasa yang mereka senangi. Jika permintaan terhadap minuman keras tersebut menurun atau bahkan tidak ada, maka produsen minuman keras itu akan merugi dan pada akhirnya akan

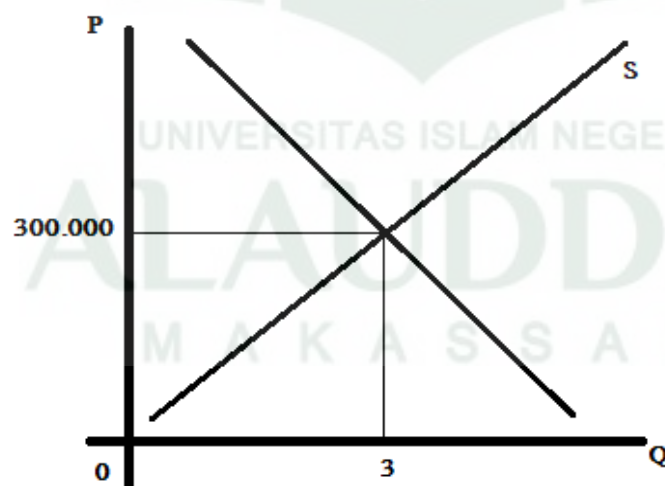
²⁹Walter Nicholsons, *Microccomonics and Problems*, h.112

menghentikan produksinya dan menutup usahanya. Kondisi ini akan berlaku sama bagi semua barang ekonomi.³⁰

Jadi, konsumenlah yang menentukan jumlah maupun jenis-jenis produksi secara bebas sesuai dengan keinginan mereka. Dalam hal ini, hargalah yang menentukan distribusi barang dan jasa, baik itu bisa dijangkau konsumen atau tidak, baik bisa memberi keuntungan kepada produsen ataupun tidak.

Dengan demikian, struktur harga adalah pendorong laju produksi, sekaligus penentu distribusi barang dan jasa (*good and service*). Struktur harga menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Artinya, struktur hargalah yang menjadi penyeimbang antara jumlah produksi dan konsumsi. Untuk menggambarkan fakta tersebut, bisa dilihat pada pengabungan kurva penawaran dan permintaan sebagai berikut :

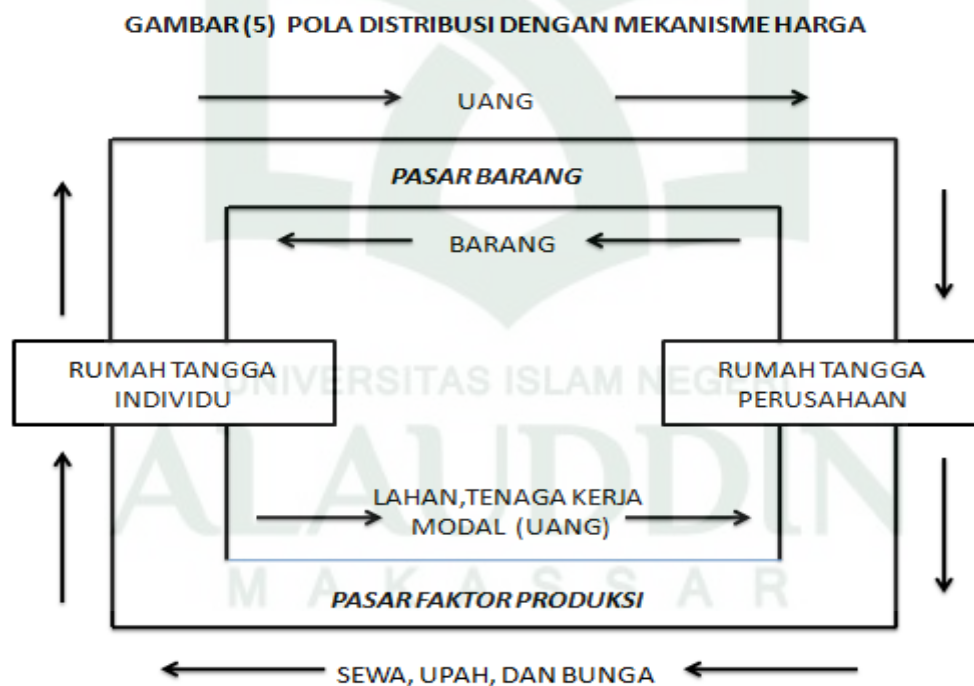
Gambar (4) Kurva Penawaran dan Permintaan



³⁰ Dr.Mahmud al khalidi, h.49

Kurva di atas menunjukkan, bahwa keseimbangan antara penawaran dan permintaan terjadi pada pertemuan antara sumbu *S (supply)* dan *D (demand)*, pada harga Rp. 300.000 dengan volume produksi dan konsumsi sebesar 3 unit. Inilah yang dimaksud, bahwa harga (*price*) merupakan penyeimbang antara produksi dan konsumsi.

Politik ekonomi kapitalisme juga menyakini, bahwa struktur harga yang terbentuk dipasar akan menjadi mekanisme distribusi yang menjamin seluruh hasil produksi barang dan jasa yang sudah dihasilkan akan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjelaskan hal tersebut dapat di gambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut ;



Gambar di atas menjelaskan, bagaimana proses distribusi barang dan jasa maupun faktor-faktor produksi yang ada ditengah masyarakat dapat diurutkan melalui mekanisme harga sebagai berikut : produsen akan memproduksi barang dan

jasa untuk dijual kepada konsumen. Konsumen akan membayar harga barang-barang tersebut dari penghasilannya. Penghasilan konsumen tersebut bersumber dari penjualan jasa dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya (termasuk tenaga).

Dengan demikian, harga faktor produksi itu adalah juga penghasilan dari pemilik faktor produksi untuk setiap unit faktor produksi yang dijual (disewakan) kepada produsen. Penghasilan total setiap individu tergantung berapa unit jumlah faktor produksi yang di miliki, di samping itu juga ditentukan oleh harga dari setiap unit produksi yang dihasilkan.³¹

Demikianlah pandangan politik ekonomi kapitalisme, tentang urgensi harga dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi faktor-faktor ekonomi di tengah masyarakat.

C. Politik Pertumbuhan Lahir dari Ide Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga Yang Menjadi Pilar-Pilar Ekonomi Politik Kapitalisme.

Kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat-alat pemuasnya bersifat terbatas. Itulah pandangan para ekonom konvensional yang mengilhami lahirnya ide tentang kelangkaan (*scarcity*) selanjutnya melahirkan teori nilai (*theory of value*) dan teori harga (*theory of price*) yang selanjutnya menjadi menjadi fokus kajian ekonom konvensional sekaligus menjadi pilar-pilar politik ekonomi kapitalisme (*economic political capitalism*)

Berangkat dari pandangan ekonom konvensional di atas, lahir konsep *produc domestic bruto* (PDB) & *produc national bruto* (NDP) serta konsep

³¹ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, h.187-188

pendapatan perkapita (*income percapita*) sebagai tolok ukur kesejahteraan dan kemakmuran sebuah masyarakat.

1. Pengertian Politik Ekonomi.

Politik ekonomi atau kebijakan ekonomi adalah cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya mencapai kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan hukum-hukum yang digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai urusan hidup manusia.³²

Setiap Negara memiliki kebijakan Politik ekonomi yang kadang berbeda dan kadang sama dengan politik ekonomi Negara yang lain. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ideologi dan sistem ekonomi yang diadopsi, apakah sistem ekonomi kapitalisme yang berasaskan akidah sekularisme, sosialisme yang berasaskan akidah komunisme atau sistem ekonomi islam yang tegak diatas akidah Tauhid. Perbedaan tersebut akan tampak pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan hukum-hukum yang berfungsi memecahkan persoalan hidup manusia.³³

2. Perbedaan Antara Politik Ekonomi dan Ekonomi Politik.

Berangkat dari pengertian politik ekonomi yang merupakan serangkaian aturan dan kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kedudukannya adalah bagian dari disiplin ilmu ekonomi politik yang lebih luas dan kompleks karena berhubungan dengan sistem ekonomi yang diadopsi oleh

³² Prof.Dr. Didik J Rachbini, *Ekonomi politik dan teori pilihan public*, h.1

³³ Abdurrahman al-Maliki, *Politik ekonomi islam*, h.51

sebuah pemerintahan. Ilmu ekonomi politik tidak hanya membahas seputar kebijakan dan aturan, tetapi lebih luas dan kompleks membahas persoalan kepemilikan sumber daya, pemanfaatan dan pengembangannya, serta mekanisme alokasi dan pendistribusian hasil-hasilnya pada seluruh masyarakat, juga terkait dengan hubungan politik luar negeri dan kerjasama-kerjasama dibidang ekonomi Negara yang meliputi politik moneter, politik fiskal, politik produksi, politik perdagangan luar negeri, politik harga dan upah, serta politik sosial dan ketenagakerjaan.³⁴

Ilmu politik ekonomi pada dasarnya adalah merupakan penggabungan dua bidang disiplin ilmu humaniora yang berbeda. Namun pada perkembangannya, Ilmu ekonomi politik mengalami transformasi dari waktu ke waktu dengan arah kajian, instrumen, dan objek yang berubah-ubah. Pada masa tertentu, kajian Ilmu Ekonomi Politik lebih tertuju pada aspek-aspek politik dan kebijakan pemerintah, tapi pada masa lain bergulir kembali ke arah kajian ekonomi dan kebijakan pemerintah atas bidang ini.

Ekonomi Politik secara konvensional mempelajari bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi. Sehingga sistem kekuasaan menjadi fokus paling utama dalam ekonomi politik. Ilmu ekonomi politik berbicara tentang anatomi sistem yang diadopsi dan dijalankan suatu Negara atau pemerintahan. Hasil kajian terhadap anatomi sistem tersebut bermuara pada dua kategori, yaitu sistem politik ekonomi kapitalisme dan sistem politik ekonomi sosiaialisme, dua

³⁴ Muana nanga, Makro ekonomi, teori, masalah dan kebijakan, h.17

kategori inilah yang menjadi muara pengkajian ekonomi politik sampai masa perang dingin atau sebelum runtuhnya tembok Berlin.³⁵ Ada 4 bentuk sistem ekonomi politik yang dominan saat ini, yaitu kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan sistem ekonomi campuran (*mixed economic system*)³⁶. Sementara sistem ekonomi politik islam jarang diperbincangkan dan hanya dijadikan pelengkap dan pewarna dalam pembahasan sistem politik ekonomi mainstream³⁷. Hal demikian menjadi wajar, sebab sebuah sistem politik ekonomi akan tegak bilang dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan yang menganut ideologi tertentu, seperti kapitalisme-liberalisme yang diemban oleh Negara-negara barat dan dipaksakan pada sebagian Negara-negara dunia ketiga dan sosialisme-komunisme yang diemban oleh Negara-negara bekas pecahan Uni Soviet dan China sementara sistem politik ekonomi islam tidak diemban oleh satupun institusi politik setelah kehancuran daulah khilafah terakhir di Turki pada tahun 1924.³⁸ Adapun dari sisi pengembangan ilmu ekonomi islam, juga tidaklah menjadi perhatian dalam pembahasan bidang ekonomi dewasa ini, sebab ilmu ekonomi hadir untuk memecahkan problem utama (*basic problem*) ekonomi yaitu problem kelangkaan (*scarcity*), nilai (*value*) dan harga (*price*), sementara disisi lain sistem politik ekonomi islam tidaklah menganggap hal tersebut sebagai problem utama bidang

³⁵ Muana Nanga, *Makro ekonomi :Teori, masalah dan kebijakan*, h.1

³⁶ Prof.Dr. Didik J rahcbini, *Ekonomi politik dan teori pilihan public*, h.2

³⁷ Bakr sadr, *iqtishaduna*, h.51

³⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem ekonomi islam*, h. 29

ekonomi, melainkan hanyalah sebuah problem sekunder (*secundery problem*) yang terjadi akibat kekeliruan pada aspek kebijakan publik.³⁹

Sistem kapitalisme mengakomodasi sifat-sifat eksistensi mekanisme pasar, insentif pendirian badan usaha, motif mencari keuntungan sehingga peranan institusi pasar dan swasta dominan. Di dalam sistem kapitalisme, pemilikan (*ownership*) terletak di tangan individu. Dalam aktivitas ekonomi berlaku hukum pasar, yakni mekanisme pembentukan harga ditentukan oleh bekerjanya faktor permintaan dan penawaran. Peranan pemerintah terbatas untuk melakukan kontrol dan mengikuti perkembangannya agar tidak terjadi kegagalan pasar. Sebaliknya, sistem sosialisme lebih mementingkan peran negara, tetapi memberikan ruang gerak yang sedikit terhadap institusi pasar, motif mencari keuntungan, dan peranan swasta. Di dalam sistem ekonomi sosialisme, kelompok industri dasar dan sumber daya yang menyangkut kepentingan rakyat, dikuasai oleh negara. Aktivitas produksi bermotifkan faktor ekonomi dan nonekonomi. Di sinilah peranan pemerintah cukup besar, terutama pada sektor-sektor produksi strategis yang merupakan tumpuan masyarakat banyak. Pemikiran sosialis membangun fondasi komunis. Sehingga kapitalisme banyak mengambil pemikiran dasar sosialisme untuk mengeliminir kelemahan internalnya. Sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) merupakan paduan dari dua bentuk sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Sebenarnya sistem ekonomi ini dapat saja menghilangkan konotasi perpaduan antara dua sistem ekonomi tersebut karena sistem ekonomi campuran dapat signifikan dalam khasnya tersendiri.

³⁹ Dr.Mahmud al-Khalidi, *Kerusakan dan bahaya sistem ekonomi kapitalisme*, h.77

Sistem ekonomi campuran tetap berbasis pada prinsip pasar untuk mencari keuntungan, yang terkendali oleh aturan pemerintah. Dalam beberapa abad terakhir ini analisis ekonomi politik lebih ditandai oleh dua kubu pemikiran, yaitu versi liberalisme dan komunitas (kelompok). Kapitalisme liberal dikembangkan dengan penekanan kajian terhadap bekerjanya mekanisme pasar dan alasan logika ekonomi yang rasional. Sementara, kelompok Marxis lebih menekankan pada telaah terhadap kekuasaan yang banyak mempengaruhi hasil proses politik yang berkaitan dengan ekonomi.

Perkembangan ilmu ekonomi politik menunjukkan semangat dan gairah baru setelah lahir dan tumbuh perspektif teori Ekonomi Politik Baru (EPB) *atau "The New Political Economy"* atau lebih dikenal dengan *"Rational Choice (RC)"* dan *"Public Choice (PC)"*. Teori ini berusaha untuk menjembatani ilmu ekonomi dengan menelaah fenomena ekonomi dalam perspektif mekanisme pasar, dan dengan fenomena dan kelembagaan non-pasar pada bidang di luar ekonomi. Pendekatan EPB juga berusaha untuk memahami realitas politik dan bentuk-bentuk sikap sosial lainnya dalam kerangka analisis, yang dianalogikan pada faktor individual, yang rasional. Dengan demikian, pendekatan EPB lebih bersifat liberal-individual tetapi tidak berkembang tanpa memperhatikan realitas sosial sebagai basisnya. Dalam perspektif EPB, ilmu ekonomi politik terbuka untuk memahami masalah, fenomena dan kelembagaan nonpasar, termasuk melihat peran negara di dalam kegiatan dan transaksi ekonomi. Dengan demikian,

pendekatan EPB merupakan transformasi pendalaman teoritis untuk menjelaskan berbagai aspek manusia dengan institusinya.⁴⁰

Ekonomi politik baru (EPB) adalah sebuah langkah tambal sulam yang harus diakomodasi oleh sistem politik ekonomi maistrean untuk sekedar mempertahankan eksistensinya.

3. Politik Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti hubungan timbal balik, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi begitu pula sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksudkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sehingga dapat dikatakan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Tolok ukur yang digunakan dalam pembangunan ekonomi diantaranya adalah Pendapatan Nasional, Produk Nasional Bruto (GNP), kesempatan kerja, perekonomian yang stabil, neraca pembayaran luar negeri dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan yang merata.⁴¹

Adapun perhitungan pendapatan nasional merujuk kepada seperangkat aturan dan teknik untuk mengukur aliran seluruh output barang dan jasa yang

⁴⁰ Prof,Dr. Didik J rachbini, 12

⁴¹ Robert E Baldwin, *Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Berkembang*, h. 89

dihasilkan dari aliran seluruh input (faktor-faktor produksi) yang digunakan oleh suatu perekonomian untuk menghasilkan output barang dan jasa tersebut. Dengan kata lain, perhitungan pendapatan nasional merupakan suatu kerangka hitung (*accounting frame work*) yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi atau berlangsung di dalam ekonomi.

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (*Gross National Product / GNP*) yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. Model perhitungan pendapatan secara nasional ini mulai dikembangkan sebagai teori pada tahun 1930-an. Tepatnya, pada tahun 1932 ketika departemen pendapatan nasional AS mengumpulkan hasil perhitungan pendapatan nasional yang pertama dan berhasil diterbitkan pada tahun 1934. Yang pertama kali memperkenalkan teori ini adalah Simon Kuznets dari Universitas Harvard, sekaligus menjabat sebagai direktur biro penelitian ekonomi nasional USA. Menurutnya model perhitungan GNP adalah alat yang sangat efektif untuk mengukur pendapatan nasional.

Data GNP dapat membantu pemerintah dan pejabat pembuat kebijakan untuk menjalankan perekonomian menuju tercapainya sasaran dan tujuan nasional⁴².

Ada lima konsep yang perlu dipahami dan dibedakan ketika berbicara tentang pendapatan nasional⁴³ :

1. Produk domestik bruto (GDP).

Produk domestik bruto (*Gross Domestic Product*) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara

2. Produk domestik netto (NDP).

Produk Nasional Neto (*Net National Product*) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut *replacement*). *Replacement* penggantian barang modal / penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

⁴² Samulson and Nordhaus 1992), h.113

⁴³ Muana Nanga, Makro ekonomi : *Teori, masalah dan kebijakan*, h.13

3. Pendapatan Nasional (NI).

Pendapatan Nasional Neto (*Net National Income*) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah.

4. Pendapatan Personal (PI).

Pendapatan perseorangan (*Personal Income*) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (*transfer payment*). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh : pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan) dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan

maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

5. Pendapatan Desposibel (DI).

Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. *Disposable income* ini diperoleh dari *personal income* (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (*direct tax*) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan

BAB III

KELANGKAAN, NILAI DAN HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. *Profil Ekonomi Islam.*

1. Akidah Islam Sebagai Asas Ekonomi Islam

Kata akidah berasal dari bahasa arab, yaitu عقد, بعقد, عقدة. Kata tersebut mengikuti *wazan* فعلة yang berarti معقدة atau sesuatu yang diikat¹.

Adapun akidah menurut istilah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, serta hubungan semuanya dengan sebelum kehidupan (Sang pencipta) dan setelah kehidupan dunia (Hari Kiamat), serta hubungan semuanya dengan sebelum dan setelah kehidupan (syari'at dan Hisab). Yang diyakini oleh kalbu (*wijdan*) dan diterima oleh akal pikiran, sehingga menjadi pembenaran (keyakinan) yang pasti, sesuai dengan realitas dan bersumber dari dalil.²

Akidah islam, menjadi jawaban terhadap pertanyaan mendasar pada setiap manusia (*al-uqdatul al-qubra'*) yaitu pertanyaan tentang dari mana asal muasal manusia, alam semesta dan kehidupan, untuk apa tercipta dan kemana setelah kehidupan dunia ini berakhir. Jawaban terhadap pertanyaan mendasar di atas akan menuntun manusia untuk mengarungi kehidupan dunia dan menyelesaikan setiap problematika kehidupan yang mereka hadapi. Termasuk problem ekonomi dan bagaimana menyelesaikannya.

¹ Ibnu masyur, *Lizan arab*, h 120

² Hafidz Abdurrahman, *Diskursus islam politik dan spiritual*, h. 133

Atas dasar Akidah islam inilah paradikma dan konstruksi ekonomi islam dibangun, dan tentu akan berbeda dengan paradikma ekonomi kapitalisme-liberalisme ataupun ekonomi sosialisme-komunisme. Atas dasar ini, falsafah ekonomi islam selalu dikaitkan dengan perintah dan larangan Allah swt. Yakni, dengan menghubungkan gagasan-gagasan yang menjadi dasar untuk mengatur individu dan masyarakat, serta menjadikan perilaku-perilaku ekonomi sesuai dengan hukum islam. Hukum syara' adalah bingkai dan koridor yang mengatur seluruh perilaku ekonomi kaum muslimin.³

Sistem ekonomi islam merupakan bagian dari totalitas sistem islam yang didasarkan pada al-Quran dan al-Sunnah. Sehingga paradigm dasar yang digunakan untuk membangun pengaturan urusan rakyat' adalah aqidah dan hukum syara'

Sebagai bagian dari sistem Islam, sistem ekonomi Islam dibangun di atas dasar syariah. Maksudnya adalah menempatkan Allah SWT sebagai *as-Syaari'* (Pembuat hukum) dan menyadari sepenuhnya kewenangan-Nya dalam menetapkan aturan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Pengakuan ini harus dilakukan secara total. Akal diposisikan sebagai alat memahami hukum atau dan realitas untuk memecahkan problema kehidupan secara Islam, yang dikenal dengan istilah ijtihad. Akal berfungsi untuk memahami realitas yang dihadapi dan kemudian dipertautkan dengan hukum syariah yang mengaturnya, bukan sebagai sumber kelahiran sebuah hukum.⁴

³ Samih Athif Zain, *Syariat islam dan perbincangan ekonomi, politik dan sosial sebagai studi perbandingan*, h.32

⁴ Samih Athif Zain, h.34-35

Secara prinsip Islami, tidak ada satu pijakan hukum pun yang dapat diterima kecuali jika hal itu berasal dari Allah SWT. Karenanya, sebuah hukum agar dapat disebut sebagai hukum syariah haruslah bersumber dari dalil-dalil syariah. Sumber-sumber tersebut (yang pasti disepakati) adalah *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *Ijma' Shahabat* dan *Qiyas*⁵

Empat sumber hukum tersebut merupakan kunci pokok pembentukan konsepsi syariah dalam sistem Islam. Untuk menjaga agar konsepsi ini tetap tegak dalam setiap masa dan tempat, Islam mengajarkan proses ijtihad untuk memecahkan permasalahan baru. Islam meletakkan garis-garis besar yang luas dalam banyak hukumnya dan memberikan keleluasaan bagi akal manusia untuk menyimpulkan hukum-hukum syariah bagi segala problema baru setiap hari dalam banyak kejadian. Hanya saja proses ijtihad yang dimaksud harus berlangsung dengan berpegang pada prinsip-prinsip ijtihad yang benar.

2. Ekonomi Islam memisahkan Pembahasan Antara Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi.

Berbeda dengan ekonomi kapitalisme, yang menjadikan pembahasan produksi, konsumsi dan distribusi menjadi pembahasan yang satu. Ekonomi islam memisahkan pembahasan antara ketiganya. Produksi adalah merupakan sebuah pembahasan tersendiri yang dibahas dalam bidang ilmu ekonomi. Adapun konsumsi dan distribusi diletakkan pada pembahasan yang lain, yaitu dibahas dalam sistem ekonomi islam.

⁵ Moh Magfur Wahid, *Membangun sistem ekonomi alternative, perspektif islam*, h. 116-

Untuk mendalami perbedaan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, kita harus dapat melihat dengan jelas apa karakteristik yang membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi itu. Untuk bisa membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, bisa diajukan contoh sederhana seperti aktifitas membeli seliter solar dengan harga Rp. 6.500,-. Dari aktivitas di atas dapat diajukan dua pertanyaan sekaligus : Pertanyaan *pertama*, bagaimana sebuah perusahaan minyak menjual solar (seperti Pertamina, misalnya) dapat menentukan harga 1 liter solar Rp. 6.500,-. Bagaimana cara menghitung biaya produksinya?, bagaimana cara menghitung keuntungannya?, bagaimana cara menghitung efisiensinya? dan seterusnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berasal dari Ilmu ekonomi. Pertanyaan *kedua*, jika perusahaan minyak yang memproduksi solar tersebut adalah perusahaan swasta asing, pertanyaannya adalah bolehkah perusahaan swasta asing tersebut memproduksi minyak dan menguasai sumber daya minyak yang ada di Indonesia?, sumber daya minyak itu sesungguhnya hak milik siapa?, hak milik swasta, swasta asing, hak milik Negara ataukah hak milik rakyat? dan seterusnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berasal dari sistem ekonomi, yang berkaitan dengan persoalan kepemilikan, pengembangan kepemilikan dan distribusi dan pemanfaatan kepemilikan di tengah masyarakat.

Kelompok pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Sedangkan kelompok pertanyaan kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Dari penjelasan di atas dapat dibedakan bahwa ; ilmu ekonomi adalah seperangkat alat (*tools*) yang dapat

digunakan oleh manusia untuk kepentingan menghitung sebuah proses produksi, biaya produksi, efisiensi produksi dan berbagai hal lain yang terkait dengannya, dengan tujuan utama adalah untuk mengetahui berapa biaya (*cost*) yang akan dikeluarkan dan berapa keuntungan (*benefit*) yang akan diperoleh dari sebuah proses produksi.

Sebagai sebuah alat, maka ilmu ekonomi tentu bersifat netral, objektif dan tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup, kepercayaan, keyakinan maupun ideologi tertentu. Hal inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya :

«أنتم أعلم بأمور دنياكم» .

Terjemahnya :Kalian lebih mengetahui tentang perkara yang menyangkut urusan dunia kalian (H.R. Bukhari-Muslim)

Adapun sistem ekonomi adalah pembahasan yang berbeda dengan ilmu ekonomi, bahkan kebalikannya. Sistem ekonomi berkaitan dengan pandangan, keyakinan, kepercayaan ataupun ideologi tertentu yang diyakini manusia dalam hidupnya. Khususnya pembahasan tentang alokasi sumber daya ekonomi yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, pertanyaan tentang siapa yang berhak menguasai sumber daya air, sumber daya hutan, pertambangan, energi, minyak bumi, gas, batubara, gunung, laut dan berbagai sumber daya ekonomi yang lain di sebuah Negara tertentu, pasti akan berbeda jawabannya. Sistem ekonomi kapitalisme akan berbeda dengan sistem ekonomi sosialisme, demikian pula sistem ekonomi islam, akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme ataupun sosialisme.⁶

⁶ Dwi condro triono Ph,D, *Ekonomi islam mazhab hamfara*, h. 18-21

Pembahasan tentang alokasi sumber daya ekonomi yang ada di bumi, akan terkait dengan tiga aspek ; pertama, kepemilikan (*al-milkiyah*), kedua, pemamfaatan (*tasharuf*), dan ketiga, distribusi (*tauziy*) sumber daya ekonomi.⁷

B. Pilar-Pilar Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Dengan membaca dan meneliti hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaklah bahwa Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan (barang dan jasa) diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola (mengonsumsi dan mengembangkan) harta serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Dan inilah yang sesungguhnya, menurut pandangan Islam yang dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh harta kekayaan, masalah mengelola harta kekayaan yang dilakukan manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. Atas dasar ini, maka asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi menurut Islam berdiri di atas tiga pilar (fundamental) yakni : bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (*tamalluk*), pengelolaan (*tasharruf*) kepemilikan, serta distribusi kekayaan di tengah masyarakat.

⁷ Taqiuddin an Nabhani, *Sistem ekonomi islam*, h.81

1. Kepemilikan (*Property/Tamalluk*)⁸

Kepemilikan merupakan izin As-Syari' (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-Syari' terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dari karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah SWT untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut sah menurut hukum Islam.

Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat yang lain. Allah SWT juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain. Allah SWT melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah SWT melarang siapa pun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Sebaliknya, Allah SWT memberi izin untuk melakukan jual-beli bahkan menghalalkannya.

Kepemilikan (*property*) menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

(a) **Kepemilikan Individu** (*private property/ Milkiyatu Al-Fardiyah*);

Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh

⁸ Taqiyuddin an Nabhani, h.86

kompensasi —baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli— dari barang tersebut. Oleh karena itu setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu.

(b) **Kepemilikan Umum** (*collective property/ Milkiyatu Al-Aamah*);

Kepemilikan umum adalah izin As-Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh As-Syari' bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan As-Syari' melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil orang.

(c) **Kepemilikan Negara** (*state property/ Milkiyatu Ad-Daulah*); Milik negara

adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, dimana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya semisal harta fai', kharaj, jizyah dan sebagainya.

2. Pengelolaan (*At-Tasharruf*) Kepemilikan.⁹

Harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Allah SWT kemudian menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya, maka pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya

⁹.Taqiyuddin an Nabhani, h. 162

tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.

Dalam memanfaatkan harta milik individu yang ada Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak fi sabilillah, membayar zakat dan lain-lain. Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah dan lain-lain. Baru kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah. Dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang seperti untuk membeli barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi dan lain-lain.

Demikian pula pada saat seorang muslim ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki, ia terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan. Selain itu, Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya.

Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum (*collective property*) itu adalah hak negara, karena negara adalah wakil ummat. Hanya masalahnya, As-Syari' telah melarang negara untuk mengelola kepemilikan umum (*collective property*) tersebut dengan cara barter (*mubadalah*)

atau dikapling untuk orang tertentu. Sementara mengelola dengan selain kedua cara tersebut, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum, yang telah dijelaskan oleh syara', tetap diperbolehkan.

Adapun mengelola kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara (*state property*) dan kepemilikan individu (*private property*) nampak jelas dalam hukum-hukum baitul mal serta hukum-hukum muamalah, seperti jual-beli, pergadaian dan sebagainya. As Syari' juga telah memperbolehkan negara dan individu untuk mengelola masing-masing kepemilikannya, dengan cara barter (*mubadalah*) atau diberikan untuk orang tertentu ataupun dengan cara lain, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara'.

3. Distribusi Kekayaan (*thauzi atsarwa*) di Tengah-tengah Manusia.¹⁰

Tata cara (mekanisme) distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan kebutuhan akan suatu pemenuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. Sehingga kesalahan yang terjadi dalam distribusi tersebut memang benar-benar terjadi. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang *fixed*, seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syara' melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya. Kemudian,

¹⁰ Taqiyuddin an Nabhani, h.337

syara' mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya : “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr : 7)

Di samping itu, syara' juga telah mengharamkan penimbunan emas dan perak, meskipun zakatnya tetap dikeluarkan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S.At-Taubah/9 :34

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah : 34).

Demikianlah penjelasan tentang ketiga pilar yang menopang tegaknya sistem ekonomi islam yang dapat digambarkan secara sistematis dalam gambar bagan pilar-pilar sistem ekonomi islam.¹¹

C. Politik Ekonomi Islam.

Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan hukum-hukum yang digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai urusan hidup manusia. Politik ekonomi Islam berbeda dengan politik ekonomi yang lain, baik politik ekonomi kapitalis maupun politik ekonomi sosialis.

¹¹ Lampiran I

Perbedaan tersebut tampak pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan hukum-hukum yang berfungsi memecahkan persoalan hidup manusia.

Politik ekonomi Islam ditujukan untuk memberikan jaminan pemenuhan semua kebutuhan pokok/ primer seluruh individu masyarakat, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kadar kesanggupannya dan gaya hidup (*life style*) tertentu dalam masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan harus dipandang dapat dicapai oleh tiap individu bukan secara kolektif (*agregat*). Dengan demikian peningkatan taraf hidup harus dilihat per individu bukan berdasarkan tingkat kemakmuran rata-rata tanpa melihat aspek distribusinya.

Manusia sebagai individual akan dijamin oleh Islam untuk dipenuhi seluruh kebutuhan pokok (primer)nya secara sempurna, sekaligus didorong dan diberikan kesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelengkap.

Politik ekonomi Islam bukan bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan sebuah Negara dengan menggunakan ukuran pertumbuhan ekonomi secara nasional, tanpa memperhatikan jaminan kepada setiap orang untuk menikmati peningkatan taraf hidup tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan bertujuan mengupayakan kemakmuran individu dengan cara-cara yang sebebaskan, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya hak hidup individu-individu lainnya. Namun, politik ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin hak hidup

setiap orang sebagai manusia dengan pola interaksi tertentu serta memungkinkannya untuk meningkatkan taraf hidupnya dan kemakmuran.¹²

1. Kebutuhan Pokok (*Asasiyah*)

kebutuhan pokok (*primer*) dalam pandangan Islam mencakup kebutuhan terhadap barang tertentu berupa pangan, sandang dan papan serta kebutuhan terhadap jasa tertentu berupa keamanan, pendidikan dan kesehatan.

Barang-barang berupa pangan, sandang dan papan (perumahan) adalah kebutuhan pokok (*primer*) manusia yang harus dipenuhi. Tidak seorangpun yang dapat melepaskan diri dari kebutuhan tersebut. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok adalah *nash-nash* yang berkenaan dengan pangan, sandang dan papan (perumahan). Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/ 2 :233:

وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (233)

Terjemahnya : “Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik...”¹³

Dan Firman Allah swt dalam Q.S an-Nisaa/ 4 :4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ لِحُلَّةٍ فَإِنْ ظَنَنْتُمْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)

Terjemahnya :Dan berilah mereka nafkah (belanja) dan pakaian (dari hasil harta itu).¹⁴

¹² . Taqiyuddin an nabhani, *Nitzamul iqtishodi fi al-islam*, h.122-153

¹³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

Dan Firman Allah swt dalam Q.S.al-Hajj/22 :28 :

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا آلَ بَيْتِ الْفَقِيرِ (28)

Terjemahnya :“Dan berilah makan orang-orang yang sengsara lagi fakir.”¹⁵

Dan Firman Allah swt dalam Q.S. at-Thalaq/65 :6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (6)

Terjemahnya“Tempatkanlah mereka (para isteri) di tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...”¹⁶

Az-Zein (1981)¹⁷, mengutip hadits Rasulullah saw yang bersabda yang artinya :“Anak Adam tidak mempunyai kebutuhan selain dari sepotong roti untuk menghilangkan laparnya, seteguk air untuk meredakan dahaganya dan sepotong pakaian untuk menutup ‘auratnya. Dan lebih dari itu adalah keutamaan.” (**Al-Hadits**)

Nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadits di atas menunjukkan dengan jelas, bahwa kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang tiga tersebut. Selain dari barang yang tiga tersebut merupakan kebutuhan pelengkap (*kamaliyat*).

Jasa keamanan, kesehatan dan pendidikan, adalah tiga hal yang merupakan kebutuhan jasa asasi dan harus dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Dijadikannya keamanan sebagai salah satu kebutuhan terhadap jasa yang pokok mudah dipahami. Tidak mungkin setiap orang dapat menjalankan seluruh aktivitasnya terutama aktivitas yang wajib seperti kewajiban ibadah, kewajiban

¹⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

¹⁷ Az-Zein, S. A.Syari’at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan (Terjemahan).(Penerbit Husaini. Bandung.1981, h.212

bekerja, kewajiban bermuamalat secara Islami termasuk menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengan ketentuan Islam tanpa adanya keamananan yang menjamin pelaksanaannya. Untuk dapat melaksanakan semua ini, maka haruslah ada jaminan keamanan bagi setiap warga negara.

Demikian pula dengan kesehatan, tidak mungkin setiap manusia dapat menjalani berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mempunyai kesehatan yang cukup untuk melaksanakannya. Karenanya, kesehatan juga termasuk ke dalam kebutuhan jasa yang pokok yang harus dipenuhi setiap manusia.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa keamanan dan kesehatan adalah salah satu kebutuhan jasa pokok adalah sabda Rasulullah saw :

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ طَعَامُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Terjemahnya :“Barangsiapa yang bangun pagi dalam keadaan aman jiwanya, sehat badannya dan disampingnya ada makanan hari itu, maka seakan-akan dunia ini telah dikumpulkan baginya.” (Al-Hadits)

Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa jasa pendidikan adalah merupakan kebutuhan pokok, adalah karena tidak mungkin manusia mampu mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat kecuali dia memiliki ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda :

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلِيهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلِيهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْإِثْنَانِ مَعًا فَعَلِيهِ بِالْعِلْمِ

Terjemahnya : “Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia hendaklah ia mempunyai ilmu, barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) akhirat hendaklah ia mempunyai ilmu, dan barangsiapa

yang menginginkan keduanya (kebahagiaan dunia dan akhirat) maka hendaklah ia mempunyai ilmu.” (**Al-Hadits**)

Rasulullah SAW bersabda:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Terjemahnya :“Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah” (**HR Thabrani**)¹⁸

Demikian juga, mengemban dakwah Islamiyah adalah kewajiban atas segenap kaum Muslimin, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. An Nahl/ 16 :125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (125)

Terjemahnya :“Serulah (manusia) ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik ...”¹⁹

Juga sabda Rasulullah SAW:

بلغوا عني ولو آية

Terjemahnya :“Sampaikan apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat” (**HR Bukhari**).²⁰

Tidak akan mungkin seseorang dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga tidak mungkin tugas dakwah dan tabligh dapat terlaksana

¹⁸ H.R Iman Tabrani

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

²⁰ H.R. Bukhari

terlaksana dengan baik tanpa adanya ilmu. Dan ilmu pengetahuan tidak mungkin diperoleh tanpa adanya pendidikan. Karena itulah maka pendidikan sebagai sarana untuk menuntut ilmu termasuk juga dalam kebutuhan jasa yang pokok.

2. Strategi Politik Ekonomi Islam

Ada dua cara pelaksanaan jaminan kebutuhan pokok antara pemenuhan yang berbentuk barang dengan yang berbentuk jasa.

- a) Mekanisme *tidak langsung*, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang dan papan).
- b) Mekanisme *langsung*, yakni negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok berupa pendidikan dan kesehatan.

3. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Barang (Pangan, Sandang dan Papan)

Terdapat 5 mekanisme tidak langsung yang dapat dilaksanakan yaitu (a) mewajibkan bekerja bagi laki-laki yang mampu, (b) negara menyediakan lapangan pekerjaan, (c) kewajiban untuk menanggung ahli waris yang tidak mampu mencari nafkah, (d) negara menyediakan subsidi langsung melalui baitul mal dan (e) penerapan dlaribah atas kaum muslimin memiliki kelebihan harta kekayaan.

a) Kewajiban Bekerja

Hukum Islam telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, pangan dan papan. Caranya dengan mewajibkan bekerja kepada setiap laki-laki yang mampu

bekerja, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya sendiri, berikut kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Karena itu, Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rizki dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu. Banyak ayat dan hadits yang telah memberikan dorongan dalam mencari nafkah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Mulk/:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15)

Terjemahnya : “Dialah (Allah) yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian rezeki-Nya.”²¹

Bekerja menurut Islam adalah aktivitas yang sangat mulia dan orang-orang yang sibuk bekerja mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Rasulullah saw bersabda yang artinya:

" إِنْ أَطِيبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ "

Terjemahnya : “Tidaklah seorang di antara kamu, makan suatu makanan lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri” (HR. Baihaqi)²²

Tidak hanya kedudukan yang mulia, Islam telah menetapkan bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh merupakan aktivitas yang dapat menghapus dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh aktivitas ibadah utama sekalipun. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda yang artinya :

Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni.” (HR. Ahmad)

²¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

²² H.R. Baihaqi

Demikianlah, banyak ditemukan ayat-ayat dan hadits-hadits yang semuanya mendorong agar bekerja dan mencari rezeki serta bekerja untuk memperoleh harta kekayaan. Islam telah mengarahkan bahwa motif dan alasan bekerja adalah dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, menikmati kesejahteraan hidup dan perhiasan dunia. Namun agar aktivitas bekerja ini juga bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dilakukan tersebut haruslah pekerjaan yang halal.

b) Kewajiban Negara Menyediakan Lapangan Pekerjaan

Nash-nash di atas juga memberikan penjelasan kepada kita, bahwa pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri, yakni dengan “bekerja”. Namun jika ia tidak memperoleh pekerjaan sementara ia mampu bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan tersebut, maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan tersebut. Sebab, hal tersebut memang menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah saw bersabda :

الإمام راع وهو مسئول عن رعيته

Terjemahannya : “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)²³

Dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah saw pernah memberikan dua dirham kepada seseorang, kemudian beliau saw berkata kepadanya yang artinya :

²³ H.R. Bukhari-Muslim

“Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya belikanlah kapak, lalu gunakanlah ia untuk bekerja.” (**Al-Hadits**)

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh **Imam Bukhari** disebutkan, ada seseorang yang mencari Rasulullah, dengan harapan Rasulullah saw akan memperhatikan masalah yang dihadapinya. Ia adalah sorang yang tidak mempunyai sarana yang dapat digunakan untuk bekerja dalam rangka mendapatkan suatu hasil (kekayaan), juga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian Rasulullah saw memanggilnya. Beliau menggenggam sebuah kapak dan sepotong kayu, yang diambil sendiri oleh beliau. Kemudian beliau serahkan kepada orang tersebut. Beliau perintahkan kepadanya agar ia pergi ke suatu tempat yang telah beliau tentukan dan bekerja di sana, dan nanti kembali lagi memberi kabar tentang keadaannya. Setelah beberapa waktu, orang itu mendatangi Rasulullah saw seraya mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau atas bantuannya. Ia menceritakan tentang kemudahan yang kini ia dapati.

Amirul Mukminin, Umar bin Khathab ra. Suatu ketika memasuki sebuah masjid di luar waktu shalat lima waktu. Didapatinya ada dua orang yang sedang berdoa kepada Allah SWT. Umar ra lalu bertanya :“Apa yang sedang kalian kejakan, sedangkan orang-orang di sana kini sedang sibuk bekerja?, Mereka menjawab :“Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT.” Mendengar jawaban tersebut, maka marahlah Umar ra, seraya berkata :“Kalian adalah oarang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.” Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari mesjid namun memberi mereka setakar

biji-bijian. Beliau katakan kepada mereka: “Tanamlah dan bertawakallah kepada Allah.”

Dari sinilah, maka para ulama menyatakan bahwa wajib atas *Waliyyul Amri* (pemerintah) memberikan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan bagian tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat. Itulah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar’iy, dan telah diterapkan oleh para pemimpin Negara Islam (Daulah Islamiyah), terutama di masa-masa kejayaan dan kecemerlangan penerapan Islam dalam kehidupan.

c) Kewajiban Memenuhi Kebutuhan Ahli Waris yang Tidak Mampu

Adalah fitrah manusia apabila ada yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam kondisi ini, kewajiban nafkah bagi orang-orang tersebut dibebankan kepada para kerabat dan ahli warisnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2.233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (233)

Terjemahnya :“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian...”²⁴

²⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa adanya kewajiban atas ahli waris. Seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya (yang tidak mampu) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maksud "*al waarits*" pada ayat tersebut, bukanlah hanya orang yang telah mendapat warisan semata, tetapi semua orang yang berhak mendapat warisan dalam semua keadaan. Rasulullah saw telah bersabda yang artinya :

“Kamu dan hartamu adalah untuk (keluarga dan) bapakmu.” (**HR. Ibnu Majah**)

Kewajiban memberi nafkah kepada isteri yang berupa pangan, sandang dan papan adalah merupakan kewajiban setiap suami. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. at-Thalaq/65 :6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (6)

Terjemahnya :“Tempatkanlah mereka (para isteri) di tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...”²⁵

Rasulullah saw bersabda yang artinya :“Mereka (para isteri)mempunyai hak atasmu agar kamu memberi makan dan pakaian kepada mereka.” (**Al-Hadits**)

“Hak mereka atas kamu adalah kamu membaguskan bagi mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka.”(**Al-Hadits**)

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

Nash-nash ini menjelaskan kewajiban suami untuk menafkahi isterinya. Selain itu kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2 :233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرْفِ (233)

Terjemahnya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu.”²⁶

Juga kewajiban anak-anak untuk menafkahi kedua orang tua mereka. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisaa/4 :36 :

وَيَالْيَدَيْنِ إِحْسَنًا (36)

Terjemahannya : “Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak.”²⁷

Rasulullah saw bersabda : “*Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang lelaki adalah sesudah kasabnya (usahnya), dan anaknya itu termasuk kasabya.*” (*Al-Hadits*)

Dari *nash-nash* ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak wajib menafkahi kedua orang tuanya. Nafkah itu menurut syara’ adalah pangan, sandang dan papan.

Jika ada yang mengabaikan kewajiban nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, sedangkan ia berkemampuan untuk itu, maka negara

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

berhak memaksanya untuk memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya. Hukum-hukum tentang nafkah ini telah banyak diulas panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh Islam.

d) Kewajiban Baitul Mal

Jika seseorang tidak mampu memberi nafkah terhadap orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, baik terhadap sanak keluarganya atau mahramnya, dan iapun tidak memiliki sanak kerabat atau mahram yang dapat menanggung kebutuhannya, maka kewajiban pemberian nafkah itu beralih kepada *baitul mal* (negara). Namun sebelum kewajiban tersebut beralih kepada negara, dalam rangka menjamin hak hidup orang-orang yang tidak mampu tersebut, maka Islam juga telah mewajibkan kepada tetangga dekatnya yang muslim untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tersebut, khususnya berkaitan dengan kebutuhan pangan untuk menyambung hidup. Dalam hal ini Rasulullah saw pernah bersabda yang artinya : *“Tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, orang yang pada malam hari tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan dan dia mengetahui hal tersebut”*.

Meskipun demikian, bantuan tetangga itu tentunya hanya bersifat sementara, sehingga wajib atas negara (*baitul mal*) untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebab memang *baitul mal* berfungsi menjadi penyantun orang-orang lemah dan butuh, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya. Dalam hal ini negara akan diminta pertanggungjawaban terhadap tanggungannya. Bisa saja infak *baitul mal* tersebut berasal dari harta zakat yang

merupakan kewajiban Syar'iy, dan diambil oleh negara dari orang-orang kaya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. at-Taubah/9 :103 & 60 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”²⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para aamil (pekerja zakat), para muallaf yang diikat hatinya, ...”²⁹

“*Al-Aamilun*” adalah para pekerja yang ditugaskan oleh negara untuk menarik zakat. Negara kemudian mendistribusikan kepada delapan golongan (*asnaf*) yang jelas-jelas tersebut dalam Al-Qur'an. Di antara mereka ada orang-orang fakir (*al-fuqaraa*) dan orang-orang miskin (*al-masaakin*), sebagaimana dalam ayat 60 surat At-taubah tersebut. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam kekurangan. Dalam hal ini negara berkewajiban menutupi kekeurangan itu dari harta benda Baitul Mal (di luar harta zakat) jika harta benda dari zakat tidak mencukupi.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

Rasulullah saw bersabda : *“Tidak ada seorang Muslim pun, kecuali aku bertanggungjawab padanya di dunia dan akhirat.* Lalu Rasulullah saw membacakan firman Allah SWT : *“Para nabi itu menjadi penanggungjawab atas diri orang-orang beriman.”* Rasul selanjutnya bersabda : *“Oleh karena itu, jika seorang mukmin mati dan meninggalkan harta warisan, silahkan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan mengambilnya. Tetapi jika dia mati dan meninggalkan hutang atau orang-orang yang terlantar, maka hendaknya mereka datang kepadaku, sebab aku adalah penanggung jawabnya.”* **(HR. Pemilik Kitab Shahih yang Enam)**

Bukan lagi sesuatu yang mengherankan, bahkan selain bertindak sebagai utusan Allah, beliau SAW pun adalah seorang kepala negara dalam sistem kehidupan, melaksanakan *al-uqubaat* (sanksi-sanksi), menegakkan *huduud*, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara tetangga Daulah Islamiyah, menyatakan perang terhadap musuh-musuh Islam, dan menghadapi segala macam intrik yang dilancarkan setiap kepala negara musuh. Tatkala beliau menyatakan : *“Siapa saja yang mati meninggalkan hutang atau ahli waris yang lemah, maka datanglah mereka kepadaku sebab aku adalah penanggungjawabnya.”*

Artinya siapapun yang meninggalkan hutang, berarti ia masuk kelompok *gharimiin*, sehingga Baitul mal akan menanggung hutangnya. Atau jika dia meninggalkan ahli waris yang lemah, misalnya anak-anak yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka datanglah kepada Rasulullah saw, yang berkedudukan sebagai kepala negara dan pemelihara urusan umat, sebab negara bertindak sebagai pemelihara urusan mereka. (Seolah-olah Rasul saw berkata):”Maka wajib atasku dan aku adalah penanggungjawabnya (rakyat) dengan mengingat kedudukanku sebagai kepala negara agar aku memenuhi semua

kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, dan papan telah dijamin oleh negara, jika ia tidak mampu memenuhinya sendiri.”

Kalau orang tersebut sudah tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada anak-anaknya serta ahli warisnya untuk memenuhi kebutuhan primernya. Bahkan Islam juga mewajibkan kepada tetangganya yang muslim untuk memenuhi kebutuhan pokok tetangganya. Jika orang-orang yang wajib menanggung nafkahnya tidak ada atau tidak mampu, baru negaralah melalui *baitul mal* yang wajib memenuhinya.

Seorang kepala negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan rakyatnya, baik atas anggota keluarganya atau anggota masyarakat yang lain. Ia harus selalu ingat dan memperhatikan sabda Rasulullah SAW: “Sungguh, Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya, apakah ia menjaga atau bahkan menyia-nyiakannya.”

Sebagai jaminan akan adanya peraturan urusan pemenuhan urusan pemenuhan kebutuhan tersebut, dan merupakan realisasi tuntutan Syari’at Islam, maka dalam tindakan yang konkrit, Umar bin Khathab telah membangun suatu rumah yang diberi nama *daar ad daqiiq* (rumah tepung). Di sana tersedia berbagai jenis tepung, korma dan barang-barang kebutuhan lainnya, yang tujuannya untuk menolong orang-orang yang singgah dalam perjalanan dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, sampai ia terlepas dari kebutuhan itu. Rumah itu dibangun di jalan antara Makkah dan Syam, di tempat yang strategis dan mudah dicari (dicapai) oleh para penyinggah jalan (musafir). Rumah yang sama, juga dibangun di jalan di antara Syam dan Hijaz.

Sistem pengaturan Islam untuk memenuhi kebutuhan ini diterapkan atas seluruh masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim yang memiliki identitas kewarganegaraan Islam, juga mereka yang tunduk kepada peraturan dan kekuasaan negara (Islam), berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan tentang orang-orang kafir dzimmi: “Mereka mendapat hak apa yang menjadi hak kita, dan mereka mendapatkan (terkena) kewajiban yang sama halnya seperti kita mendapatkan (terkena) kewajiban.” “Sesungguhnya telah kami berikan apa yang telah kami tentukan, agar darah (derajat) kita setaraf dengan darah (derajat) mereka, serta harta kita setaraf dengan harta mereka.”

Orang-orang Non-Muslim telah merasakan bagaimana pengaturan dan jaminan Islam terhadap pemenuhan kebutuhan pokok di bawah naungan daulah Islamiyah. Diceritakan dalam “*Kitab Al Kharaj*” karangan Imam Abu Yusuf, bahwa Amirul Mukminin, Umar bin Al Khathab ra., melihat seorang Yahudi tua di suatu pintu. Beliau bertanya apakah ada yang aku bantu? Orang Yahudi itu menjawab bahwa ia sedang dalam keadaan susah dan membutuhkan makanan, sementara ia harus membayar jizyah. “Usiaku sudah lanjut”, katanya. Amirul Mukminin berkata : “Kalau begitu keadaanmu, alangkah tidak adilnya perlakuan kami. Karena kami mengambil sesuatu darimu di saat mudamu dan kami biarkan kamu di saat tuamu.”

Setelah berkata demikian, Khalifah Umar bin Khathab lalu membebaskan pembayaran jizyah Yahudi tersebut, dan memerintahkan Baitul mal menanggung beban nafkahnya beserta seluruh orang yang menjadi tanggungannya.

Di masa Khalid bin Walid, terhadap penduduk al Hairah, yang beragama Nasrani dan merupakan ahlu dzimmah, diterapkan suatu kebijaksanaan, bahwa jika ada orang tua yang lemah, tidak mampu bekerja, tertimpa kemalangan, atau ia jatuh miskin, hingga kaumnya memberikan sedekah kepadanya, maka ia dibebaskan dari tanggungan jizyah dan ia menjadi tanggungan *Baitul mal* kaum muslimin, selama ia tinggal di daarul hijrah atau daarul Islam.

e) Kewajiban atas Seluruh Kaum Muslimin

Jika baitul mal, yang merupakan kas perbendaharaan negara dalam keadaan krisis, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat, maka kewajiban itu beralih kepada seluruh kaum muslimin. Allah SWT berfirman dalam Q.S. asz Dzariyaat/ 51 :19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya :“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”³⁰

Rasulullah SAW bersabda: yang artinya “Sesungguhnya pada harta benda itu ada hak (untuk diambil) diluar zakat.” (HR Turmudzi) “Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban terhadap orang-orang muslim yang berkecukupan atas harta mereka, tergantung banyaknya orang-orang fakir yang ada di sekitar mereka. Tidaklah orang-orang fakir itu akan terpayah-payah dan sengsara hidupnya, tatkala mereka lapar dan telanjang, kecuali karena ulah orang-orang kaya itu juga. Jika mereka (orang-rang kaya itu) tidak memperhatikan urusan mereka, maka Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang berat, dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.” (Al Hadits).

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

Sementara itu, negara berkewajiban mengumpulkan harta benda dari kaum muslimin, mengambil harta benda berlebih dari orang-orang kaya – sebagai kelebihan atas pemenuhan kebutuhan mereka, sebanyak keperluan orang-orang yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dan mengatur urusan mereka. Sebab, memang negara memiliki wewenang, secara syar'i, untuk melakukan itu. Allah SWT berfirman Q.S. al-Baqarah/ 2 :219 dan Q.S. al-Hasyr/ 59 :7:

وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :“Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan.”³¹

Arti “*al ‘afwu*” adalah sesuatu yang berlebih dari kebutuhan.

أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya :“... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...”³².

Artinya, tidak boleh harta benda hanya berputar di kalangan sekelompok orang, dengan menutup kesempatan orang lain untuk mendapatkannya. Rasulullah SAW telah mengambil sebagian harta milik orang-orang kaya Bani Nadhir dan membagi-bagikannya kepada sahabat Muhajirin yang fakir, berdasarkan firman Allah: “bagi orang-orang fakir dari kaum Muhajirin”

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang :Toha Putra, 1989)

Beliau tidak membagikannya kepada kaum Anshar, padahal mereka penduduk Madinah, kecuali terhadap dua orang Anshar, yaitu Abu Dujanah (Samak bin Khasah) dan Sahal bin Hanif. Padahal, sebenarnya kaum Anshar adalah orang-orang yang juga berhak mendapat bagian. Semua itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai realisasi pengamalan perintah Allah SWT dan dua ayat terdahulu (ayat 29 surat Al Baqarah dan ayat 7 surat Al Hasyr).

Sayidina Umar ra, pernah berkata:“Seandainya dari dulu saya punya pendapat seperti pendapat saya sekarang, pasti telah aku ambil kelebihan harta benda orang-orang kaya dan aku bagikan (kembalikan) kepada orang-orang fakir.”

Pengambilan kelebihan harta orang-orang kaya dari kaum muslimin untuk menutupi kebutuhan orang-orang miskin tersebut, semata-mata dilakukan negara jika Baitul mal tengah dilanda krisis. Tetapi, jika krisis itu telah hilang, dan Baitul mal dalam keadaan berkecukupan, maka pengambilan itu harus dihentikan.

Itulah hukum-hukum Syari’at Islam, yang memberikan alternatif cara pemenuhan kebutuhan hidup dan mewujudkan kesejahteraan bagi tiap individu masyarakat, dengan cara yang agung dan mulia. Hal itu akan mencegah individu-individu masyarakat yang sedang dililit kebutuhan untuk berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan menghinakan diri (meminta-minta).

4. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Jasa (Keamanan, Kesehatan dan Pendidikan)

Terhadap pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa yakni keamanan, pendidikan dan kesehatan maka dalam hal ini negara secara langsung memberikan jaminan kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum” (*ri’ayatu asy syu-uun*) dan

kemaslahatan hidup terpenting. Dalam hal ini, negara berkewajiban mewujudkan pemenuhannya terhadap seluruh rakyat. Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara. Negaralah yang harus mewujudkannya, agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim. Baik kaya atau miskin. Seluruh biaya yang diperlukan, ditanggung oleh baitul mal.

a) Jaminan Keamanan

Rasulullah saw sebagai kepala negara memberikan keamanan kepada setiap warga negara (muslim dan kafir dzimmiy) sebagaimana sabdanya yang artinya : “Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan Laa ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Apabila mereka telah melakukannya (masuk Islam atau tunduk kepada aturan Islam) maka terpelihara oleh-Ku darah-darah mereka, harta-harta mereka kecuali dengan jalan yang hak. Dan hisabnya terserah kepada Allah. (Al-Hadits)

b) Jaminan Kesehatan

Mauquqis, Raja Mesir, pernah menugaskan (menghadiahkan) seorang dokter (ahli pengobatan)nya untuk Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW, dokter tersebut dijadikan sebagai dokter kaum muslimin dan untuk seluruh rakyat, dengan tugas mengobati setiap anggota masyarakat yang sakit.

Tindakan menjadikan dokter tersebut sebagai dokter kaum muslimin, menunjukkan bahwa hadiah tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi. Hadiah semacam itu bukanlah khusus diperuntukkan bagi beliau, tetapi untuk kaum muslimin, atau untuk negara.

Lain halnya apabila hadiah tersebut dipakai oleh beliau pribadi, seperti selimut bulu dan keledai hadiah dari Raja Aikah, misalnya, maka hadiah seperti itu memang khusus untuk pribadi, bukan untuk seluruh kaum muslimin.

Demikianlah, pemanfaatan dan penentuan Rasulullah SAW terhadap suatu hadiah yang diterimanya, telah menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk hadiah yang bernilai khusus pribadi dan untuk kemaslahatan umum. Juga bagaimana bentuk suatu hadiah yang diberikan kepada kepala negara, wakil atau penggantinya yang hadiah itu masuk ke dalam kekayaan baitul mal dan untuk seluruh kaum muslimin, marilah kita simak kisah tersebut.

Rasulullah SAW pernah sangat marah kepada seorang pegawai negara yang mewakili beliau dalam pengambilan zakat. Orang tersebut ternyata telah menerima hadiah dari seseorang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Urwah bin Zubair, dari Abi hamid as Sa'idy ra, bahwa Rasulullah SAW telah mempekerjakan salah seorang dari suku Azad untuk mengambil Zakat Bani Sulaim. Ketika ia kembali dengan membawa sejumlah harta, maka Rasulullah menghitungnya.

Orang tersebut berkata kepada Rasul SAW: “Ini adalah untukmu dan ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku” Mendengar pengakuan tersebut, Nabi SAW berkata: “Apakah tidak lebih baik jika engkau duduk-duduk saja di rumah ibumu sampai hadiah itu datang padamu? (Apakah mungkin hadiah itu akan datang bila engkau duduk-duduk di rumah ayah-ibumu?)”.

Seketika itu juga beliau sendiri dengan maksud untuk menjelaskan aspek hukum Islam tentang masalah tersebut kepada orang banyak. Setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, beliau berkata: “Bagaimana mungkin ada seorang laki-laki yang telah aku pekerjakan mengerjakan suatu tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Kemudian ia berkata: Ini kuserahkan

kepadamu, dan ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku. Apakah tidak lebih baik jika ia duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya sampai hadiah itu datang kepadanya? (Apakah mungkin hadiah itu akan datang bila engkau duduk-duduk di rumah ayah-ibumu??). Demi Dzat dan jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidaklah aku menugaskan seseorang atau suatu pekerjaan yang telah dipercayakan Allah kepadaku, kemudian ia berlaku curang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan memikul unta yang mulutnya tak henti-hentinya meneteskan busa, atau sapi yang terus-terusan mengauk, atau kambing yang tak berhenti mengeluarkan kotoran.” Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya ke langit, hingga tampak putih ketiakanya, seraya berkata: “Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan, Ya Allah, saksikanlah!”.

Pada masa lalu, Daulah Islamiyah telah menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Ia telah berhasil menjamin kesehatan masyarakat, mengatasi dan mengobati orang-orang sakit, serta mendirikan tempat-tempat pengobatan. Rasulullah SAW pernah membangun suatu tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan membiayainya dengan harta baitul mal.

Pernah serombongan orang berjumlah delapan orang dari Urairah datang mengunjungi Rasulullah SAW di Madinah. Mereka kemudian menyatakan keimanan dan keislamannya kepada Rasulullah, karena Allah. Di sana, mereka terserang penyakit dan menderita sakit limpa. Rasulullah SAW memerintahkan mereka beristirahat di pos penggembalaan ternak kaum Muslimin milik Baitul mal, di sebelah Quba', di tempat yang bernama “Zhi Jadr”. Mereka tinggal di sana

hingga sembuh dan gemuk kembali. Mereka diijinkan meminum susu binatang-binatang ternak itu (onta), karena mereka memang berhak.

Dalam buku “*Tarikhul Islam as Siyasi*” diceritakan bahwa Sayyidina Umar ra telah memberikan sesuatu dari baitul mal untuk membantu suatu kaum yang terserang penyakit lepra di jalan menuju Syam, ketika melewati daerah tersebut.

Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh para Khalifah dan wali-wali (para pemimpin wilayah). Bahkan, Khalifah Walid bin Abdul Malik telah khusus memberikan bantuan kepada orang-orang yang terserang penyakit lepra.

Dalam bidang pelayanan kesehatan ini, Bani Ibnu Thulun di Mesir, memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat untuk mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman-minuman dan obat-obatan serta, dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis kepada orang-orang sakit.

Jadi, keberadaan dokter di tengah masyarakat, terpecahnya problema kesehatan masyarakat, dan pembangunan sarana atau balai-balai kesehatan, adalah tugas-tugas yang dibebankan Islam terhadap negara. Negaralah yang bertanggung jawab terhadap perwujudan semua itu.

c) Jaminan Pendidikan

Demikian halnya dengan masalah pendidikan menjadi tanggung jawab negara untuk menanganinya, dan termasuk kategori kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat. Gaji guru,

misalnya, adalah beban yang harus dipikul negara dan pemerintah dan diambil dari kas baitul mal.

Rasulullah SAW juga telah menetapkan kebijakan terhadap para tawanan perang Badar. Beliau katakan bahwa para tawanan itu bisa bebas sebagai status tawanan, apabila seorang tawanan telah mengajarkan 10 orang penduduk Madinah dalam baca-tulis. Tugas itu menjadi tebusan untuk kebebasan dirinya.

Kita mengetahui bahwa barang tebusan itu tidak lain adalah hak milik baitul mal. Tebusan itu nilainya sama dengan harta pembebasan dari tawanan lain dalam perang Badar itu. Dengan tindakan tersebut (yakni membebaskan pembebasan tawanan itu ke baitul mal dengan cara menyuruh para tawanan tersebut mengajarkan kepandaian baca-tulis), berarti Rasulullah SAW telah menjadikan biaya pendidikan itu setara dengan barang tebusan. Artinya, beliau SAW, memberi upah kepada para pengajar itu dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik Baitul mal.

Ad-Damsyiqy menceritakan suatu kisah dari Al Wadliyah bin Atha', yang mengatakan bahwa di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Oleh Khalifah Umar Ibnu Al Khathab, atas jerih-payah itu beliau memberikan gaji kepada mereka sebesar 15 dinar setiap bulan (satu dinar = 4,25 gram emas).

Pendidikan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Sementara negara berkewajiban menjadikan saran-sarana dan tempat-tempat pendidikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah” (HR Thabrani)

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga masyarakat, berupa pangan, sandang, papan. Demikian juga Islam telah menjamin terselenggaranya penanganan masalah kesehatan dan pendidikan.

Dijadikannya semua itu sebagai kewajiban negara dan bagian dari tugasnya sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Negaralah yang melaksanakan dan menerapkannya berdasarkan kebijakan politik ekonomi yang bersumber dari syari'at Islam.

D. Kelangkaan (*scarcity*), Nilai (*value*) dan Harga (*price*) dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan pada bab ini, bahwa politik ekonomi islam atau sistem ekonomi islam ditegakkan pada tiga pilar, yaitu: kepemilikan (*tamalluk*), pemanfaatan kepemilikan (*atsharruf al-milkiyah*) dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia (*thauzy tsarwah bayna-nas*).

Fokus perhatian dan pembahasan para ekonom muslim berpusat seputar persoalan-persoalan yang di sebutkan dalam ketiga pilar politik ekonomi islam tersebut. Kepemilikan harta mencakup pembahasan tentang siapa sebenarnya yang menjadi pemilik hakiki seluruh harta yang ada di bumi, bagaimana cara memperoleh harta, dari sana akan jelas siapa sesungguhnya yang berhak memanfaatkan kekayaan-kekayaan yang ada, apakah individu, kolektif atau Negara. Pembahasan seputar pemanfaatan kepemilikan meliputi pembahasan tentang pengembangan harta yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitas,

serta bagaimana menggunakan harta yang dimiliki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Sedangkan pembahasan tentang distribusi harta meliputi pembahasan seputar mekanisme yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia.

Fokus perhatian dan pembahasan para ekonom muslim di atas berangkat dari pemahaman bahwa problem utama dalam bidang ekonomi tidak lahir dari kondisi awal penciptaan yang melahirkan kelangkaan (*scarcity*) dan pada saat yang sama harus berhadapan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Problem utama dalam bidang ekonomi dalam perspektif ekonomi islam tidak lahir dari kelangkaan alat-alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak mencukupi, akan tetapi problem utama dalam bidang ekonomi yang sesungguhnya lahir dari proses distribusi alat-alat pemuas kebutuhan manusia.

1. Kelangkaan (*scarcity*), bukanlah problem utama dalam bidang ekonomi.

Memahami tentang apa sebenarnya yang menjadi problem utama yang dihadapi oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupannya memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya manusia melahirkan pemikiran dan pandangan untuk mendapatkan sebuah solusi yang tepat mengatasi berbagai problem yang ada. Dalam kenyataanya manusia dalam kehidupan diperhadapkan oleh berbagai macam problem atau persoalan. Dan berdasarkan sifatnya problem yang dihadapi manusia akan dikategorikan menjadi beberapa bagian, ada problem utama atau problem dasar, yaitu persoalan utama yang menjadi sumber lahirnya persoalan-

persoalan yang lain. Selanjutnya problem cabang atau problem sekunder dan berbagai macam masalah yang disebabkan oleh adanya problem utama.³³

Penyelesaian terhadap problem utama yang dihadapi dalam berbagai bidang kehidupan manusia akan menempati fokus perhatian utama dan paling urgent untuk segera diselesaikan, karena penyelesaian problem cabang akan sangat dipengaruhi oleh penyelesaian terhadap problem utama atau problem dasar. Sebagai contoh sederhana, bagaimana seorang dokter menyembuhkan sebuah penyakit melalui resep dokter yang akan diberikan kepada seorang pasien. Proses tersebut akan melalui sebuah diagnosa untuk mencari problem sebab, selanjutnya berdasarkan problem sebab yang telah diketahui, barulah melangkah untuk menyelesaikan problem akibat. Misalnya sang pasien menderita sesak napas, pusing, mual dan seterusnya, setelah diketahui bahwa problem utama (problem sebab) yang menimbulkan berbagai keluhan sakit (problem akibat) terhadap pasien adalah kerusakan pada fungsi hati, maka tindakan pengobatan yang akan menjadi fokus dan perhatian utama dalam pengobatan tersebut adalah mengobati dan memperbaiki fungsi-fungsi hati yang rusak dan terganggu, seiring dengan selesainya problem utama (problem sebab), maka problem akibat juga akan terselesaikan dengan sendirinya.

Demikian pula dalam bidang ekonomi, pemahaman terhadap persoalan utama atau persoalan mendasar terhadap problem ekonomi yang dihadapi akan menjadi jalan yang sangat penting dalam proses penyelesaian terhadap berbagai problem-problem cabang dalam ekonomi. Dari sini, sehingga sangat penting

³³ Dwi condro triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, h.233

untuk memahami bahwa problem dasar atau problem utama dalam bidang ekonomi dalam perspektif ekonom muslim tidak terletak pada kelangkaan (*scarcity*), melainkan terletak pada problem distribusi.

Jika dilakukan penelaahan secara komprehensif, sesungguhnya alat-alat pemuas kebutuhan manusia ada yang disediakan langsung oleh alam. Artian ada yang langsung dapat digunakan tanpa memerlukan usaha manusia dan ada juga alat-alat pemuas kebutuhan manusia yang memerlukan usaha manusia dalam bentuk kreatifitas yang melibatkan modal dalam prosesnya, baik berupa uang, tenaga, waktu, keahlian dan seterusnya. Sehingga kadang kala manusia memang secara realitas akan diperhadapkan pada problem keterbatasan beberapa alat-alat pemuas kebutuhan, tetapi itu semua bukanlah disebabkan oleh adanya faktor kelangkaan, dalam artian ketidak mampuan alam sejak dari awal untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebab pandangan demikian beretantangan dengan fakta yang ada, sekaligus bertentangan dengan akidah umat islam dan mengingkari firman Allah SWT dlm QS Al-Hijr/ 15:19.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

Terjemahnya :Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.

Maknanya Allah swt telah menjamin, bahwa segala sesuatu yang telah diciptakannya di bumi sesuai dengan ukuran dan kebutuhaannya, sehingga manusia tidak boleh berpandangan, bahwa apa yang disiapkan Allah kurang atau langka.

2. Nilai (*value*) adalah sesuatu yang bersifat hakiki, bukan sekedar asumsi.

Nilai barang dan jasa dalam perspektif ekonomi islam diukur berdasarkan manfaat atau kegunaan yang diberikan suatu barang atau jasa bagi kehidupan manusia. Dalam bahasa hukum syara'-nya adalah seberapa besar maslahah yang ditimbulkan ketika sebuah barang atau jasa digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Nilai atau maslahah itu bersifat pasti atau hakiki, bukan bersifat nisbi atau asumsi. Artinya sesuatu itu dikatakan memiliki maslahah, sangat tergantung dari manfaat atau kegunaannya secara real dalam kehidupan manusia, bukan sekedar asumsi.³⁴ Demikian juga maslahah itu tidak disandarkan secara personal, tetapi selalu dikaitkan dengan interaksi yang ditimbulkannya ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Semakin besar manfaat dan kegunaannya suatu barang (*goods*) dan jasa (*services*) bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif (bagi masyarakat), maka semakin tinggi nilai (*value*) yang dimilikinya. Sebaliknya, tidak lah bisa dikatakan sesuatu itu memiliki nilai dalam perspektif ekonomi islam, apabila suatu barang dan jasa hanya bermanfaat bagi individu tertentu, sementara merugikan bahkan merusak bagi kehidupan dan interaksi kehidupan manusia secara luas.

Berkenaan dengan penjelasan di atas, terdapat sebuah hadist yang berasal dari Az-Zahaby di riwayatkan dari Jarir Ibnu Abdillah Al-muhdisi, rasulullah saw bersabda :³⁵

خيرُ الناسِ أنفعُهُم للناسِ

³⁴ .Dr. Mahmud al khalidi, h.92

³⁵ Az-Zahaby, *Mizanul al-I'tidal*, h.248

Terjemahnya : Sebaik-baik manusia, adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain.

Demikianlah pandangan ekonomi islam terhadap nilai (*value*), dan dari sanalah di bangun pemikiran-pemikiran tentang barang dan jasa yang dianggap sebagai komoditas yang bernilai ekonomi (*economic goods and economic service*). Bukan berdasarkan naik dan turunnya harga komoditas tersebut dipasaran.

3. Harga (price), bukanlah bukan satu-satunya pengendali produksi, konsumsi dan distribusi.

Harga dalam pandangan ekonomi islam adalah standar yang digunakan oleh produsen dan konsumen untuk memudahkan terjadinya pertukaran barang atau jasa dengan menggunakan standar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Harga dalam pandangan ekonomi islam, bukanlah satu-satunya alat pengendali dalam produksi. Artinya seorang produsen bisa jadi terdorong untuk memproduksi suatu komoditas, adakalanya karena harga dan adakalanya bukan karena harga.

Seorang muslim memahami bahwa sebuah perbuatan adakalanya dilakukan karena berharap imbalan berupa materi, adakalanya karena berharap imbalan yang lain berupa pahala misalnya. Jadi imbalan berupa materi tersebut bukanlah satu-satunya kompensasi yang hendak diraih dalam melakukan perbuatan. Adakalanya perbuatan itu dilakukan karena motivasi materi (*Quwah maadiyah*), motivasi psikologis (*Quwah ma'nawiyah*), motivasi spiritual (*Quwah*

ruhiyyah).³⁶ Sehingga kadang seorang produsen melakukan aktivitas produksi untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan materi, namun tak jarang mereka melakukan aktivitas produksi berjam-jam, sehari-hari, bahkan berbulan-bulan, dengan jumlah yang sangat besar, bukan untuk dijual agar mendapatkan nilai materi atau finansial, tetapi untuk dizakatkan menunaikan sebuah amal *fardu*, atau diinfak dan disedekahkan untuk menunaikan amal *mandub*, atau untuk dihibahkan atau dihadiahkan untuk melakukan *taqarruf*.

Demikian pula harga bukanlah satu-satunya penentu *supply and demand*, karena ekonomi islam membatasi seorang produsen hanya memproduksi hal-hal yang bermanfaat dalam artian memberikan maslahah dan tidak memproduksi yang sebaliknya. Akan halnya dari sisi konsumen tidak hanya menjadikan harga sebagai satu-satunya tolok ukur dalam mengkonsumsi barang atau jasa, tetapi konsumen akan melihat sejauh mana barang dan jasa adalah komoditas yang baik dan halal serta memberikan maslahah bukan hanya untuk dirinya secara personal, tetapi juga terhadap interaksi yang ditimbulkannya ditengah masyarakat.

Adapun dalam aspek distribusi, ekonomi islam memandang mekanisme harga bukanlah satu-satunya alat yang adil dalam distribusi, sebab islam mengharuskan seluruh manusia harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sampai pada level pemenuhan *basic needs* (kebutuhan primer). Hal tersebut ditempuh dengan dua cara, yaitu : *pertama*, melalui mekanisme pasar, yakni dengan berinvestasi dalam proses produksi, atau ikut dalam proses produksi dan mendapatkan upah. *Kedua*, melalui mekanisme non pasar, yakni dengan

³⁶ Muhammad Muhammad Ismail, *Bunga rampai pemikiran islam*, h.112

pemenuhan melalui zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang diambil dari harta kaum muslimin, atau bantuan tunai yang berasal dari *baitul mall* yang diwajibkan bagi Negara terhadap mereka-mereka yang tidak mampu bekerja karena berbagai macam sebab dan tidak memiliki keluarga yang menanggung. Berkenaan dengan hal tersebut rasulullah saw bersabda³⁷ :

الإمام راع ومسئول عن رعيته

Terjemahnya : Imam (kepala Negara) adalah pengembala (yang mengurus dan mengatur kebutuhan rakyatnya) dan mereka akan ditanyakan perihal rakyat yang di gembalakannya.(HR.Abdullah ibnu Umar)

Demikianlah pandangan sistem ekonomi islam tentang harga, bahwa harga hanyalah salah satu dari mekanisme distribusi yang telah ditetapkan dalil-dalil syara. Selain harga, sistem ekonomi islam menetapkan mekanisme yang lain yang tidak berhubungan dengan harga (mekanisme pasar) sebagai mekanisme distribusi yang disebut dengan istilah mekanisme distribusi non ekonomis yang diwajibkan baik kepada individu muslim, maupun kepada pemerintah dan negara. Penjelasan secara detail dan sistematis tentang perkara tersebut dapat dilihat dalam gambar mekanisme distribusi harta dalam sistem ekonomi islam.³⁸

³⁷ Shahih Bukhari, *Bab al-Jamaah*, no.853

³⁸ Lihat lampiran 2

BAB VI

**KRITIK EKONOMI ISLAM TERHADAP IDE KELANGKAAN, TEORI
NILAI DAN TEORI HARGA PERSPEKTIF POLITIK EKONOMI
KAPITALISME**

A. Kritik Terhadap Sistem ekonomi Kapitalisme/ Political Economic Capitalisms

Sistem ekonomi kapitalisme atau dalam istilah yang lain ekonomi politik kapitalisme adalah seperangkat peraturan yang disusun dalam rangka menyelesaikan berbagai problem ekonomi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Mulai dari problem keterbatasan alat-alat pemuas kebutuhan yang dianggap sebagai problem utama/mendasar sampai kepada problem cabang/sekunder tentang konsumsi dan mekanisme distribusi dalam bidang ekonomi yang terpancar dari pandangan hidup atau ideologi sekular. Adanya problem utama/ mendasar di atas, pada gilirannya melahirkan problem cabang/ sekunder atau disebut problem akibat berupa problem produksi, konsumsi dan distribusi yang meliputi mekanisme pemilikan sumber-sumber produksi, pengembangan faktor produksi dan mekanisme distribusi kekayaan dan hasil-hasil produksi ke tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana telah di bahas pada bab-bab sebelumnya, penyelesaian terhadap berbagai problem ekonomi di dalam pandangan ekonomi kapitalisme, adalah upaya untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang dianggap paling urgent yaitu : *what ?* menyangkut apa dan berapa yang diproduksi, *how?* bagaimana cara memproduksi, dan yang terakhir adalah *for whom?* Siapa dan untuk siapa aktivitas produksi itu dilakukan. Ketiga pertanyaan di atas adalah solusi sekaligus jawaban terhadap

problem utama yang harus dipecahkan dalam pandangan mereka, yakni kelangkaan serta fungsi dan peran yang dimiliki oleh teori nilai dan teori harga dalam penyelesaian problem produksi sebagai solusi satu-satunya terhadap problem utama dalam bidang ekonomi.

Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap berbagai ide, teori dan pandangan-pandangan ekonomi kapitalisme?

1. Kerusakan Akidah Sekularisme yang Melahirkan Sistem Ekonomi Kapitalisme.

Sistem ekonomi kapitalisme lahir dari sebuah pandangan hidup sekular. Sekularisme adalah sebuah kaidah berpikir yang menyakini keharusan untuk memisahkan antara kehidupan dunia dan agama. Maka sudah pasti kaidah berpikir dan pandangan hidup yang demikian bertentangan dengan kaidah berpikir dan pandangan hidup seorang muslim.

Akidah islam yang menjadi landasan ekonomi islam tidak sejalan dengan akidah sekularisme yang menjadi landasan ideologis dari sistem ekonomi kapitalisme. Karena islam telah mengajarkan kepada manusia mengenai kewajiban untuk mengimani secara mutlak bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan ini memiliki pencipta, dialah Allah SWT Zat yang maha menciptakan apa yang ada dilangit dan dibumi.

Di samping keyakinan bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan diciptakan oleh Allah SWT, yang berarti menyangkut keyakinan atas apa yang ada sebelum kehidupan dunia ini, akidah islam juga memahamkan manusia tentang apa

yang ada setelah kehidupan dunia ini berakhir, yaitu akan adanya hari kebangkitan (*yaumul baats*). Dan tidak berhenti sampai disitu, akidah islam juga menjelaskan tentang hubungan antara apa yang ada sebelum kehidupan dan setelah kehidupan dunia ini berakhir, berupa hari pembalasan (*yaumul hizab*).

Karena itu, seorang muslim ketika menjalani seluruh aktivitas kehidupanan dalam seluruh dimensi harus mengikuti petunjuk yang telah diturunkan oleh sang maha pencipta, yakni al-Qur'an dan rasul pembawah risalahnya, dialah rasulullah Muhammad saw. Oleh karena itu kehidupan manusia didunia ini harus terikat pada syariat yang merupakan sekumpulan aturan berupa perintah dan larangan dari sang pencipta dan rasul yang membawah risalahnya, serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya. Tidak sebagaimana yang diajarkan akidah sekularisme yang menjadikan akal sebagai satu-satunya kaidah berpikir dalam menjalani kehidupan.

Demikian halnya pada aspek ekonomi, dalam hukum-hukum syariat ada petunjuk berupa perintah dan larang. Ada yang disampaikan kepada manusia secara rinci dan ada yang global, pada petunjuk yang disampaikan secara rinci tugas manusia sebatas memahami apa yang diperintah atau yang dilarang untuk dilaksanakan. Dan pada petunjuk yang global, tugas manusia untuk merincinya agar dapat dijadikan pedoman dalam aktivitas kehidupan.

Sebagai contoh petunjuk syariat dalam bidang ekonomi yang berbentuk global sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Baqorah/2:29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat di atas kita dapat memahami bahwa Allah SWT telah menciptakan seluruh isi bumi bahkan langit untuk dimanfaatkan oleh manusia. Petunjuk di atas menggunakan bentuk kalimat yang masih umum, belum ada bentuk rincian dari Allah tentang bagaimana tata cara pemanfaatan isi bumi dan langit.

Jika penyerahan pengelolaan bumi dan seluruh isinya kepada manusia tanpa disertai dalil-dalil syariat yang menjelaskan rinciannya, maka para ulama ushul menetapkan *kaedah syara'* sebagai berikut:

دليل العام يبقي في عمومه ما لم يرد دليل التخصيص

Terjemahnya : Dalil yang umum akan tetap pada keumumannya, selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya.

Jadi selama tidak didapati dalil-dalil syariah yang merinci tentang bagaimana tata cara memanfaatkan isi bumi, semisal buah-buahan, binatang, tamanan, hutan, laut, gunung, batu, pasir, tambang dan seluruh isi bumi yang lain, maka dalil tersebut tetap berada pada keumumannya. Tidak ada penjelasan dalil secara terperinci tentang pemanfaatan sayuran dan buahan, apakah langsung dimakan atau dimasak dulu, apakah pohon yang ada di hutan langsung ditebang kemudian digunakan dalam bentuk kayu gelondongan atau harus dihaluskan, dipoles dan diukir terlebih dahulu. Termasuk pula, apabila buah-buahan, binatang dan tanaman yang lainnya itu habis

dikonsumsi dan dimanfaatkan. Tidak ada dalil terperinci yang menjelaskan tentang tata cara melakukan budi daya tanaman, tata cara beternak, tata cara reboisasi hutan dan seterusnya.

Jika Allah SWT menyerahkan bumi dan langit beserta seluruh isinya kepada manusia melalui dalil-dali yang bersifat global, maka manusia dengan kemampuan akal yang juga merupakan ketetapan Allah, akan mampu untuk merinci bagaimana tata cara bercocok tanam, beternak, melakukan reboisasi hutan dan seterusnya. Termasuk pula di dalamnya bagaimana tata cara melakukan perhitungan agar proses produksi yang diupayakan manusia dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan petunjuk dalil-dalil syariat, maka problem produksi menyangkut apa dan berapa kapasitas produksi dalam pandangan ekonomi islam diserahkan kepada kemampuan akal manusia untuk melakukan proses pengembangan dan perincian. Hal tersebut dapat dipahami dari sabda rasulullah saw

«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ».

Terjemahnya :Kalian lebih mengetahui tentang perkara yang menyangkut urusan dunia kalian (H.R. Bukhari-Muslim).

2. Mencampuradukkan Ruang Lingkup Pembahasan Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi kapitalisme memandang ekonomi sebagai sesuatu pembahasan yang menyangkut kebutuhan manusia dan alat pemuasnya. Karena itu dalam pembahasan ekonomi tidak lagi dibedakan pembahasan seputar persoalan

produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa sebagai produksi dan distribusi yang berkaitan dengan kebutuhan individu. Semuanya dibahas dalam satu pembahasan kajian ekonomi politik atau sistem ekonomi.

Para ekonom konvensional memandang persoalan barang ekonomi dan tata cara pemilikan dan mekanisme distribusinya, sebagai problem yang berasal dari sumber yang sama, maka solusinya pun diletakkan dalam kajian yang sama, tidak lagi dibedakan antara problem barang, problem dalam pengaturan kepemilikan dan problem distribusi hasil-hasil ekonomi ke tengah-tengah masyarakat.

Artinya, ekonomi kapitalisme mengintegrasikan antara ilmu ekonomi (*economic science*) dengan sistem ekonomi (*economic system*) dalam perspektif yang sama, tanpa membedakan ruang lingkup pembahasan antara keduanya.

Pandangan di atas adalah pandangan yang tidak sejalan dengan ekonomi islam, dangkal dan bertentangan dengan realitas. Karena seharusnya ruang lingkup pembahasan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi jelas berbeda. Ilmu ekonomi membahas persoalan seputar aktivitas produksi, bagaimana prosesnya, efektivitas dan efisiensinya adalah domain akal manusia, karena dalil-dalil dalam persoalan tersebut datang dalam keadaan global tanpa dirinci.

Berbeda dengan sistem ekonomi atau ekonomi politik, ruang lingkup pembahasannya terkait persoalan proses kepemilikan, cara pengelolaan dan mekanisme distribusinya, sangat tergantung terhadap pandangan hidup yang lahir dari akidah yang diyakini manusia dalam hidupnya. Sehingga jelas terdapat perbedaan

cara pandang dan kaidah berpikir yang membangun sistem ekonomi islam, kapitalisme, sosialisme dan seterusnya.

Ekonomi islam mengajarkan bagaimana proses pengelolaan harta (*tazarruf fil mall*) dan distribusi harta (*tauzy ul-mall*) harus terikat dengan mekanisme yang jelas, karena dalil-dalil syariat datang tidak dalam bentuk global melainkan disertai dengan rincian-rinciannya. Dalam aspek konsumsi dalil-dalil syariah menjelaskan secara rinci komoditas apa, dari barang dan jasa yang boleh dikonsumsi (boleh makan-minum, pakai, miliki, gunakan dst) oleh seorang muslim. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Maidah/5:2

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

Terjemahnya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.

Demikian mekanisme pengelolaan dan pengembangan harta dan pemilikan telah dijelaskan dengan dalil-dalil yang terperinci. Seperti Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqorah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Demikian pula firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisaa/6:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

3. Menekankan pada Aspek Materi Semata.

Kebutuhan manusia dalam pandangan ekonom konvensional adalah sesuatu yang bersifat materi, karena itu kajian tentang alat-alat pemuas kebutuhan manusia yang harus di penuhi dalam sistem ekonomi kapitalisme di batasi pada aspek pemenuhan yang bersifat material murni. Dengan kata lain sistem ekonomi kapitalisme memandang kebutuhan dan *utility* sebagaimana apa adanya, tidak sebagaimana mestinya yang layak dijadikan pijakan masyarakat.

Karena itu, manusia dipandang dalam kapasitasnya sebagai materi murni, dan manusia dipisahkan dari kecenderungan-kecenderungan spiritual, pemikiran-pemikiran moral dan tujuan-tujuan non-material. Sistem ini juga tidak peduli terhadap apa yang seharusnya dijadikan pijakan masyarakat, semisal ketinggian *moral force*, yakni dengan cara menjadikan kemuliaan sebagai asas interaksi.

Demikian juga ketinggian spiritual yang seharusnya mendominasi kehidupan masyarakat, yang menjadikan kesadaran akan adanya hubungan dengan sang kholik sebagai pengendali interaksi manusia dalam seluruh aspek kehidupannya dalam rangka mencapai ridho Allah SWT.

Sistem ekonomi kapitalisme tidak pernah peduli terhadap semuanya itu, karena idealismenya adalah materi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang juga bersifat materi.

Itulah sebabnya Adam Smith, peletak dasar ekonomi kapitalisme pernah mengatakan *"it is not the benevolence of the butcher that we expect our dinner, but from his regard to his own interest* (bukan dari kebaikan tukang daging kita mengharapkan makan malam kita, melainkan dari kepentingan tukang daging itu sendiri)". Artinya tidak pernah akan dijumpai manusia melakukan sesuatu karena mengharapkan kemuliaan, walaupun Nampak secara nyata mereka melakukan aktivitas yang mengharapkan nilai kemanusiaan (*qima' insaniyah*) karena motivasi yang sesungguhnya tidak lain adalah untuk meraih kepentingannya yang bersifat materi.

Sebagai contoh seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan sembako, kadang kala mereka membagi-bagikan sebagian laba mereka kepada masyarakat disekeliling toko-nya. Secara jelas Nampak perbuatan yang dilakukan olehnya adalah sebuah aktivitas untuk meraih kemuliaan dan keutamaan yang dimotivasi oleh dorongan kemanusiaan ataupun spiritual. Namun faktanya hal tersebut dilakukan tidak lain agar masyarakat disekeliling tempatnya berdagang tidak

mengganggu bahkan menjarah toko tempat dia berdagang. Demikian halnya para pengusaha, tidaklah mereka memberikan berbagai macam tunjangan (tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dst) diluar gaji pokok kepada buruh yang bekerja diperusahaanya, kecuali agar mereka lebih rajin bekerja dan selalu sehat untuk mendatangkan keuntungan yang lebih besar kepada sang pengusaha.

Demikianlah, sistem ekonomi kapitalisme tidak akan pernah mengakui berbagaimacam nilai dan norma yang ada, selain dimotivasi oleh kepentingan yang bersifat materi. Sehingga dalam pandangan mereka manusia tidak lebih sebagai "*the animal economic*" mahluk yang rela melakukan apa saja demi meraih kepentingan-kepentingan materi semata.

4. Memisahkan Barang Ekonomi dari Interaksi dalam Masyarakat

Kebutuhan yang diakui dalam sistem ekonomi kapitalisme hanyalah kebutuhan yang bersifat materi, maka alat pemuas kebutuhan yang menjadi pembahasan dalam kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi adalah alat pemuas kebutuhan yang bisa memenuhi kebutuhan fisik atau materi. Karena itu, secara defenitif, pembahasan tentang alat pemuas kebutuhan hanya ada dua, yaitu barang (*good*) dan jasa (*service*).

Adapun yang menjadi pijakan sistem ekonomi kapitalisme di dalam memberikan tolok ukur, apakah sebuah barang atau jasa layak dijadikan alat pemuas kebutuhan atau tidak, adalah kegunaan (*utility*) yang ada padanya. Kegunaan itu bersifat personal, artinya *utility* berdasarkan selera individu. Jika suatu barang atau jasa memiliki kegunaan, maka layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat ketika sistem ekonomi kapitalisme memandang kebutuhan

(*needs*) identik dengan keinginan (*want*). Komoditas ekonomi atau komoditi yang memiliki nilai ekonomis (*economic goods and services*) yang menjadikannya layak diproduksi, dikonsumsi dan didistribusi bergantung kepada keinginan manusia (*wanted*).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, sistem ekonomi kapitalisme memandang, bahwa minuman keras (miras) dan layanan sex bebas tetap akan menjadi *economic goods and services* selama masih ada yang menginginkan (*wanted*) oleh karenanya layak diproduksi, dikonsumsi dan didistribusi.

Pandangan di atas jelas keliru dan batil dalam perspektif ekonomi islam, karena seharusnya ketika menilai suatu barang atau jasa, apakah memiliki *utility* sehingga layak dianggap sebagai *economic goods and services* atau tidak, seharusnya tidak hanya melihat dari aspek apakah ada yang menginginkan atau tidak, tetapi juga harus melihat sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan barang-barang tersebut terhadap berbagai interaksi kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Inilah perkara yang seharusnya dijadikan sebagai pijakan dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Tidak boleh ada pandangan yang hanya melihat barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) apa adanya tanpa memperhatikan apa yang menjadi keniscayaan bagi masyarakat.

Karena itu, pandangan yang keliru, sesat dan batil terhadap barang dan jasa ekonomi di atas jelas akan menimbulkan dampak yang serius terhadap masyarakat. Sebab, secara pasti keberadaan barang dan jasa haram yang diproduksi, dikonsumsi

dan didistribusi tadi, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat agar hidup senang dan tenang, justru sebaliknya akan merusak kehidupan masyarakat.

Boleh jadi memproduksi barang dan jasa yang haram itu menguntungkan bagi segelintir orang dan menjadi sumber pendapatan, baik bagi produsen, konsumen atau bahkan Negara, tetapi dampak negatif (*mudharat*) yang ditimbulkan jika barang dan jasa haram tersebut tetap dan terus diproduksi, dikonsumsi dan didistribusi akan jauh lebih dahsyat. Demikianlah sistem ekonomi kapitalisme yang tidak mengindahkan hubungan erat antara barang dan jasa ekonomi dengan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan pendapatan Negara (*national income*) dan pertumbuhan ekonomi nasional, satu-satunya jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Pandangan tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan atau produksi distribusi dan konsumsi, yang dijadikan satu pembahasan yang tidak terpisah antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi berakibat, ekonomi politik kapitalisme memandang bahwa masalah produksi adalah hal utama yang harus diselesaikan, karena itulah yang dapat menyelesaikan problem utama/mendasar dalam bidang ekonomi, yakni kelangkaan. Sementara problem distribusi dianggap hanyalah sebatas problem cabang/ sekunder dan akan segera terselesaikan dengan mekanisme harga seiring dengan semakin banyaknya jumlah produksi. Inilah pandangan mereka sebagaimana telah diungkapkan dalam teori *Trickle and Down Effect*¹ dimana

¹ Teori *trickle down effect* mulai dikenal pertama kali sejak tahun 1944, kemudian tahun 1954 baru diergunakan sebagai teori. Pada tahun 1959, Mike Wallace, dalam wawancara televisidengan Ayn Rand, telah menggunakan istilah ini. Teori ini kemudian digunakan oleh Ronald Reagan dalam pidatonya pada januari 1981. Dia mengumumkan pemotongan pajak besar-besaran bagi orang-orang

dijelaskan bahwa distribusi merupakan konsekwensi dari terjadinya penumpukan kekayaan.

Oleh karena itu, sistem ekonomi kapitalisme hanya fokus pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kekayaan Negara secara total, kemudian berusaha memperoleh tingkat produksi pada level setinggi-tingginya. Ekonomi politik ini juga berusaha mewujudkan realisasi kemakmuran anggota masyarakat setinggi mungkin sebagai akibat adanya pertambahan jumlah pendapatan nasional (*national income*) dengan kenaikan produksi suatu Negara (GDP). Hal tersebut diwujudkan dengan mendorong mereka untuk mengumpulkan kekayaan, dengan cara membiarkan masyarakat sebebas-bebasnya bekerja untuk memproduksi dan mengumpulkan kekayaan.

Dengan begitu, ekonomi kapitalisme bukan dibangun untuk memenuhi kebutuhan individual masing-masing rakyat secara menyeluruh. Ekonomi, ternyata hanya terfokus pada barang-barang yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara kolektif, bukan secara individu, kepala per-kepala. Cara yang ditempu adalah dengan meningkatkan produksi dan pendapatan nasional di suatu Negara. Dengan cara meningkatkan pendapatan nasional, dengan sendirinya akan terjadi distribusi pendapatan melalui kebebasan bekerja dan memiliki harta bagi seluruh masyarakat. Karena itu seluruh masyarakat dibiarkan sebebas-bebasnya untuk memperoleh kekayaan apa saja yang mampu mereka peroleh sesuai faktor-faktor produksi yang

kaya, suatu keistimewaan yang dia klaim akan merembes keseluruh rakyat. *The mike Wallace interview with Ayn Rand*, 1959. [Http://en.wikipedia.org/wiki/trickle-down_economic](http://en.wikipedia.org/wiki/trickle-down_economic). Presiden RI, SBY dalam pidato kenegaraannya, Rabu, 19 agustus 2009 di DPD menyatakan" dalam kenyataanya di banyak Negara, termasuk di Indonesia teori ini telah gagal menciptakan kemakmuran untuk semua.

mereka miliki. Ini terjadi baik distribusi pendapatan itu dapat memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat atau hanya memenuhi sebagian orang saja, sedangkan yang lain tidak. Inilah realitas politik ekonomi (*political economic*) yang ada saat ini atau fakta ekonomi kapitalisme.

Pandangan di atas jelas keliru dan bertentangan dengan realitas. Karena itu tidak akan menghasilkan kenaikan taraf hidup masing-masing individu masyarakat secara keseluruhan dan tidak akan membawa kemakmuran. Kesalahannya terletak pada kenyataan, bahwa ragam kebutuhan yang menuntut dipenuhi adalah kebutuhan individu, yakni kebutuhan seorang manusia, orang per-orang. Bukan kebutuhan manusia, umat atau bangsa secara kolektif. Artinya, yang berupaya memenuhi kebutuhannya adalah individu, baik pemenuhannya bersifat langsung seperti makan-minum atau kebutuhan secara kolektif berupa keamanan, kesehatan, pendidikan dan seterusnya.

Dengan demikian, masalah ekonomi yang sesungguhnya terletak pada distribusi alat-alat pemuas kebutuhan kepada setiap orang, yaitu distribusi barang dan jasa kepada setiap masyarakat atau warga Negara. Bukan terletak pada ragam kebutuhan yang dituntut oleh masyarakat atau bangsa secara kolektif, tanpa melihat masing-masing individunya. Sehingga masalah yang sesungguhnya terletak pada kemiskinan individu, bukan kemiskinan Negara. Itu artinya yang menderita kemiskinan dan kekurangan secara riil adalah individu masyarakat, kepala per-kepala, bukan Negeranya. Sehingga problem yang perlu dipecahkan dalam perspektif politik

ekonomi islam adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pokok setiap orang, bukan mengejar pertumbuhan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi laju produksi dalam negeri (GDB -*gross domestic product*), atau produksi nasional (GNP-*gross national product*) tidak menjadi pokok pembahasan dalam konteks pemenuhan seluruh kebutuhan pokok orang per-orang secara menyeluruh. Akan tetapi, pokok penyelesaiannya adalah kebutuha-kebutuhan pokok manusia, sebagai seorang manusia dan tentang distribusi kekayaan bagi setiap individu masyarakat demi menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan pokok mereka secara individu per-individu. Inilah yang seharusnya yang menjadi fokus perhatian dalam politik ekonomi menurut perspektif ekonomi islam.

Sebab fakta menunjukkan, walaupun masalah kemiskinan Negara terpecahkan, masalah kemiskinan orang per-orang tidak secara otomatis terpecahkan. Sebaliknya, dengan terpecahkannya kemiskinan orang per-orang dan terdistribusinya kekayaan Negara secara baik, akan mendorong rakyat suatu Negara untuk bekerja meningkatkan pendapatan nasional (*national income*)

Secara sederhana kita bisa melihat kekeliruan rumus pertumbuhan ekonomi nasional yang diyakini sistem ekonomi kapitalisme dapat menyelesaikan masalah kemiskinan masyarakat. Seolah-olah ketika ekonomi tumbuh, dan pertumbuhan itu berjalan konstan, maka semua masalah ekonomi akan terselesaikan. Justru kenyataannya tidaklah demikian. Sebagai contoh asumsi pertumbuhan 1 persen bisa menyerap 200,000 tenaga kerja dan dengan bekerja terselesaikanlah persoalan

kemiskinan yang diderita oleh 200,000 orang itu. Ternyata asumsi tersebut secara nyata tidaklah demikian, karena pertumbuhan itu belum tentu bisa mengurangi angka kemiskinan.

Sebagai contoh, berdasarkan data BPS RI (badan pusat statistic republik Indonesia) memperlihatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 pada angka 6,23 % dan tahun 2013 pada angka 5,72%². Pendapatan perkapita rakyat indonesia tahun 2012 sekitar Rp 31,0 dan pada tahun 2013 sekitar Rp 32,5 juta. Namun di sisi lain, masih menurut data BPS jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2012 sekitar 28,7 juta jiwa atau sekitar 11,6% dan tahun 2013 sekitar 28,6 juta jiwa atau sekitar 11,5% dengan standar kemiskinan Rp.284,000/bln tahun 2012 dan Rp. 293.000/bln tahun 2013. Jadi berdasarkan data di atas, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6% dengan pendapatan perkapita sekitar Rp. 32,5 juta, penduduk Indonesia yang miskin berjumlah sekitar 28,7 juta orang. Itupun dengan angka ambang batas kemiskinan yang masih sangat rendah, yakni kurang dari Rp.300 ribu setiap bulan, bagaimana jika menggunakan standar kemiskinan WHO sekitar 2 dollar per-hari, maka jumlah penduduk miskin Indonesia bisa menembus angka 120 juta jiwa, itu berarti hampir 50% rakyat Indonesia yang berjumlah 243 juta jiwa masih berada dalam garis kemiskinan.

Data di atas telah membuktikan, bahwa menyelesaikan problem kemiskinan dengan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi secara nasional terbukti gagal. Karena

²BadanPusatStatistik(BPS)

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1%20&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1(19. oktober 2014

itu, *teori trickle and down effect*, pertumbuhan ekonomi menjamin efek rembesan ke bawah, jelas tidak terbukti dan menipu³.

B. Kritik Terhadap Ide Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga yang Menjadi Pilar-Pilar Sistem Ekonomi Kapitalisme /Political Economic Capitalism .

1. Kritik terhadap Kelangkaan (*scarcity*)

Kelangkaan (*scarcity*) sebagai kondisi awal penciptaan yang harus diperhadapkan pada kebutuhan yang tidak terbatas sebagaimana yang telah diungkapkan pada pembahasan sebelumnya, adalah merupakan problem utama/ mendasar atau dalam istilah lain disebut dengan problem sebab dalam bidang ekonomi. Itu artinya, sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa penyebab timbulnya berbagai macam problem dalam bidang ekonomi disebabkan oleh adanya faktor kelangkaan tersebut. Bahkan dikatakan oleh para ekonom konvensional, seandainya faktor kelangkaan itu tidak pernah ada, dalam arti seluruh alat pemuas kebutuhan manusia tersedia secara berlimpah di alam sebagaimana berlimpahnya udara, maka problem ekonomi dalam kehidupan manusia tidak akan pernah ditemukan dan itu berarti manusia tidak perlu disibukkan melakukan pembahasan, pengkajian dan pengembangan di bidang ekonomi.

Berangkat dari cara pandang di atas, pembahasan, pengkajian dan pengembangan bidang ekonomi di arahkan pada satu-satunya fokus utama, yaitu bagaimana cara yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah kelangkaan dan satu-

³ Presiden RI, SBY dalam pidato kenegaraannya, Rabu, 19 agustus 2009 di DPD menyatakan" dalam kenyataanya di banyak Negara, termasuk di Indonesia teori ini telah gagal menciptakan kemakmuran untuk semua.

satunya cara hanya dengan meningkatkan produksi alat-alat pemuas kebutuhan manusia pada level setinggi-tingginya. Sebab dengan mengatasi problem kelangkaan yang menjadi sebab dengan sendirinya problem cabang atau dalam istilah yang lain disebut dengan problem akibat, dalam hal ini adalah problem konsumsi dan problem distribusi akan terselesaikan dengan sendirinya. Inilah alasan, mengapa ekonomi kapitalisme disebut sebagai sistem ekonomi yang tidak memisahkan pembahasan antara sistem ekonomi dan ilmu ekonomi.

Cara pandang ekonom konvensional yang diadopsi dalam sistem ekonomi kapitalisme tentang kelangkaan dan alat pemuas kebutuhan manusia jelas merupakan pandangan yang keliru, sesat dan batil, karena itu jelas bertentangan adalah sistem ekonomi islam. Hal tersebut dapat dilihat dari dua alasan : *pertama*, karena cara pandang tersebut bertentangan dengan realitas. *Kedua*, cara pandang tersebut bertentangan dengan akidah islam.

Pandangan ekonom konvensional tentang kebutuhan manusia diatas tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab, mereka tidak melakukan klasifikasi terlebih dahulu, kebutuhan mana yang harus dipenuhi secara pasti dalam dan menjadi tempat bergantungnya kehidupan manusia dan kebutuhan yang tidak menjadi tempat bergantungnya kehidupan manusia. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi secara pasti hanyalah kebutuhan-kebutuhan primer (*basic needs*) seseorang dalam kapasitasnya sebagai manusia, bukan kebutuhan sekunder (*secondary need*) atau kebutuhan tersier (*lux*), meskipun kebutuhan sekunder dan tersier tersebut bisa saja diupayakan dan dipenuhi.

Karena itu, kebutuhan manusia berupa kebutuhan-kebutuhan primer (*basic needs*) jelas bersifat terbatas. Sehingga, kekayaan dan jeri payah (tenaga) yang disebut dengan barang dan jasa yang ada dan dimiliki oleh manusia di dunia ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer setiap manusia. Seluruh kebutuhan primer ini bisa saja dipenuhi secara menyeluruh oleh masing-masing konsumen atau individu masyarakat. Oleh karena itu tidak akan ada permasalahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (*basic needs*) tersebut. Sehingga pandangan tentang adanya permasalahan kelangkaan (*scarcity*) bahkan dijadikan sebagai problem/ permasalahan utama/ mendasar dalam bidang ekonomi adalah pandangan yang keliru.

Dalam pandangan para ekonom muslim, Masalah ekonomi itu sebenarnya terletak pada distribusi barang dan jasa kepada tiap-tiap individu, yang ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (*basic needs*) mereka secara menyeluruh, di samping membantu mereka dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder hingga kebutuhan-kebutuhan tersier mereka.

Adapun masalah yang berhubungan dengan terus bertambahnya kebutuhan-kebutuhan yang beraneka ragam itu sebenarnya tidak berhubungan dengan bertambahnya kebutuhan-kebutuhan yang primer (*basic needs*). Sebab kenyataannya kebutuhan-kebutuhan primer manusia sebagai manusia tidak akan pernah bertambah, atau bersifat statis. Kebutuhan-kebutuhan yang mungkin akan terus bertambah, semakin banyak bahkan tidak terbatas adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder (*secondary need*) dan tersier (*lux*).

Sehingga kenyataan yang menunjukkan bertambahnya kebutuhan-kebutuhan manusia seiring dengan kemajuan peradaban manusia, sebenarnya hanya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier, tidak terkait dengan kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier dapat diusahakan untuk dipenuhi oleh manusia. Namun, walaupun kebutuhan-kebutuhan tersebut tetap tidak terpenuhi, tidak akan membawahkan masalah, dalam arti tidak akan berimplikasi langsung terhadap mati dan hidupnya manusia. Berbeda dengan kebutuhan primer (*basic needs*) tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut akan menimbulkan masalah serius dalam kehidupan manusia.

Bertambahnya kebutuhan-kebutuhan sekunder atau tersier itu adalah masalah yang lain yang berhubungan dengan komunitas masyarakat yang hidup pada suatu daerah tertentu, tidak berhubungan dengan hidup salah satu dari anggota komunitas daerah tersebut. Masalah ini akan terpecahkan dengan dorongan alami atau bersifat fitrah yang ada pada diri manusia, dengan kemampuan akal yang dianugerahkan pencipta, manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Dorongan alami yang muncul karena adanya pertambahan kebutuhan-kebutuhan sekunder atau tersier ini akan mendorong manusia untuk berusaha menambah kuantitas alat-alat pemuas yang dimilikinya. Adakalanya hal itu dilakukan dengan mengeksploitasi atau mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di negaranya, atau dengan cara bekerja di Negara lain, atau dengan memperluas usaha dan melakukan kerjasama di Negara lain.

Karena itu, kaidah ekonomi yang harus ditetapkan adalah kaidah yang menjamin distribusi kekayaan Negara, baik di dalam maupun di luar negeri, kepada seluruh individu masyarakat. Kaidah ini harus dapat menjamin masing-masing orang dapat pemenuhan kebutuhan primernya secara menyeluruh dan dibantu untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersiernya. Jadi jelas bahwa dalam perspektif ekonomi islam, problem kelangkaan (*scarcity*) bukanlah problem utama/mendasar atau dengan kata lain sebagai problem sebab yang mengakibatkan lahirnya permasalahan ekonomi di tengah kehidupan masyarakat, melainkan bagaimana setiap kebutuhan primer (*basic needs*) individu per-individu, orang per-orang dapat terpenuhi. Karena itu dalam sistem ekonomi islam ditetapkan sebuah kaedah yang dapat menjamin terdistribusinya kekayaan Negara kepada seluruh individu masyarakat guna memenuhi kebutuhan primer dan membuka peluang sebesar-besarnya bagi tiap individu dimasyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Ekonomi islam mengajarkan, problem utama bidang ekonomi bukanlah karena adanya faktor kelangkaan, sebab kelangkaan hanyalah problem cabang yang akan terpecahkan dengan sendirinya melalui dorongan fitrawi dan kemampuan akal yang telah dianugerahkan oleh sang pencipta. Adapun problem distribusi dan konsumsi tidak boleh diserahkan sepenuhnya berjalan mengikuti akal manusia, sebab apabila hal itu terjadi maka pastilah akan terjadi kerusakan dalam kehidupan manusia. Cara pandang demikian berhubungan erat dengan pandangan hidup dan idiologi yang spesifik dan berbeda bagi setiap umat sesuai dengan akidah yang diyakininya.

Menurut pandangan para ekonom muslim, bertambahnya produksi hanya meningkatkan kuantitas kekayaan secara domestik, tetapi tidak menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan semua individu secara menyeluruh dimasyarakat. Kadang sebuah Negara memiliki tingkat pertumbuhan produksi yang tinggi dan kekayaan alam yang melimpah, seperti Irak, Iran, Kanada, Libya, Italia, dan indonesia tetapi kebutuhan pokok rakyatnya tidak terpenuhi secara menyeluruh, kemudian mereka dibantu untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersiernya.⁴

Karena itu, sesungguhnya kemiskinan dan kekurangan yang menuntut untuk diselesaikan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer manusia sebagai manusia, bukan kebutuhan-kebutuhan yang terus bertambah seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Yang harus diselesaikan adalah kemiskinan dan kekurangan yang menimpah anggota masyarakat, dimana problem tersebut akan terpecahkan dengan sebuah mekanisme pendistribusian kekayaan Negara kepada setiap individu.⁵

Dr Isa Abduh, seorang ekonom muslim dalam karyanya yang berjudul *al-Islamiy: Madkhal wa Minhaj* (Ekonomi Islam: Sebuah pengantar dan metodologi), mengemukakan pembahasan yang menyoroti perbedaan antara fenomena kelangkaan dan ketercukupan. Beliau menjelaskan, bahwa kelangkaan bukan merupakan salah satu kondisi asal penciptaan, melainkan hanya sekedar fenomena yang bisa dikembalikan kepada sebab-sebab yang akan diketahui oleh para ekonom dengan sedikit perenungan.

⁴ Dr.Mahmud al Khalidi, *Kerusakan dan bahaya sistem ekonomi kapitalis*, h.79

⁵ Taqiuddin an Nabhani, h.24

Sementara ekonomi islam menyatakan, bahwa kondisi asal penciptaan adalah ketercukupan, baik ketercukupan secara mutlak ataupun relatif. Hal tersebut merupakan ketetapan Allah yang maha bijaksana dan maha perkasa diluar jangkauan manusia, untuk menciptakan manusia dan mahluk hidup yang lain dengan ketersediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan mereka secara menyeluruh. Sementara kelangkaan relatif hanyalah sebuah fenomena yang akan datang dan hilang.

Beliau kemudian menyatakan, bahwa seorang muslim haruslah menyakini secara pasti bahwa kondisi asal dalam kehidupan ini adalah ketercukupan dan kemampuan bumi untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan manusia. Allah swt berfirman dalam al-qur'an Q.S. Fushilat/ 40:9-10

قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً
لِّلسَّائِلِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya : Katakanlah: "Sesungguhnya Patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya? (yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam". 10. dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.

Demikian pula firman Allah dlm QS Al-Qashash/ 28 :60

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ



Terjemahnya :Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, Maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka Apakah kamu tidak memahaminya?

Demikian pula Firman Allah dlm QS Al-Hijr/ 15:19.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

Terjemahnya :Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.

Pada bagian akhir penjelasannya tentang kekeliruan cara pandang para ekonom kapitalis dalam mengidentifikasi persoalan ekonomi yang paling mendasar dengan menyatakan bahwa kelangkaan (*scarcity*) adalah problem utama yang melahirkan masalah dalam bidang ekonomi, Dr Isa Abduh menyatakan “yang kami maksud dengan ketercukupan itu adalah merupakan salah satu kepastian penciptaan. Berbagai kebaikan yang ada di muka bumi ini serta potensi alam yang ada di sana akan ditemukan dengan melimpah melebihi kebutuhan itu sendiri. Inilah makna ketercukupan dalam kajian-kajian ekonomi. Ketercukupan sebagai kondisi awal penciptaan , sebagaimana yang ada dalam kajian ekonomi islam kontradiksi dengan kelangkaan yang oleh buku-buku ekonomi politik dijadikan sebagai mainstream

kajian mereka. Di sini, terlihat fokus perbedaan yang mendalam antara ketercukupan dan kelangkaan.⁶

Problem kelangkaan (*scarcity*) hanyalah sebuah fenomena dari sekian banyak fenomena ekonomi dan menciptakan berbagai kesulitan bagi manusia. Tidak diingkari bahwa fenomena kelangkaan bisa saja terjadi dalam suatu kondisi, sehingga para ekonom muslim tidak mengingkari kemungkinan didapatinya kondisi tersebut. Yang menjadi kritik para ekonom muslim terhadap pandangan ekonom kapitalis adalah ketika fenomena kelangkaan itu dianggap sebagai fenomena asal penciptaan.

Sebagai ilustrasi, spesies air yang hidup di lautan dan samudera kuantitasnya melebihi kebutuhan manusia. Meskipun demikian, dipasaran bisa saja suplay ikan berkurang atau bahkan habis, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan melonjaknya harga ikan dipasaran, bahkan bisa melambung melebihi batas daya beli sebagian besar orang. Apa yang terjadi pada komoditas ikan diatas, sangat mungkin terjadi pada komoditas lain seperti sembako dan kebutuhan pokok yang lain.

Sehingga adanya fenomena kelangkaan pada sebuah komoditas pada sebuah tempat dan kurung waktu adalah fenomena yang tidak dapat disangkal, tetapi sebab-sebab kelangkaan tersebut terjadi karena keterlibatan manusia dalam menciptakannya, baik karena ketidakmampuan atau akibat buruknya tindakan manusia.

Sebab-sebab kelangkaan itu dapat diuraikan kedalam beberapa point, *Pertama*; kemampuan manusia yang terbatas untuk memanfaatkan kekayaan alam

⁶ Dr. Isa Abduh, *Ekonomi Islam sebuah pengantar dan methodology*, h. 51

yang terkandung pada bumi; pohon secara kuantitatif jumlahnya sangat banyak, tetapi kadangkala manusia tidak mampu untuk mengolanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Air juga jumlahnya secara kualitatif sangat banyak, tetapi kadangkala manusia tidak mampu melakukan proses penyulingan dan mengubahnya menjadi air tawar, sehingga kebutuhan mereka terhadap air untuk kebutuhan hidup dan irigasi untuk menyuburkan lahan pertanian dan perkebunan misalnya bisa tercukupi. Demikianlah seterusnya, potensi-potensi yang dikandung oleh bumi yang disiapkan oleh sang pencipta akan senang tiasa cukup, bahkan melebihi kebutuhan manusia seandainya mereka betul-betul mengembangkan kemampuan untuk mengelola bahan-bahan dasar dan potensi yang dikandung oleh bumi. *Kedua*; Tidak maksimalnya upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di antara permasalahan populer dalam kajian-kajian ekonomi politik adalah adanya ide bahwa setiap orang ingin melakukan pengorbanan seminimal mungkin dengan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Pekerja ingin bekerja dengan jam kerja seminim mungkin, sementara pemilik modal menghendaki seminim mungkin resiko. *Ketiga*; aktifitas eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang mengakibatkan rusaknya alam dan ekosistem yang terkandung di dalamnya. Dalam sebuah pertemuan lingkungan tingkat dunia di Brasil beberapa waktu yang lalu, terungkap bahwa perusak lingkungan yang terbesar di dunia, tidaklah dilakukan oleh individu, tetapi justru dilakukan oleh Negara yang diperalat untuk kepentingan para kapitalis pemilik korporasi raksasa. Yang Keempat; adalah mekanisme distribusi kekayaan Negara yang tidak berjalan secara baik akibat penerapan sistem ekonomi

kapitalisme yang mengakibatkan sektor kepemilikan umum yang harusnya dikelola dan dimaksimalkan oleh Negara untuk memenuhi kebutuhan primer (*basic needs*) setiap individu masyarakat, hanya dikuasai oleh para kapitalis akibat tidak jelasnya konsep kepemilikan harta.

2. Kritik Terhadap Teori Nilai

Ekonomi kapitalisme menganggap nilai (*value*) adalah sesuatu yang bersifat nisbi (relatif) bukan sesuatu yang bersifat hakiki (riil). Pandangan tersebut mengandung makna, bahwa dalam ekonomi kapitalisme nilai adalah sesuatu yang bersifat subjektif, tergantung kepada individu tertentu dan komoditas tertentu. Atas dasar itu, nilai selembar pakaian yang terbuat dari bahan wol, misalnya, adalah batas akhir kegunaan (manfaat) pakaian tersebut pada saat pakaian itu bisa diperoleh dipasaran.

Dalam ekonomi kapitalisme, nilai juga dapat diukur dengan barang dan jasa. Nilai berubah menjadi harga, apabila yang digunakan sebagai ukuran/standar untuk memperoleh sebuah komoditas adalah uang. Maka menurut ekonom konvensional, nilai (*value*) sebuah komoditas (barang atau jasa) bisa dibedakan menjadi dua sudut pandang penilaian, yaitu nilai guna (*utility value*) dan nilai tukar (*exchange value*). Keduanya adalah hal yang berbeda.

Dua nilai yang telah disebutkan di atas, yaitu nilai guna (*utility value*) dan nilai tukar (*exchange value*) jelas memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Makna nilai (*value*) dengan batasan tersebut jelas keliru dan bertentangan dengan fakta. Alasannya, bahwa nilai sebuah komoditas apapun baik barang ataupun

jasa ditentukan oleh manfaat (kegunaan)-nya dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Karena itu, pandangan yang hakiki (riil) terhadap sebuah komoditas apapun adalah pandangan terhadap aspek kegunaan (manfaat)-nya dengan memperhatikan faktor kelangkaannya; baik yang dimiliki oleh manusia sejak asal atau disediakan langsung oleh alam, seperti daging hewan hasil dari berburu di hutan; atau hasil jerih payah dan pertukaran, semisal hasil jual beli; atau barang tersebut terkait orang lain maupun benda lain.

Dengan demikian, nilai sebuah komoditas adalah sesuatu yang bersifat riil (hakiki), bukan sesuatu yang bersifat nisbi (relatif) atau bukan nama sesuatu yang bersifat 'nominal' yang berlaku pada sebutan dengan sesuatu anggapan dan tidak diberlakukan padanya anggapan yang lain. Berdasarkan fakta nilai sebuah komoditas yang telah dijelaskan di atas, pandangan para ekonom kapitalis terhadap nilai adalah pandangan yang keliru sejak dari asasnya.

Adapun apa yang dijelaskan oleh para ekonom konvensional dengan sebutan "nilai batas (*marginal value*)" merupakan suatu perkiraan untuk mengkonsentrasikan produksi pada sejumlah kemungkinan terburuk dari penjualan sebuah komoditas. Nilai barang harus diukur berdasarkan batas paling rendah sehingga produksinya tetap terus berjalan di atas pijakan yang bisa dijamin. Nilai batas (*marginal value*) itu hakikatnya bukan nilai sebuah komoditas, bahkan tidak berkaitan dengan harga barang. Sebab nilai sebuah komoditas semata-mata ditentukan oleh perkiraan guna (*utility*) yang terdapat padanya dengan memperhatikan faktor kelangkaannya pada saat tertentu. Turunnya harga terhadap sebuah komoditas tertentu tidak mengurangi

nilainya, sebagaimana naiknya harga komoditas tersebut tidak akan menambah nilainya, sebagaimana yang dapat kita lihat pada tabel perbedaan harga dan nilai tukar, Sebab, nilai barang sudah ditentukan. Karena itu, teori batas (*marginal theory*) pada hakikatnya adalah teori yang menjelaskan tentang harga, bukan teori tentang nilai, sebagaimana pada tabel (5) berikut :

Tabel (3) Perbedaan Harga dan Nilai Tukar

Jumlah Barang	Harga	Nilai tukar
1 sepeda motor Honda	Rp. 5,000,000	1 Ekor Sapi
1 sepeda motor Honda	Rp. 4,000,000	1 Ekor Sapi
1 sepeda motor Honda	Rp. 3,000,000	1 Ekor Sapi
1 sepeda motor Honda	Rp. 2.000.000	1 Ekor Sapi
1 sepeda motor Honda	Rp. 1.000.000	1 Ekor Sapi

Tabel di Atas menggambarkan, bahwa harga sepeda motor Honda, dapat naik dan turun. Tetapi, naik dan turunnya harga sepeda motor Honda tersebut dari Rp.5.000.000; ke Rp.1000.000; tidak mengurangi nilai tukarnya terhadap seekor sapi⁷.

Ekonom konvensional telah melakukan sebuah kesalahan dalam menafsirkan nilai (*utility value*) sampai pada batas akhir pemenuhannya.⁸ Dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa potongan roti pertama diberi nilai 10 yang merupakan tingkat kepuasan tertinggi. Potongan roti yang kedua tidak lagi memiliki kenikmatan yang sama dengan yang pertama, maka diberi nilai lebih rendah, yaitu 8. Roti yang ketiga

⁷ Hafidz Abdurrahman, *Muqaddimah, Sistem ekonomi Islam*, h.29-30

⁸ Lihat pada tabel (3) Kepuasan batas, Bab II dalam tesis ini, h.

sampai keempat tingkat kenikmatannya semakin menurun, nilai kepuasannya sebesar 6 dan 2. Sedangkan potongan yang kelima tidak dapat dimakan lagi, sudah puas atau sudah jenuh, karena itu diberi nilai 0. Inilah yang disebut dengan *marginal Satisfaction Theory*, sebagai kelanjutan dari hukum Gossen.

Pertanyaan-nya, apakah nilai (kegunaan/*utility*) yang ada pada unit pertama (Potongan roti), ketika digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, berbeda dengan unit terakhir, ketika kita sudah memenuhi kebutuhan kita?, atau dengan pertanyaan yang lebih tegas lagi, apakah nilai potongan roti yang pertama, berbeda dengan potongan roti yang keenam? Sekedar perbandingan, kalau dalam sehari, seorang penjual roti mampu menyediakan 500 potong, apakah ada perbedaan nilai tiap potongan roti tersebut, sehingga dapat di asumsikan bahwa nilai sepotong roti yang pertama berbeda nilainya dengan potongan yang keenam sebagaimana yang telah dijelaskan ekonom kapitalis pada tabel kepuasan nilai batas.

Pada faktanya, yang terjadi justru sebaliknya, ketika seseorang dalam kondisi lapar, maka kebutuhan akan makanan tersebut memang lebih besar. Begitu makanan pertama dimakan, maka kebutuhannya terhadap makanan berikutnya terus menurun, sehingga pada batas tertentu tidak lagi dibutuhkan. Tetapi kenyataan diatas sebenarnya terkait dengan kebutuhan orang tertentu, tidak ada kaitannya dengan nilai sebuah komoditas, sebab nilai sebuah komoditas tetap sama. Karena itu teori Nilai batas (*marginal value*) yang menjadi pembahasan dalam ekonomi kapitalisme adalah sebuah pandangan yang bertentangan dengan realitas dan tentu akan melahirkan

pandangan-pandangan yang keliru pada tahapan kebijakan dan implementasi politik ekonomi-nya.

Seharusnya, *teori marginal value* digunakan oleh produsen dalam mengukur kuantitas produksi sebuah komoditas baik barang ataupun jasa sebagai sebuah kajian apakah sebuah produk sesuai dengan permintaan atau tidak. Jika sesuai dengan permintaan pasar, maka produsen akan mendapatkan keuntungan. Jika tidak, sementara mereka telah terlanjur memproduksi dalam jumlah yang besar, maka produk tersebut tidak akan bisa diserap oleh pasar dan para produsen akan mengalami kerugian.

Itulah sebabnya, teori Nilai batas ini sebenarnya merupakan teori tentang harga, bukan teori tentang nilai. Teori yang berorientasi untuk memfokuskan produksi pada titik tertentu dan pada akhirnya bisa menjamin keberlangsungan produksi dengan menghitung kebutuhan konsumen atau permintaan pasar. Sehingga akan didapatkan harga yang bisa menutupi biaya produksi, dengan margin keuntungan yang bisa diterima secara rasional. Hal tersebut akan menghindarkan tindak pemimbunan dan persaingan tidak sehat di pasar.⁹

Demikianlah penjelasan tentang teori nilai (*teori of value*) yang menjadi pilar kedua sistem ekonomi kapitalisme, bertentangan dengan fakta dan jelas keliru, sesat dan batil dalam perspektif islam.

⁹ Hafidz Abdurrahman, *Muqaddimah Sistem ekonomi Islam*, h.63-65

3. Kritik Terhadap Teori Harga.

Para ekonom konvensional berpendapat, bahwa harga (*price*) memainkan peran yang sangat urgent. Harga berperan sebagai pendorong laju produksi, juga berperan untuk mendorong keseimbangan produksi dan konsumsi, juga memainkan peran penting dalam *supply and demand*, sekaligus sebagai mekanisme paling ideal dalam distribusi. Dari sinilah teori harga (*theory of price*) dibangun

Harga dapat berperan sebagai pendorong laju produksi, karena dalam menurut mereka, yang mendorong manusia untuk mencurahkan jerih-payahnya adalah imbalan (*reward*) yang bersifat materi semata (*qimah maa'diyyah*)¹⁰. Pandangan seperti ini jelas bertentangan dengan fakta, sesat dan zalim. Sebab akan menjerumuskan kehidupan manusia dalam kehinaan.

Secara realitas, banyak dijumpai jerih-payah yang telah dilakukan oleh manusia bukan dalam rangka mendapatkan balasan material (*qimah ma'diyyah*) dengan dorongan materi (*quwah ma'diyyah*), tetapi semata-mata didorong atau dimotivasi oleh *al-quwah ruhiyyah* (dorongan spiritual) demi memperoleh imbalan yang bersifat in-material, seperti dorongan untuk mendapatkan pahala dari Allah swt, atau dimotivasi oleh *al-quwah ma'nawiyah* (dorongan moralitas) agar memiliki sifat akhlak, seperti menunaikan *aqod*/ janji dan seterusnya.

Fakta menunjukkan, bahwa kebutuhan manusia kadang-kadang bersifat materi, seperti ingin memperoleh keuntungan materi; kadang-kadang bersifat spiritual, seperti *taqdis* (penghormatan yang tinggi); atau kadang-kadang bersifat in-

¹⁰ D.H Penny, *Kemiskinan, peranan sistem pasar*, h.114

material, seperti pujian. Karena itu, membatasi kebutuhan hanya pada kebutuhan yang bersifat materi semata jelas tidak benar. Sebab, manusia kadang dijumpai rela mengorbankan sejumlah hartanya untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya, atau kebutuhan emosionalnya dan kadang jumlah harta yang dikorbankan untuk mendapatkan keduanya, jauh lebih besar dari yang dikorbankan sekedar untuk mendapatkan kebutuhan materinya.

Berdasarkan fakta di atas, harga bukanlah satu-satunya faktor yang bisa mendorong tingkat manusia bergerak/ berproduksi, tetapi masih ada faktor yang lain. Sebagai contoh, kadangkala kita menemukan seorang tukang batu yang bekerja sehari-hari untuk membangun sebuah masjid dan dia tidak mengharapkan imbalan materi sepeser-pun. Atau kadang ada seorang pengusaha yang bekerja dan menghasilkan produksi dan keuntungan yang besar kemudian dia rela menyumbangkan hartanya demi untuk menyantuni fakir miskin, tanpa mengharapkan imbalan materi sedikitpun dari apa yang dilakukannya. Hal inilah yang dilakukan umat islam yang berangkat ketanah suci, mereka mengorbankan harta mereka hanya demi untuk mendapatkan pahala dari Allah swt. Pertanyaanya, Apakah kegiatan produksi dan aktivitas seperti ini didorong oleh harga? Jelas tidak!. Tetapi fakta dan realitas di atas tidak dapat dipahami oleh ekonom konvensional dengan akidah sekularisme, sebab mereka telah meyakini "bukan karena kebaikan hati seorang

tukang daging yang menyebabkan kita dapat makan daging darinya, tetapi semata-mata karena kepentingannya terhadap kita".¹¹

Pandangan yang keliru juga dapat di jumpai dalam pemikiran para ekonom konvensional, ketika harga dijadikan sebagai satu-satunya penentu distribusi kekayaan atau barang dan jasa kepada anggota masyarakat. Mereka mengatakan, sesungguhnya yang mengendalikan manusia ketika berusaha untuk memperoleh harga, baik untuk dimiliki maupun untuk dikonsumsi adalah harga, sebab manusia hanya akan berhenti tergantung pada batas harga barang yang mampu dibeli dan dijangkaunya. Dengan demikian, naik turunnya harga pada barang dan jasa demikian pula naik turunnya daya-beli terhadap suatu barang, menjadikan harga itu sebagai penentu distribusi barang dan jasa kepada konsumen. Dengan begitu bagian seseorang, untuk mendapatkan kekayaan dalam suatu Negara tidak diukur berdasarkan kebutuhan primernya, tetapi sebanding dengan nilai jasa yang telah diinvestasikan dalam memproduksi barang dan jasa; atau diukur dengan harta dan uang, atau diukur dengan tenaga dan kerja, atau kontribusi yang diberikan kepada proses produksi/perusahaan.

Dengan menjadikan kaedah struktur harga sebagai pengendali distribusi, sistem ekonomi kapitalisme benar-benar telah memastikan, bahwa manusia yang layak hidup adalah manusia yang mampu berinvestasi dalam proses produksi barang dan jasa. Sebaliknya mereka yang tidak memiliki kemampuan karena kelemahannya

¹¹ Adam Smith, tentang motivasi produksi

yang dimilikinya, tidak layak memperoleh harga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Demikian pula, seseorang dianggap layak dan sah untuk bertindak serakah, berkuasa serta menguasai pihak lain dengan hartanya selama dia memang memiliki kemampuan untuk itu. Sehingga seorang pengusaha atau sebuah perusahaan bisa saja memiliki sumber-sumber kekayaan yang merupakan milik umum ataupun milik Negara, selama mereka mampu membayar harganya.

Cara pandang demikian jelas akan menjauhkan unsur spiritual dan moralitas dari kehidupan manusia dan akan menjadikan kehidupan ini bersifat material belaka. Jadilah hidup ini sekedar didedikasikan untuk memperoleh alat pemuas kebutuhan yang bersifat materi semata, karena itu mereka menyebut manusia dengan sebutan yang sangat rendah dan hina, yakni "*animal economic*". Itulah kenyataan yang dapat ditemukan di Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme dalam menjalankan politik ekonominya.

Para penguasa dan para konglomerat, demikian pula para produsen (kapitalis pemilik modal) tampak nyata mendominasi kehidupan masyarakat. Atas nama produsen terhadap konsumen, segelintir orang, seperti para pemilik perusahaan besar semisal perusahaan minyak, mobil, industri berat dan yang lainnya, mendominasi serta menguasai mayoritas konsumen (masyarakat) sekaligus memaksa konsumen untuk membeli dengan harga tertentu.

Inilah yang mendorong berbagai upaya tambal sulam dalam sistem ekonomi kapitalisme ini. Lalu mereka memberikan hak kepada Negara untuk melakukan

intervensi dalam menentukan harga dalam kondisi-kondisi tertentu demi melindungi ekonomi dalam negeri, melindungi konsumen, mengurangi konsumsi atas sebagian barang sekaligus mencegah kekuasaan para mafia. Demi mengatur produksi, mereka juga membuat sejumlah proyek sosial yang dikelola atas nama Negara.

Namun, tambal-sulam ini, meskipun jelas-jelas bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi kapitalisme, yaitu kebebasan ekonomi dan mekanisme pasar bebas_sebetulnya hanya terjadi dalam situasi dan kondisi tertentu. Itulah sebabnya, pada Negara-negara yang menjalankan politik ekonomi yang berlandaskan pada kaedah ini, menjadikan subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat sebagai beban dan harus terus menerus dikurangi bahkan dihilangkan. Karena seharusnya hanya struktur hargalah yang dapat menjamin terealisasinya titik keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, dengan meminimalisir peran Negara hanya sebatas regulator saja.¹²

Adapun kenyataan yang biasa ditemukan di Negara-negara maju, semisal Amerika Serikat, bahwa kekayaan Negara telah mampu mendorong kesejahteraan hidup masyarakatnya, sampai pada batas memungkinkannya masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka, bahkan pada tingkat pemenuhan kebutuhan sekunder mereka. Semua itu bukan karena politik ekonomi mereka dan bukan karena setiap orang telah memberikan investasi yang sebanding dalam proses produksi, tetapi akibat eksploitasi dan pengerutan kakayaan milik Negara-negara lain atas nama investasi dan penanaman modal yang menyebabkan berlimpahnya harta di Negara

¹² Hafidz Abdurrahman, *Muqaddimah Sistem ekonomi islam*, h.68-72

mereka. Dan hal itu telah mendorong gerakan *eccupy walk street* di Amerika Serikat¹³, akibat keserakahan para penguasa yang bekerjasama dengan para pemilik modal dan kapitalis.

Selanjutnya, dengan menjadikan harga sebagai pengendali distribusi, konglomerasi di barat merambah ke luar negeri untuk mencari pasar. Dengan itu, mereka bisa memperoleh bahan-bahan baku sekaligus menguasai pasar untuk menjual hasil industrinya. Karena itu, apa yang terjadi didunia saat ini seperti kolonialisme pembagian daerah jajahan dan perang ekonomi adalah akibat langsung dari persekutuan para konglomerat raksasa yang telah menjadikan harga sebagai pengendali distribusi kekayaan. Inilah hakekat dari dotrin kelangkaan (*scarcity*), teori nilai (*teory of value*) dan teori harga (*theory of price*) yang mempengaruhi politik ekonomi di hampir semua Negara, termasuk negeri-negeri muslim.

Demikianlah kerusakan teori harga, secara pasti akan menjerumuskan kehidupan manusia kelembah kesesatan dan kezaliman. Hal ini jelas bertentangan dengan sistem ekonomi islam, sebagaimana yang telah dijelaskan.

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street : **Occupy Wall Street (OWS)** adalah sebuah gerakan protes yang dimulai pada tanggal 17 September 2011 di Zuccotti Park, di distrik keuangan Wall Street New York City, yang dicetuskan oleh kelompok aktivis asal Kanada, Adbusters. Para aktivis memrotes ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, pengangguran tinggi, kerakusan, serta korupsi, dan pengaruh perusahaan—terutama dadri sektor jasa keuangan—terhadap pemerintah. Slogan *We are the 99%* yang disuarakan para demonstran merujuk pada ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan di AS antara orang-orang kaya (1%) dan seluruh penduduk Amerika Serikat. Protes di New York City telah mendorong munculnya protes dan gerakan Occupy serupa di seluruh dunia. (di akses 25 september 2014)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap masalah pokok dan sub masalah yang diajukan, dengan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pertama : Ide kelangkaan (*scarcity*), teori nilai (*theory of value*) dan teori harga (*theory of price*) adalah pilar-pilar tegaknya ekonomi politik kapitalisme (*political economic capitalism*). Ketiga ide tersebut lahir dari akidah sekuler, yakni pandangan hidup yang memisahkan antara agama dan kehidupan, sehingga jelas batil dan tidak sejalan dengan ekonomi islam yang lahir dari akidah tauhid.

Kedua : Problem kelangkaan (*scarcity*) dalam pandangan ekonom konvensional adalah merupakan problem utama/mendasar atau dengan istilah yang lain sebagai problem sebab, yang menjadi sumber lahirnya berbagai problem cabang/sekunder atau dalam istilah yang lain sebagai problem akibat dalam bidang ekonomi. Mereka menyakini satu-satunya solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan problem utama tersebut hanya dengan mendorong aktivitas produksi pada level setinggi-tingginya. Dengan selesainya problem utama/sebab dengan meningkatnya produksi, maka problem cabang/akibat berupa permasalahan seputar konsumsi dan distribusi dengan sendirinya juga akan selesai. Pandangan demikian bertentangan dengan sistem ekonomi islam. Berdasarkan petunjuk dalil-dalil syara, problem utama/mendasar dalam bidang ekonomi terletak pada mekanisme distribusi bukan pada produksi, itulah sebabnya

terkait dengan pemecahan problem distribusi dalil-dalil syariat datang dalam bentuk terperinci, tidak diserahkan pada fitrah/kecenderungan dan akal pikiran manusia, tetapi manusia hanya sekedar diperintahkan untuk memahami dan mengimplementasikannya. Sementara problem produksi, menyangkut apa dan berapa kapasitas produksi, dalil-dalil syariat datang dalam bentuk global tanpa dirinci, karena manusia dengan fitrah dan kemampuan akal yang dianugerahkan oleh sang *khalik* akan mampu menganalisis dan mengembangkan sektor produksi sesuai dengan kebutuhan di waktu dan masa yang akan dilalui.

Ketiga : Nilai (*value*) dalam kajian yang dikembangkan para ekonom konvensional bersifat nisbi (relatif), tidak bersifat rill. Artinya nilai suatu barang atau jasa bersifat subjektif, tergantung kepada individu tertentu dan komoditas tertentu. Nilai (*value*) diukur berdasarkan *Utility*/kegunaan yang terdapat pada suatu barang atau jasa, sementara *utility* disandarkan kepada *suplai and demand*, Artinya *utility* identik dengan *price*/harga yang akan terus berubah mengikuti penawaran dan permintaan di pasar. Berbeda dengan kajian tentang nilai (*value*) yang dijelaskan dalil-dalil syariat dan dikembangkan para ekonom muslim, Nilai adalah sesuatu yang bersifat rill, tidak relatif dan bersifat subjektif. Artinya nilai adalah sesuatu yang memiliki ukuran yang jelas, bukan sekedar asumsi. Nilai suatu barang dan jasa disandarkan kepada manfaat (*maslahah*) yang dikandungnya. Itu berarti Nilai (*value*) diukur besar-kecilnya, ada atau tidak adanya, tergantung kepada *maslahah* yang ditimbulkannya.

Keempat : Harga (*price*) menurut kajian ekonom konvensional memiliki peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Harga berperan sebagai pendorong produksi, juga berperan sebagai pengendali konsumsi, sekaligus sebagai satu-satunya mekanisme distribusi. Berbeda dengan peran harga dalam kajian ekonom muslim yang disandarkan kepada dalil-dalil syariat, Harga hanya salah satu dan bukan satu-satunya pendorong aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi. Menganggap harga sebagai satu-satunya motivasi dalam produksi, konsumsi dan distribusi bertentangan dengan realitas dan akidah islam, sebab telah menempatkan derajat kehidupan manusia selevel dengan derajat hewan, menjadikan manusia budak hawa nafsu dan hidup dalam kubangan kemaksiatan dan kezaliman.

Kelima : Ekonomi politik kapitalisme/ *political economic capitalism* yang dikembangkan dalam kajian para ekonom konvensional menyakini, bahwa politik pertumbuhan sebagai satu-satunya jalan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera dalam sebuah negara. Dengan meningkatnya kekayaan negara, maka secara otomatis akan mengatasi seluruh problem ekonomi masyarakat melalui mekanisme *invisible hand* dan teori *trickle down effect*. Pemahaman di atas bertentangan dengan pandangan para ekonom muslim yang terimplementasi dalam sistem ekonomi islam. Menurut ekonom muslim, konsep politik pertumbuhan, mekanisme *invisible hand* dan teori *trickle down effect*, tidak sejalan dengan realitas dan bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Meningkatnya kekayaan suatu negara belum tentu berkorelasi langsung dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, artinya suatu negara bisa saja

mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang diderita masyarakatnya tetap berlangsung, sebab konsep pertumbuhan ekonomi, *invisible hand and trickle down effect theory*, hanyalah menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan yang semu dan berlandaskan kepada asumsi/spekulatif dan keyakinan yang tidak jernih/*musta'nir*.

Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

Pertama : Saran Untuk *Stakeholder* Perekonomian Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arah politik ekonomi indonesia yang didesain dengan asas, teori dan aplikasi ekonomi politik kapitalisme liberalisme telah mengarahkan pembangunan ekonomi indonesia tidak sejalan bahkan semakin jauh dari semangat konstitusi dan akidah mayoritas penduduk negeri ini. Hal tersebut dapat diraih dengan implementasi politik ekonomi yang sejalan dengan ekonomi politik/ sistem ekonomi islam dalam aspek kebijakan publik.

Kedua : Saran Untuk *Stakeholder* Ekonomi Islam di Indonesia.

Pengembangan Ilmu ekonomi islam seharusnya diarahkan pada penyelesaian problem dasar ekonomi dalam perspektif islam sebagai jawaban atas persoalan kesenjangan, ketergantungan dan keberpihakan pada kelompok kuat yang telah dilahirkan akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme liberal, yaitu

bagaimana melahirkan mekanisme distribusi yang adil dan mensejahterakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengkajian-pengkajian secara mendalam terhadap nash-nash syara' dan aplikasinya dalam rentang sejarah kehidupan umat islam dimasa khilafah /pemerintahan dan konstitusi islam.

Ketiga : Saran bagi peneliti selanjutnya.

Bagi peneliti yang lain yang tertarik untuk melakukan penelitian terhadap objek yang sama, disarankan untuk memperluas kajian yang dilakukan dan belum tercakup dalam penelitian ini, yaitu aspek politik ekonomi islam dan kebijakan publik yang meliputi politik perindustrian, politik pertanian, politik pertahanan dan politik pembiayaan dan pendanaan proyek.

Wallahu a'lam bi shawab

DAFTAR PUSTAKA

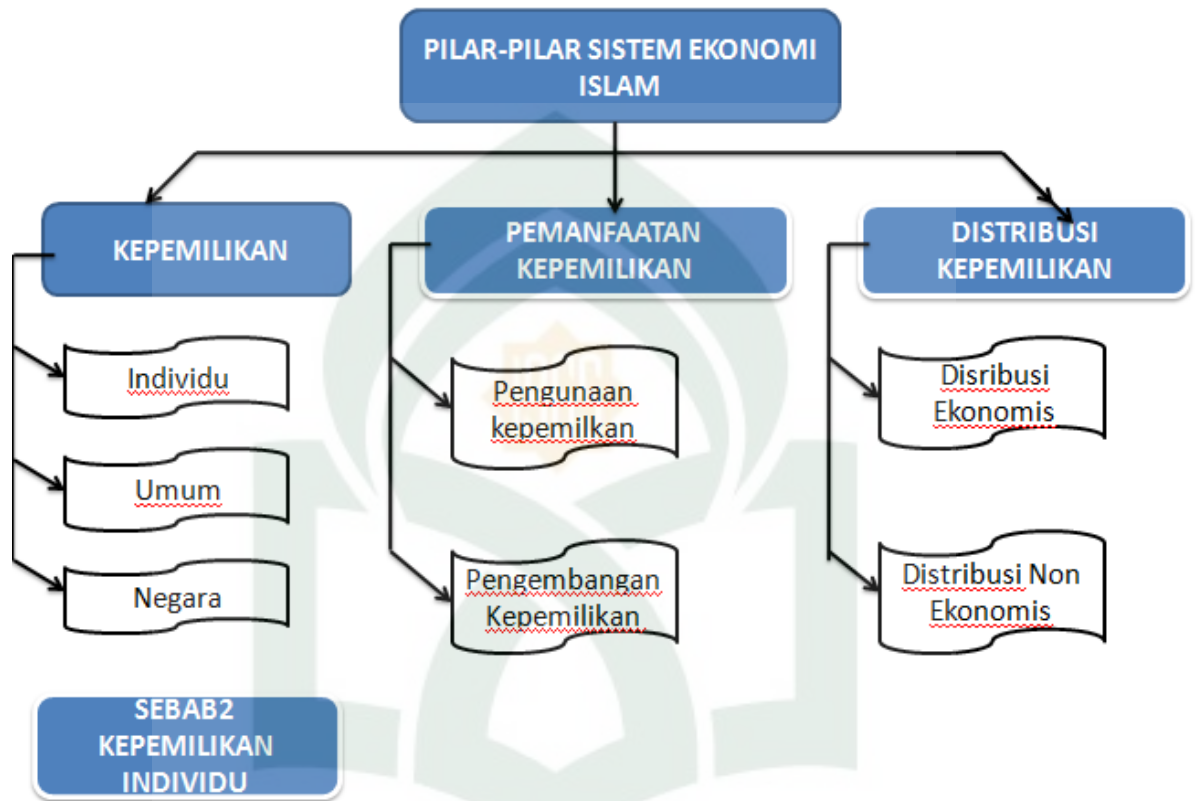
- Abdurrahman, Hafidz, Muqoddimah Sistem Ekonomi Islam, Cet. I; Banjarjati-Bogor : Al-Azhar Press, 2011.
- Alisjahbana, Armida, Prof. Dr.-Kep. Bappenas, *dialog Ekonomi Indonesia ke depan* (Live event Metro TV: Memilih wakil rakyat). Tayang ; 10 April 2014, Pukul 20.00-22.00 WITA.
- Al-Maliki, Abdurrahman, *As-Siyasatu al-iqtishadiyatu al-Mutsala*. Terj. Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam*, Bangil-Jatim : Al-Izzah, 2001.
- Al-Khalidi, Mahmud,DR. *Hukm Al-Islam Fi Ra'sumaliyyah*. Terj .Muhammad Wahiduddin, *Kerusakan dan Bahaya Sistem Ekonomi Kapitalisme*, Jakarta Selatan: Wahyu Press,2002.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nizamul-Iqtishody fil-Islam*, Cet.II ; Bairut-Libanon, 1960.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nizamul Iqtishody fil-Islam*, Terj; Moh Magfur Wahid : *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Jakarta : Risalah Gusti, 1990.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nizamul –Hukmi Fil-Islam*, Cet III ; Bairut-Libanon : Daarul Ummah, 1990
- Az-Zein, S. A.. Syari'at Islam : *Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan* (Terjemahan). Penerbit Husaini. Bandung1981
- Basri, Faizal, Dr.-Pakar ekonomi Univ Indonesia UI Jakarta, *dialog Ekonomi Indonesia ke depan* (Live event Metro TV: Memilih wakil rakyat). Tayang; 10 April 2014, Pukul 20.00-22.00 WITA.
- Baswier, Refrison, Dr.- Pakar ekonomi UGM Jogja. *Dialog Ekonomi Indonesia ke depan* (Live event Metro TV: Memilih wakil rakyat). Tayang ; 10 April 2014, Pukul 20.00-22.00 WITA.
- Budiono, Seri Sinopsis pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Monoter Ed.III, Cet. VII; Yogyakarta : BPFE, 1992.

- Boediono, Seri Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Mikro, Cet.VII; Yogyakarta : BPFE, 1999.
- Condro, Triono Dwi, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, Cet, I; Bantul-Jogjakarta : Irtikaz, 2012.
- Condro, triono, Dwi, *Retorika Menguncang Dunia*, Cet, I ; Yogyakarta : Irtikaz, 2010..
- Chapra, Umar, *Sistem Moneter Islam* ; Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Convensionagreement,http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm, 2014.
- Darmadi, Sony -Ketua lembaga demografi UI, *dialog Ekonomi Indonesia ke depan* (Live event Metro TV: Memilih wakil rakyat). Tayang: 10 April 2014, Pukul 20.00-22.00 WITA.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* ; Jakarta : Rajawali Press, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Toha Putra, 1989
- Djojodipuro, Marsudi, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta : Fak Ekonomi Univ Indonesia, 1995.
- Fuad, Abu , *Ensiklopedia mini negeri Muslim* ,Bogor : Pustaka Thariqul Izzah,2013.
- Hamid, Arfin, Prof.Dr. SH,MH, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, Cet, I, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia.
- Heilbroner, Robert L, *Terbentuknya Masyarakat ekonomi, terjm,Sultan Dianjung* ,Ed..IV; Cet.1; Ghalia Indonesia, 1982.
- Indonesia,Wikipedia *the Free Encyclopedia* .
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#cite_ref_Indonesia:_environment_and_development_35-0, 2014.
- Indonesia,The Free enciclopedia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia at a Glance](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_at_a_Glance)" (PDF). *Indonesia Development Indicators and Data*. Bank Dunia. 2006-08-13. 2014.
- Ikbar, Yanuar *Ekonomi Politik Internasional: Studi Pengenalan Umum*. Bandung : Universitas Padjadjaran. 2002.

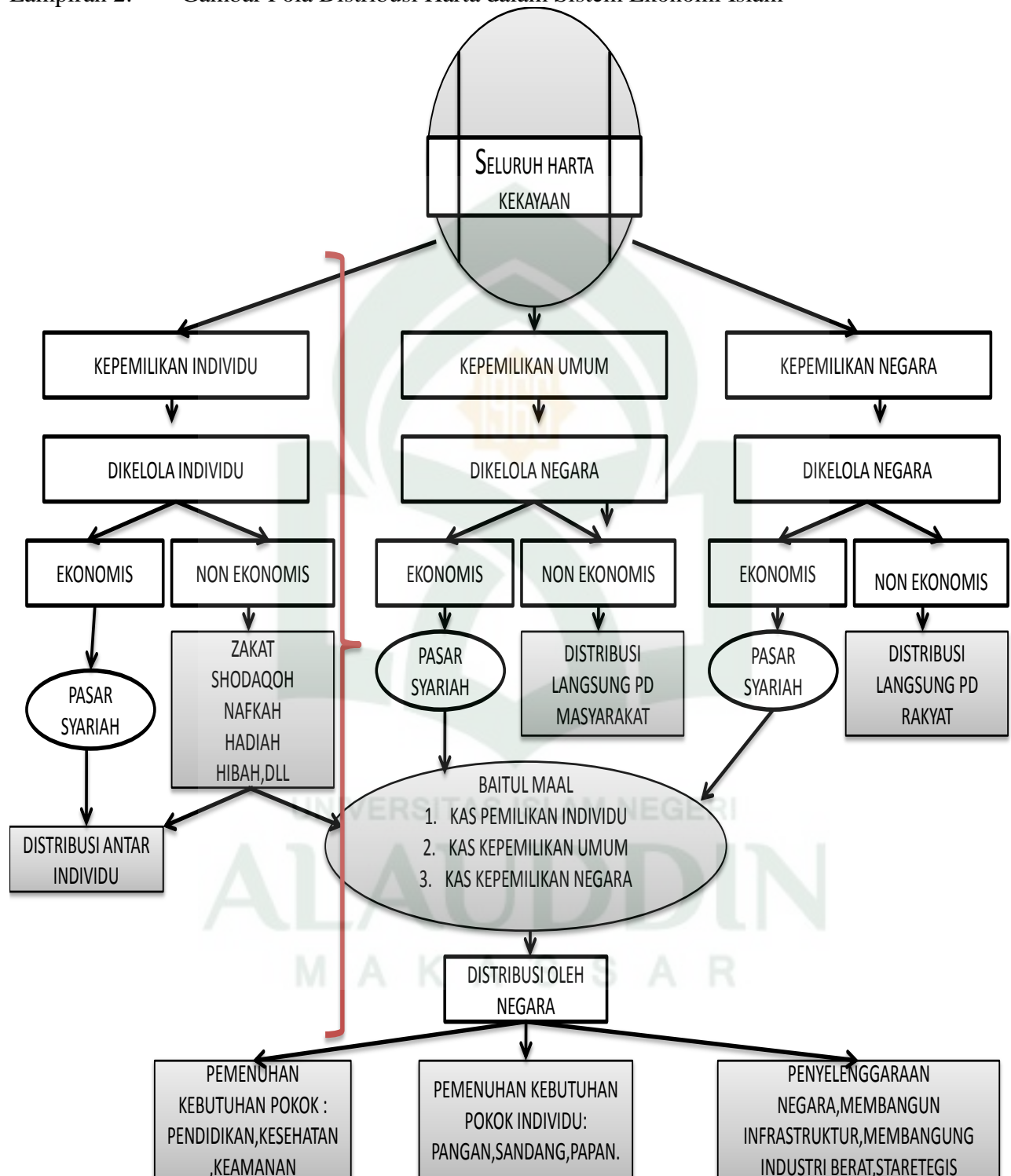
- Ismail, Muhammad Muhammad, *Alfikrul islamiy* ; Bairut : Maktabah Al-waie, 1958.
- Ismail, Muhammad, Muhammad, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*,; Jakarta : GIP, 1997.
- Jibril, Muhammad, Republika on line, *berita nasional*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/12/15/mf2ifo-jero-wacik-klaim-zaman-keemasan-kembali-di-era-sby> , 2014.
- Kadariusman, YB, Bernadetta Dwi Suatmi,DKK, *Makro Ekonomi Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kartikasari, Endah, ST, MEI, *Membangun Indonesia Tanpa utang : Membedah APBN 2005-2010 vs APBN Khilafah*, Bogor: Al Azhar Press , 2010.
- Khaerudin, News Nasional ,*Kompas.com*, *Antisipasi Jangan Sampai Indonesia Menjadi NegaraGagal*, <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/26/23383313/Antisipasi.Jangan.Sampai.Indonesia.Jadi.Negara.Gagal> ,2014.
- Mas'oed, Mukhtar, Dr, *Ekonomi Politik Internasional*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1990.
- Muttaqin, Hidayatullah, SE, MSI, *Ekonomi Syariah sebagai Solusi Pengembangan Ekonomi Daerah*, (Makalah yang disampaikan dalam Seminar Ekonomi Syariah di Aula Bank Indonesia Banjarmasin It VI. 10 November 2010.
- News,Tanah Papua.com, *Pemerintahan SBY Gagal Sejahterakan Rakyat*,<http://tanahpapua.com/index.php/Berita-Terkini/pemerintahan-sby-gagal-sejahterakan-rakyat.html>. 2014.
- Nanga, Muana. *Makro ekonomi, Teori masalah dan kebijakan* (Cet; II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 1997.
- Ngura, I Gusti, Agung, DKK, *Ekonomi Mikro, Suatu analisis Terapan*, Jakarta : Rajawali Press, PT Grafindo Persada.

- Rachbini, Didik J, Prof, Dr, *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik* (Cet; I, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.
- Skausen, Mark, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro, Teori-teori Ekonomi Modern*, Penerbit : Pranada
- Triyanto, Suseno, Wibowo, Drs, HG, MS, *Ekonomi Indonesia, Fakta dan Tantangan dalam Era Liberalisasi* (Jakarta : Kanisius), 1998.
- Penny, DH, Kemiskinan, Peranan Sistem Pasar. Terj ; Ani rahayu DKK, Jakarta : Univ Indonesia, 1990.
- Prasetyantoko, A, *Arsitektur Baru Ekonomi Global, Belajar dari keruntuhan ekonomi Asia Tenggara*, Jakarta : Alex Media Komputindo Group Gramedia, 1990.
- Todaro, Mickel P, *Economic For A Developing Work, anintroduction to principles, problems and policies and development*, Terj; Drs Agustinus subekti : *Ekonomi Untuk Negara berkembang, Suatu pengantar prinsip-prinsip, problem dan kebijakan pembangunan*, (Cet 1), Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet; VII, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.
- Purba, Adisurya, “Analisis Teori Ketergantungan Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia”, *Blog Adisurya Purba*.
<http://adisuryapurba.wordpress.com/2014/03/20/analisis-teori-ketergantungan-terhadap-utang-luar-negeri-indonesia> ,2014.
- Qardhawi, Yusuf, *Malāmiḥu al-Mujtama’ al-Muslim al-ladhī Nashūduḥ*, diterjemahkan dengan judul “*Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur’an & Sunnah*”, Penerbit Citra Islami Press. 2005.
- Samuelson, Paul A & Nordhaus, William D, *Makro Ekonomi* .Terj. Haris Munandar dkk , Jakarta : Erlangga 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2008.

- Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian. Suatu pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rieka Cipta, 1999.
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Makro Modern, Perkembangan Pemikiran dari klasik hingga Keynesian baru*, Jakarta : PT Grapindo Persada, 2007.
- Taufiqurrahman, Muh. Detik News, *Forum Rektor: Indonesia Menuju Negara Gagal*,
<http://news.detik.com/read/2011/02/04/155035/1560291/10/forum-rektor-indonesia-menuju-negara-gagal>. 2014
- Yusanto, Ismail, *Islam Idiologi, Refleksi Cendikiawan Muda*, Cet. I, Bangil : Al-Izzah, 1998.
- Zain, Samith Athif, *Syari'at Islam dalam perbincangan Ekonomi, Politik dan sosial sebagai sebuah perbandingan*, Terj. Hussaini, Bandung, 1988.

Lampiran 1: GAMBAR BAGAN PILAR-PILAR SISTEM EKONOMI ISLAM

Lampiran 2: Gambar Pola Distribusi Harta dalam Sistem Ekonomi Islam



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap : Dirwan S.Hi

Tempat,Tanggal lahir : U.Pandang 18 januari 1979

No HP : 0852 5555 46 90

Alamat : Telkomas Poros, N0 16 Makassar.

Alamat Kantor : Jl. Perintis Kemerdekaan 1, No. 8 Makassar

Pendidikan Formal :

1. SDN Inpres Rappokalling 1. (1985-1991)
2. I'dadiyah Pon-Pes DDI Mangkoso (1991-1992)
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pon-Pes DDi Mangkoso. (1992-1995).
4. Madrasah Aliyah (MA) Pon-Pes DDI Mangkoso. (1995-1998).
5. Fakultas Agama Islam, Jurusan Syariah-Muamalah Universitas Muslim Indonesia (UMI). (1998-2003).

Pekerjaan :

1. Pendiri dan Pengajar di Sekolah dasar Islam terpadu Makassar.
2. Direktur CV.Aliyah Net. Indonesia

Demikian identitas ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Makassar, Januari 2015

Penulis